

**POLITIK ANGGARAN DALAM MODEL PEMANFAATAN
DANA KETAHANAN PANGAN DESA**

Disertasi

Oleh

**UNTUNG
NPM 2136011008**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**POLITIK ANGGARAN DALAM MODEL PEMANFAATAN
DANA KETAHANAN PANGAN DESA**

Oleh

UNTUNG

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Doktor

Studi Pembangunan

Pada

Program Studi Doktor Studi Pembangunan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

POLITIK ANGGARAN DALAM MODEL PEMANFAATAN DANA KETAHANAN PANGAN DESA

Oleh

UNTUNG

Meningkatkan ketahanan pangan desa memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengembangkan potensi desa setempat. Ketahanan pangan mandiri dapat dibangun di tingkat desa melalui pendekatan holistik dan pemberdayaan masyarakat yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi politik anggaran dalam penggunaan dana ketahanan pangan di Desa Wonosari ditinjau dari *Rasional Choice Institutionalism* dan Teori *Network Institutionalism*. Untuk menemukan model penggunaan dana ketahanan pangan yang lebih efektif.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial dan kebijakan terkait pemanfaatan dana ketahanan pangan desa. Sumber data penelitian diperoleh melalui sudut pandang berbagai informan. Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian dan melalui pendekatan ini, penelitian deskriptif kualitatif akan memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif dalam meningkatkan ketahanan pangan desa dan memberikan dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa politik anggaran dalam pemanfaatan dana ketahanan pangan di Desa Wonosari lebih banyak didominasi oleh pemerintah desa, sesuai dengan perspektif *Rasional Choice Institutionalism*, yaitu keputusan *budgeting* cenderung diarahkan pada pembangunan infrastruktur dengan anggapan bahwa hal ini memberikan manfaat jangka panjang, meskipun dampaknya terhadap ketahanan pangan tidak langsung terlihat. Temuan lainnya menunjukkan bahwa hubungan antaraktor dalam desa, sebagaimana dianalisis melalui *Network Institutionalism*, masih belum optimal. Keterlibatan aktor-aktor kunci seperti PKK, kelompok tani, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat minim, sehingga alokasi dana ketahanan pangan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan kolektif. Pemanfaatan dana ketahanan pangan di

Desa Wonosari saat ini lebih fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan model yang tepat untuk Desa Wonosari adalah integrasi antara Petani, BUMDes dan RMP. Model tersebut bertujuan untuk menggabungkan sumber daya dan potensi berbagai aktor lokal untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Kata Kunci : Politik Anggaran, Ketahanan Pangan Desa, *Rational Choice Institutionalism*,
Network Institutionalism

ABSTRACT

BUDGET POLITICS IN UTILIZATION MODELS VILLAGE FOOD SECURITY FUND

By

UNTUNG

Improving village food security requires a comprehensive and sustainable approach in developing the potential of local villages. Independent food security can be built at the village level through a holistic approach and good community empowerment. This study aims to identify budget politics in the use of food security funds in Wonosari Village from the perspective of Rational Choice Institutionalism and Network Institutionalism Theory. To find a more effective model for the use of food security funds.

The research method used is qualitative descriptive to obtain a deep understanding of social phenomena and policies related to the use of village food security funds. The source of research data was obtained through the perspective of various informants. Informants are selected based on certain criteria related to the research topic and through this approach, qualitative descriptive research will provide in-depth and comprehensive insights

The research method used is qualitative descriptive to obtain a deep understanding of social phenomena and policies related to the use of village food security funds. The source of research data was obtained through the perspective of various informants. Informants are selected based on certain criteria related to the research topic and through this approach, qualitative descriptive research will provide in-depth and comprehensive insights in improving village food security and provide a basis in decision-making and planning.

The results of this study found that budget politics in the use of food security funds in Wonosari Village is more dominated by the village government, in accordance with the perspective of Rational Choice Institutionalism, namely budgeting decisions tend to be directed towards infrastructure development with the assumption that this provides long-term benefits, even though the impact on food security is not immediately visible. Other findings show that the relationship between actors in the village, as analyzed through Network Institutionalism, is still not optimal. The involvement of key actors such as the PKK, farmer groups, and the community in decision-making is minimal, so the allocation of food security funds does not fully reflect collective needs. The use of food security funds in Wonosari Village is currently more focused on the development of road infrastructure and the right model for Wonosari Village is the integration between Farmers, BUMDes and RMP. The model aims to combine the resources and potential of various local actors to achieve better outcomes.

Keywords: Budget Politics, Village Food Security, *Rational Choice Institutionalism*

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Disertasi : POLITIK ANGGARAN DALAM MODEL
PEMANFAATAN DANA KETAHANAN PANGAN
DESA

Nama Mahasiswa : UNTUNG

Nomor Pokok Mahasiswa : 2136011008

Program : Studi Pembangunan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. -Komisi Promotor,

Promotor

Co-Promotor

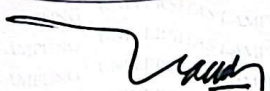


Prof. Dr. Ari Darmastuti, MA.
NIP 196004161986032002



Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si
NIP 196902191994032001

2. Ketua Program Doktor Studi Pembangunan



Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si
NIP 19630206 198803 1002

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

- Ketua : Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M.
Rektor Universitas Lampung
- Sekretaris : Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si
(Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
- Penguji Eksternal : Prof. Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos., M.Si
(Universitas Brawijaya)
- Penguji Internal : Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si
(Ketua Program Studi Doktor Studi Pembangunan)
Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos, M.Si
Prof. Dr. Syarif Makhya
Dr. Nur Efendi, S.Sos. M.Si
- Promotor : Prof. Dr. Ari Damastuti, MA
- Co-Promotor : Prof. Dr. Feni Rosalia, M. Si

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP 19760821 200003 2001


Direktur Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si

NIP 19640326 198902 1001

Tanggal Lulus Ujian Disertasi : 10 Januari 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Untung
Tempat dan Tanggal Lahir : Batu Kebayan, 02 September 1983
Program Studi : Doktor Studi Pembangunan
NIP : 2136011008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Disertasi ini adalah asli (original) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Doktor), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi dan pernyataan dalam disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran, dan/atau gagasan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis, serta sanksi lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Januari 2025



buat Pernyataan,

UNTUNG
NPM 2136011008

HALAMAM PERSEMBAHAN

Untuk Ayahanda dan Ibunda Tersayang serta
Istri dan Anak-anak ku tercinta

Motto

“Libatkan allah dalam segala hal”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Untung, Lahir di Batu Kebayan-Lampung Barat, pada tanggal 02 September 1983.

Merupakan anak kelima dari delapan bersaudara dari pasangan bapak Parmin dan Ibu Minem.

Menikah dengan Novi Milanda, S.Sos., M.Pd. dan telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu:

Zhafar Athaya Putra, Rafif Adyatma Putra dan Arfan Khalif Putra.

Penulis menyelesaikan pendidikan SDN Batu Kebayan (1997),

SMP Negeri Sekincau (2000), SMA Negeri 1 Liwa (2003),

Melanjutkan kependidikan di AMIK Lampung (2005).

Pada tahun 2010 melanjutkan studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer di STMIK Tunas Bangsa, Bandar Lampung selesai pada tahun 2012.

Selanjutnya penulis melanjutkan studi pada Program Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2014.

Pada tahun 2021 terdaftar sebagai mahasiswa Progran Doktor Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung dan menyelesaikan studinya pada tahun 2025.

Penulis merupakan ASN di Pemerintah Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung sejak tahun 2010.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan dan dilimpahkan kepada Penulis sehingga disertasi dengan judul “Politik Anggaran Dalam Model Pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan Desa” dapat diselesaikan, teriring shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Penyelesaian Program Studi Doktor Studi Pembangunan yang penulis tempuh ini banyak mendapat bantuan dan dukungan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Ari Damastuti, MA selaku Promotor dan Prof. Dr. Feni Rosalia, M. Si selaku Co-Promotor yang telah memberikan, bimbingan, arahan, pencerahan dan motivasi kepada penulis untuk tercapainya hasil terbaik dari penulisan disertasi ini, sungguh semua ini melebihi ekspektasi penulis, karena kehadiran Promotor dan Co-Promotor sangat menginspirasi bagaimana cara berfikir penulis dalam nuansa akademis. Demikian juga ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos., M.Si selaku penguji eksternal, Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos, M.Si, Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si, dan Dr. Nur Efendi, S.Sos. M.Si selaku penguji internal yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang membangun dan memotivasi penulis guna lebih memperkaya isi disertasi penulis.

Selanjutnya penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam- dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Doktor (S3) Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si dan Ketua Program Studi Doktor Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Doktor Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Seluruh staf pengajar pada Program Doktor Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan motivasi dalam setiap perkuliahan kepada penulis, terlebih kepada yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si, Prof. Dr. Yulianto, M.S, Prof. Dr. Hartoyo atas segala bantuan, saran dan waktu yang diberikan untuk berdiskusi serta dukungan literatur dalam penulisan disertasi penulis.
4. Bapak Penjabat Bupati Mesuji Dr. Sulpakar, MM, dan Sekretaris Daerah Bapak Syamsudin, S.Sos serta kepala Bappelitbangda Bapak Abu Rosid Istomi, S.Si., M.Si, yang telah memberikan ijin rekomendasi dan kesempatan kepada Penulis untuk melanjutkan kuliah pada jenjang Doktor (S-3) serta seluruh rekan kerja, staf, dan pegawai Bappelitbangda Kabupaten Mesuji yang sangat memaklumi kesibukan penulis.
5. Rekan-rekan Program Studi Doktor Studi Pembangunan angkatan 2021/2022, yaitu Fahrizal Darminto, Andri Jasman, Alvindra, Larto Darmawan, Himawan, Wulan Sisca, Aep Susanto, Simon Sumanjoyo serta angkatan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang senantiasa berdiskusi dan bekerjasama dalam rangka menyelesaikan disertasi ini. Kiranya rekan-rekan semua dapat menyusul untuk segera menyelesaikan studi.
6. Seluruh staf pegawai pada sekretariat Program Studi Doktor Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terutama pada Yeri, Penda, Fitri dan Silvi yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus keperluan administrasi kampus.
7. Bapak Dr. Supriyanto, S.T.P.,M.Kom *Assistant Director of Agromaritim Service and Digital Farming & Departement of Mechanical and Biossystem Engineering*, IPB University atas kesediaan dan keluangan waktu, sharing informasi serta motivasi dalam melengkapi penulisan disertasi ini.

8. Bapak Arif Dwiyanto, S.T., M.T Kepala Dinas Ketahanan Pangan atas keluahan waktu, motivasi dan sharing informasi dalam melengkapi penulisan disertasi ini.
9. Bapak Aspari Kepala Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin lokasi serta support untuk melengkapi penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih yang khusus dan tidak terhingga disampaikan kepada ayahanda Parmin dan Ibunda Minem yang sangat penulis cintai dan banggakan, keduanya sangat tegar mengorbankan segalanya, merawat, mendidik untuk selalu bersyukur, bertanggung jawab serta semangat untuk terus maju dan membuat kebaikan dalam kondisi apapun. Sayangilah keduanya ya Allah sebagaimana mereka menyayangiku sejak masih kecil.

Demikian juga kepada Ayah mertua Mijo dan Ibu Sulastri, mertua terbaik yang senantiasa mendoakan, menasehati, memperhatikan, serta mendukung penulis baik secara moral maupun materiil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktoral. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya serta memberi umur panjang agar penulis diberi kesempatan untuk membahagiakannya.

Ucapan terima kasih tak terhingga dan istimewa kepada Istri tercinta Novi Milanda, S.Sos., M.Pd., yang telah sabar dan sangat pengertian memberikan support yang luar biasa dan memotivasi Penulis dalam menyelesaikan studi serta mendampingi saat suka maupun duka, tanpa dukungan istri, penulis belum tentu tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Studi Pembangunan Universitas Lampung. Kepada ananda tercinta Zhafar Athaya Putra, Rafif Adyatma Putra, Arfan Khalif Putra, terima kasih atas pengertiannya, bantuannya setiap saat, kesabarannya menemani kuliah dan belajar serta permohonan maaf setulusnya, karena selama menempuh studi ini, mungkin pernah terabaikan, kurang mendapat perhatian dan kasih sayang yang cukup, semoga menjadi anak yang sholeh. Kiranya Allah limpahkan berbagai ilmu yang bermanfaat, menjadi penerus agama dan bangsa yang kuat serta berkontribusi untuk kemaslahatan umat manusia. Amin ya rabbalalamin.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan pula kepada saudara- saudara Penulis, Kakak/Adik yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih atas doa dan bantuannya selama ini, semoga allah balas kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda oleh allah SWT.

Akhirnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memiliki andil dalam proses penelitian dan penyelesaian studi ini, semoga Allah SWT membalas amal baik bapak/Ibu dan saudara/i sekalian.

Bandar Lampung, 10 Januari 2025

UNTUNG

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Teori <i>Rational Choice Institutionalism</i> dan Teori <i>Network Institutionalism</i>	15
2.1.1 Teori Pilihan Rasional (<i>Rational Choice Institutionalism</i>).....	15
2.1.2 Teori <i>Network Institutionalism</i>	18
2.2 Tinjauan Politik Anggaran.....	25
2.2.1 Definisi Politik Anggaran	25
2.2.2 Tujuan Politik Anggaran.....	27
2.2.3 Faktor-Faktor dalam Politik Anggaran	27
2.2.4 Proses Penyusunan Anggaran	28
2.2.5 Dimensi Politik Anggaran.....	28
2.2.6 Politik Anggaran Pemerintah Desa Yang Baik.....	30
2.3 Konsep Ketahanan Pangan	31
2.3.1 Definisi Ketahanan Pangan.....	31
2.3.2 Aspek Ketahanan Pangan	32
2.3.3 Tujuan Ketahanan Pangan	33
2.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan	33
2.3.5 Konsepsi Indeks Ketahanan Pangan	34
2.3.6 Indikator Ketahanan Pangan.....	35
2.4 Tinjauan Teori <i>Rational Choice Institutionalism</i> dan Teori <i>Network Institutionalism</i> dengan Pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan.....	38
2.5 Tinjauan Model Pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan.....	39
2.6 Tinjauan Dana Desa.....	41
2.6.1 Definisi Dana Desa	41
2.6.2 Sumber Dana Desa.....	44
2.6.3 Tujuan Dana Desa.....	45
2.6.4 Prioritas Dana Desa.....	46
2.6.5 Prinsip Pengelolaan Dana Desa	47
2.7 Kerangka Berpikir.....	49

III. METODE PENELITIAN	53
3.1 Paradigma Penelitian	53
3.2 Metode Penelitian	54
3.3 Fokus Penelitian.....	55
3.4 Lokasi Penelitian.....	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.5.1 Observasi.....	56
3.5.2 Studi Pustaka.....	58
3.6 Informan Penelitian.....	62
3.6.1 Informan Kunci.....	63
3.6.2 Informan Pendukung.....	64
3.7 Uji Keabsahan Data	66
3.8 Teknik Analisis Data.....	67
3.9 Analisis Stakeholder Power-Interest Matrix	69
IV. GAMBARA UMUM DAERAH PENELITIAN	72
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	72
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Mesuji	72
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Mesuji Timur	79
4.1.3 Gambaran Umum Desa Wonosari	83
4.2 Gambaran Umum Penelitian.....	98
4.2.1 Gambaran Umum Tentang Ketahanan Pangan dan Dana Ketahanan Pangani.....	98
4.2.2 Tata Kelola Dana Desa dan Tata Kelola Dana Ketahanan Pangan Desa	100
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	105
5.1 Hasil Penelitian	105
5.1.1 Politik Anggaran dilihat dari perpektif Teori Rasional Choice Institutionalism dan Teori Network Instituionalism dalam pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan Desa Wonosari	105
5.1.1.1 Politik Anggaran dilihat dari perpektif Teori Rasional <i>Choice</i> <i>Institutionalism</i> Dalam Pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan.....	106
5.1.1.2 Politik Anggaran dilihat dari perpektif Teori <i>Network Instituionalism</i> Dalam Pemanfatan Dana Ketahanan Pangan	160
5.1.1.3 Perbandingan Hasil Pembahasan <i>Rational Choice Instituionalism</i> dengan Hasil Pembahasan <i>Network Instituionalism</i>	181
5.2 Pembahasan.....	191
5.2.1 Pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan Desa Wonosari.....	191
5.2.1.1 Tujuan Prioritas Dana Ketahanan Pangan Desa	191
5.2.1.2 Pengelolaan dan Implemantasi Dana Ketahanan Pangan Desa	222

5.2.2 Kebijakan Pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan Desa	224
5.2.2.1 Aspek yang mempengaruhi Pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan Desa	224
5.2.2.2 Model Pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan Desa	233
5.2.3 Temuan Penelitian	264
5.2.3.1 Temuan Penelitian Politik Anggaran Pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan Desa.....	264
5.2.3.2 Proposisi.....	268
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	269
6. 1 Kesimpulan	269
6. 2 Saran	273

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Informan Kunci (Primer)	63
2. Tabel 3.2 Informan Pendukung.....	64
3. Tabel 3.3 Informan Pendukung (Data Skunder)	66
4. Tabel 3.4 Analisis Stakeholder Power-Interest Matrix.....	69
5. Tabel 4.1 Data Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2023.....	74
6. Tabel 4.2 Data Pertanian Kabupaten Mesuji 2021-2022.....	77
7. Tabel 4.3 Luas Sawah diKabupaten Mesuji Tahun 2023	78
8. Tabel 4.4 Data Produksi Padi Kabupaten Mesuji 2022	78
9. Tabel 4.5 Data Desa di Kecamatan Mesuji Timur.....	82
10. Tabel 4.6 Data Dusun/Rukun di Desa Wonosari	85
11. Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Kecamatan Mesuji Timur Tahun 2023.....	88
12. Tabel 4.8 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kecamatan dan Subsektor dikabupaten Mesuji 2023	97
13. Tabel 4.9. Alokasi Dasar TA 2024 sebesar Rp44,85 T dengan dibagikan secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan kluster jumlah Penduduk.....	99
14. Tabel 4.10 Status Desa Kategori tertinggal dan Sangat tertinggal 2023-2024.....	99
15. Tabel 4.11. Indek Desa Membangun 2023-2024.....	100
16. Tabel 5.1 Pernyataan Aktor-aktor dalam Unsur Lembaga	113
17. Tabel 5.2 Pernyataan Aktor Dalam Unsur Perilaku.....	119
18. Tabel 5.3 Pernyataan Aktor dalam Unsur Strategi	129
19. Tabel 5.4 Pernyataan Aktor dalam Unsur Sekuen/Pilihah.....	137
20. Tabel 5.5 Pernyataan Aktor dalam Unsur informasi	142
21. Tabel 5.6 Penyataan Aktor dalam Unsur sebab akibat	149
22. Tabel 5.7 Pernyataan Aktor dalam Unsur Prefelensi.....	155
23. Tabel 5.8 Pernyataan Aktor dalam Unsur Hasil	159
24. Tabel 5.9 Pernyataan Aktor dalam Unsur <i>Policy Network</i>	167
25. Tabel 5.10 Pernyataan Aktor dalam Unsur <i>organization</i>	171
26. Tabel 5.11 Pernyataan Aktor dalam Unsur <i>Market</i>	175
27. Tabel 5.12 Pernyataan Aktor dalam Unsur <i>political mobilization and social movement</i>	178

28. Tabel 5.13 Pernyataan Aktor dalam <i>influence, social psychology and political culture</i>	180
29. Tabel 5.14 Matrik perbandingan Hasil Penelitian <i>Teori Rational Choice Institutionalism dan Hasil Penelitian Teori Network Institutionalism</i> ..	183
30. Tabel 5.15 Identifikasi Aktor Lembaga dan Perannya dalam Fungsi Kepentingan.	204
31. Tabel 5.16 Deskripsi Data Identifikasi Stakholder dan Perannya dalam (<i>Command, Money, Information, Advice</i>).....	244
32. Tabel 5.17 Hubungan Antar Stakeholder berdasarkan Aspek	246
33. Tabel 5.18 Klasifikasi Aktor Berdasarkan Klasifikasi Primer, Sekunder dan Kunci	253

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Indeks Ketahanan Pangan Global (GFSI) Indonesia	2
2. Gambar 1.2 Indeks Ketahanan Pangan Terbaik Nasional 2023	2
3. Gambar 1.3 Propinsi Sentra Produksi Padi di Indonesia	4
4. Gambar 2.1 Konsep Ketahanan Pangan.....	35
5. Gambar 2.2 Porsi Perhitungan Dana Desa.....	43
6. Gambar 2.3 Kerangka Berfikir	52
7. Gambar 3.1 Interaktif Miles dan Huberman	69
8. Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Mesuji.....	74
9. Gambar 4.2 Produksi Padi di Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota (Ton-GKG), 2021 dan 2022*	76
10. Gambar 4.3 Peta Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur	84
11. Gambar 4.4 Jalan Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur	92
12. Gambar 4.5 Konsisi Saluran Air Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur	93
13. Gambar 4.6 Banjir di Sawah Warga Desa Wonosari.....	93
14. Gambar 4.7 RMP Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur.....	94
15. Gambar 4.8 Grafik Dana Desa, Desa Wonosari 2021-2023	102
16. Gambar 4.9 Hubungan Antar Stakeholder.....	248
17. Gambar 4.10 Kategorisasi Aktor Berdasarkan Pengaruh dan Potensi Kerjasama	256
18. Gambar 4.11 Klasifikasi Stakeholder Utama, Pendukung, Kunci.....	257

DAFTAR SINGKATAN

GFSI	: Global Food Safety Initiative
KUT	: Kredit Usaha Tani
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
AUTJ	: Asuransi Usaha Tani Jagung
AUTP	: Asuransi Usaha Tani Padi
KET	: Kawasan Ekspor Terpadu
KPBU	: Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Swasta
KPBU	: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
HGU	: Hak Guna usaha
RMP	: <i>Rice Milling Plant</i>
BUM	: Desa Usaha Bersama
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Desa
RKPDes	: Rencana Kerja Pembangunan Desa
ADD	: Anggaran Dana Desa
DD	: Dana Desa
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
RCI	: <i>Rational Choice Institutionalism</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
B2SA	: Beragam Bergizi Seimbang dan Aman
IKP	: Indeks Ketahanan Pangan
PHBS	: Pola Hidup Bersih Dan Sehat
UTP	: Usaha Pertanian Perorangan
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
KUPT	: Kepala Unit Pelaksana Teknis
SID	: Sistem Informasi Desa
SSGI	: Studi Status Gizi Indonesi

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah pangan, yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. Di Indonesia ketahanan pangan dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1), dan pemenuhan pangan yang cukup serta bergizi adalah bagian dari upaya negara untuk melindungi warganya. Tantangan global terkait pangan semakin besar, terutama dengan adanya perubahan iklim yang mengancam hasil pertanian dan sumber daya alam lainnya, serta tren pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Indonesia, sebagai negara dengan lebih dari 270 juta penduduk, harus menghadapi masalah ini dengan serius. Salah satu dampaknya adalah berkurangnya produksi pangan akibat perubahan iklim, seperti cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, dan pergeseran pola tanam yang dapat memengaruhi hasil pertanian.

Berdasarkan laporan *Economist Impact 2022*, skor Indeks Ketahanan Pangan Global Indonesia (*Global Food Security Index/GFSI*) adalah 60,2 poin, meningkat 1,7% dibandingkan 59,2 poin pada tahun 2021. Seiring dengan peningkatan skor indeks ketahanan pangan Indonesia, masuk dalam kategori sedang (skor 55-69,9 poin). Sedangkan Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 113 negara di dunia (Agrofarm, 2023). Meskipun berada pada kategori sedang dan tumbuh, namun ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2022 masih rendah dibandingkan rata-rata global dengan skor indeks sebesar 62,2 poin, dan kawasan Asia-Pasifik masih berada di bawah rata-rata dengan skor indeks sebesar 63,4 poin. Dibandingkan Indeks Ketahanan Pangan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), Indonesia menempati peringkat keempat. Indeks ketahanan pangan ASEAN tertinggi berada di Singapura sebesar 73,1 poin, diikuti oleh Malaysia 69,9 poin dan Vietnam 67,9 Poin (Ahdiat, 2023).

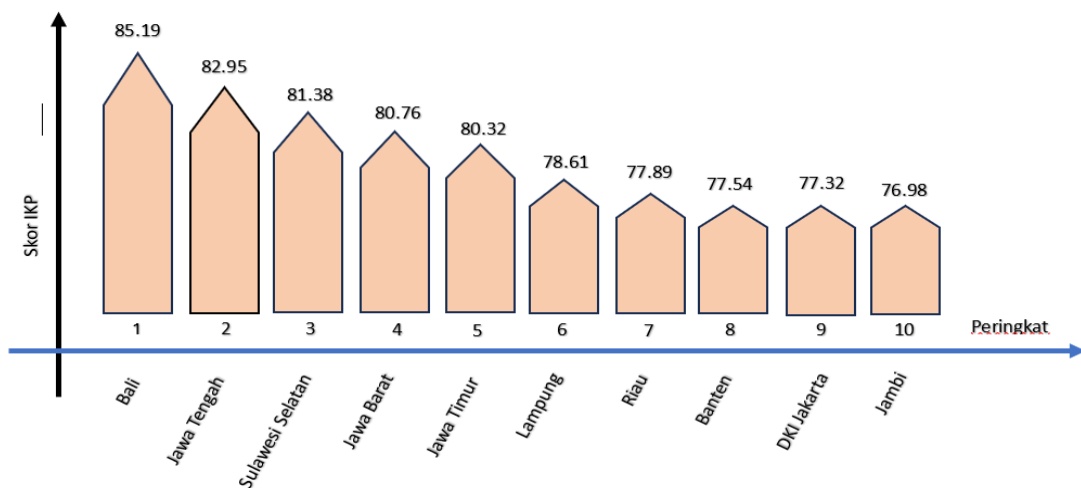
Empat indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ketahanan pangan GFSI 2022, yakni keterjangkauan harga pangan (*affordability*), ketersediaan pasokan (*availability*), kualitas nutrisi (*quality and safety*), serta keberlanjutan dan adaptasi (*sustainability and adaptation*). Pada indikator keterjangkauan harga pangan negara Singapura menjadi negara terbaik ke-2 secara global, namun untuk indikator keberlanjutan dan adaptasi Singapura poinnya 44,3. Skor tersebut lebih rendah dibandingkan Indonesia dengan skor keberlanjutan dan adaptasinya 46,3 poin.

Gambar 1.1 Indeks Ketahanan Pangan Global (GFSI) Indonesia



Indeks Ketahanan Pangan GFSI menilai indikator keberlanjutan dan adaptasi. Indonesia dan Singapura sama-sama menerima nilai rendah untuk kebijakan adaptasi perubahan iklim, pemeliharaan lingkungan dan manajemen bencana yang mempengaruhi ketahanan pasokan pangan, dan dianggap berkinerja buruk dalam pendanaan mitigasi perubahan iklim. (Ahdiat, 2023). Menurut Direktur Metrologi Sri Astuti, mengatakan tantangan peningkatan ketahanan pangan adalah pertumbuhan jumlah penduduk. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat maka kebutuhan pangan juga akan meningkat. Hal ini memerlukan peningkatan produksi pangan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Selain pertumbuhan penduduk, perubahan pola iklim juga menjadi tantangan bagi Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan nasional.

Gambar 1.2 Indeks Ketahanan Pangan Terbaik Nasional 2023



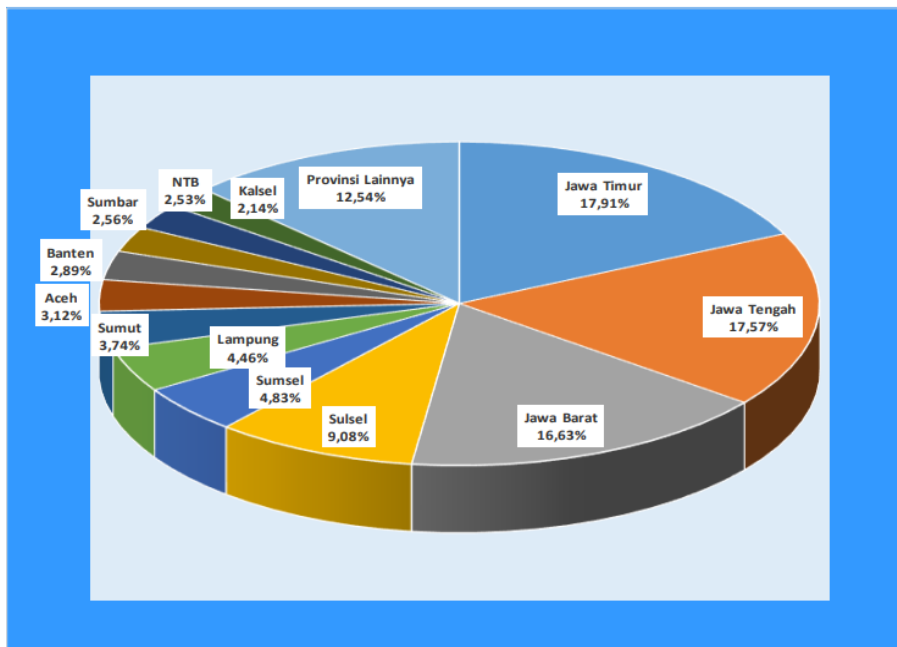
Sumber : Kemenkeu, 2023.

Peningkatan skor indeks ketahanan pangan secara global tersebut tentunya tidak luput dari peningkatan indeks ketahanan pangan secara nasional. Pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa skala nasional Indeks Ketahanan Pangan terbaik Provinsi Bali dengan skor 85,19 poin kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dengan skor 82,95 poin, Provinsi Sulawesi Selatan dengan skor 81,38 poin, Provinsi Jawa Barat dengan skor 80,76 poin, Provinsi Jawa Timur skor 80,32 poin dan Provinsi Lampung berada di peringkat ke 6 skor 78,61 poin.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi sebagai penyumbang pangan terbesar nasional khususnya pada produksi padi. Provinsi Lampung memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan dalam hal ketahanan pangan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Dalam hal keunggulan yang dimiliki oleh Provinsi Lampung yaitu: (1) Memiliki kekayaan alam yang berlimpah mulai dari hasil laut sampai dengan pertanian, Lampung penghasil komoditas pertanian strategis merupakan salah satu daerah yang menjadi pendukung ketahanan pangan nasional, seperti gula, beras, kopi, pisang, nanas, jagung, coklat dan udang. (2) Memiliki luas baku sawah yang cukup besar dan terus meningkat, serta produktivitas yang tinggi. Lampung berada di urutan keenam dalam skala nasional untuk produksi padi. (3) Daerah yang mendapat dukungan pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur pendukung, seperti bendungan, irigasi, dan alat mesin pertanian. Lampung juga mendapat program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, seperti Kartu Petani Berjaya, pengembangan kedelai, dan pekarangan pangan lestari.

Dibalik kelebihan tersebut, terdapat beberapa kekurangan yang dimiliki oleh Provinsi Lampung yaitu: (1) Lampung masih menghadapi masalah ketersediaan pangan yang utamanya bermasalah di sisi suplai. Lampung masih bergantung pada impor untuk beberapa komoditas, seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai. (2) Lampung juga menghadapi masalah keterjangkauan pangan yang melingkupi distribusi, cadangan, dan harga yang murah. Lampung masih mengalami fluktuasi harga dan pasokan pangan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti cuaca, hama, dan permintaan pasar. (3) Lampung perlu meningkatkan kualitas dan keamanan pangan, terutama dalam hal pengolahan, penyimpanan dan pengawasan. Lampung juga perlu mengembangkan produk turunan yang memiliki nilai tambah dan daya saing, serta memanfaatkan potensi koperasi sebagai wadah pemasaran (dinastph, 2023). Dalam aspek ketersediaan pangan khususnya dalam sumbangan produksi padi, Provinsi Lampung memberikan sumbangan sebesar 4,46% untuk ketahanan pangan nasional. Dapat dilihat pada gambar 1.3.

Gambar 1.3 Provinsi Sentra Produksi Padi di Indonesia



Sumber : Analisis Ketahanan Pangan, 2023.

Guna meningkatkan indeks ketahanan pangan Provinsi Lampung melakukan upaya mitigasi, antara lain, 1). Fokus pada komoditas strategis, seperti padi, gula, jagung, kopi, beras, coklat, pisang, nanas dan udang. 2). Menetapkan regulasi yang mendukung, seperti Peraturan Gubernur tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. 3). Membangun infrastruktur pendukung, seperti bendungan, irigasi, dan alat mesin pertanian. 4). Mekanisasi, agro-input, pasca panen dan pengolahan, seperti pengembangan sentra benih padi, Kartu Petani Berjaya, pengembangan kawasan cabai dan bawang merah, serta perbaikan sarana dan prasarana. 5). Mendorong investasi dan pembiayaan bank, seperti Kredit Usaha Tani (KUT) dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). 6). Memberikan asuransi usaha tani, seperti program Asuransi Usaha Tani Jagung (AUTJ) dan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). 7). Mengatur tata niaga dan stabilisasi harga, seperti program Penguatan Cadangan dan Sistem Logistik Pangan, Sistem Penguatan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan, dan mengembangkan Usaha Pangan Masyarakat. 8). Mengendalikan impor dan mendorong ekspor, seperti program Pengembangan Kawasan Ekspor Terpadu (KET) dan Peningkatan Daya Saing Produk Ekspor. 9). Memperhatikan sinergitas Kementerian atau Lembaga, lintas pelaku baik pusat maupun daerah, seperti program Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Swasta (KPBU) dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) (dinastph, 2023).

Upaya untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, maka seluruh Kabupaten berupaya melakukan perbaikan dan berusaha untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan di masing-masing kabupatennya. Indeks Ketahanan Pangan terbaik diterima oleh Kabupaten Pringsewu, Pesawaran dan Lampung Selatan. Sedangkan Kabupaten Mesuji mendapatkan peringkat 11 dengan skor 66,63 poin lebih tinggi dibandingkan Pesisir Barat dan Tulang Bawang Barat. Namun, lebih rendah dibandingkan dengan Tulang Bawang dan Way Kanan. Mesuji menempati peringkat ke-253 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mesuji memiliki ketahanan pangan yang moderat, namun masih perlu meningkatkan kualitas dan keamanan pangan. (BPS, 2023).

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya IKP Kabupaten Mesuji Berdasarkan data (BPS, 2023) adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Mesuji memiliki luas lahan pertanian yang terbatas, hanya sekitar 9,5% dari total luas wilayah. Selain itu, sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Mesuji berstatus hak guna usaha (HGU) perkebunan, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh petani lokal.
2. Kabupaten Mesuji masih mengalami kesulitan dalam hal infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan, dan sarana pasca panen. Hal ini menyebabkan rendahnya produktivitas dan kualitas hasil pertanian, serta tingginya biaya transportasi dan distribusi.
3. Kabupaten Mesuji juga menghadapi masalah sosial, seperti konflik agraria, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Hal ini berdampak pada rendahnya akses pangan terhadap masyarakat yang cukup, bergizi dan aman.
4. Kabupaten Mesuji belum memiliki kebijakan dan program yang konsisten dan terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini menyebabkan kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam mengelola sumber daya pangan (Indeks Ketahanan Pangan, 2021).

Permasalahan ketahanan pangan yang dialami kabupaten Mesuji, merata terjadi hampir di seluruh wilayah desa, hal ini disebabkan oleh sikap dari petani dan masyarakat desa. Saat ini hasil dari penanaman padi di Kabupaten Mesuji dapat dikategorikan sebagai penghasil padi terbesar 4 (empat) di provinsi Lampung. Namun hasil panen tersebut tidak lantas membuat Kabupaten Mesuji mampu mencukupi kebutuhan wilayahnya. Walaupun termasuk dalam Kabupaten penghasil padi terbesar namun masyarakat khususnya petani di

Kabupaten Mesuji harus membeli beras dari daerah di luar Kabupaten Mesuji untuk mencukupi permintaan masyarakat. Hal ini tentunya tidak lepas dari sikap petani dan masyarakat di kabupaten Mesuji yang lebih memilih untuk menjual hasil panen dalam bentuk gabah dibandingkan dengan mengelolanya langsung. Keterbatasan tersebut menjadikan sebuah permasalahan yang cukup kompleks karena kondisi lingkungan di Kabupaten Mesuji, biaya pengelolaan pasca panen yang cenderung lebih mahal dan harga jual beras yang murah yang menyebabkan petani enggan untuk menjual dalam bentuk beras.

Permasalahan pengelolaan padi pasca panen tersebut seperti lingkungan dan iklim yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengeringan padi secara manual, hal ini tentunya menjadi persoalan yang penting jika petani ingin menjual hasil panen dalam bentuk beras maka harus mengeluarkan dana untuk mengeringkan padi, selain itu biaya penggilingan yang cenderung lebih mahal. Sehingga para petani berasumsi bahwa menjual hasil panen dalam bentuk gabah lebih menguntungkan dibandingkan dengan harus menjual dalam bentuk beras. Meskipun kabupaten Mesuji memiliki RMP (*Rice Milling Plant*) yang berada di Desa Wonosari yang dimaksudkan untuk menjadikan kabupaten Mesuji sebagai lumbung padi di Provinsi Lampung namun pada realitanya kehadiran RMP tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap persediaan beras di Kabupaten Masuji. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yaitu pengelolaan RMP yang belum jelas sehingga tidak dapat beroperasi dengan maksimal, operasional lebih tinggi dibandingkan dengan mengelola beras pada pihak swasta atau pengusaha serta kondisi mesin yang sudah lama tidak operasional sehingga diperlukan merevitalisasi.

Selanjutnya yang sangat menjadi sorotan adalah belum adanya bumdesma yang bergerak pada bidang pengelolaan padi pasca panen. Keberadaan bumdesma sangat krusial untuk mendukung pengelolaan padi pasca panen secara mandiri yang dijalankan oleh perwakilan desa sehingga dapat memberikan hasil yang optimal bagi persediaan pangan di kabupaten Mesuji. Selain itu yang membutuhkan perhatian yang mendasar dari pemerintah adalah permasalahan banjir yang dialami sebagian besar desa di Kabupaten Mesuji, terjadinya banjir pada masa penghujan serta air asam saat kemarau hal tersebut membuat petani mengalami gagal tanam. Kondisi yang masih apa adanya dan belum adanya perbaikan struktur lahan mengakibatkan banjir yang mencapai lebih dari 1 meter. Salah satu upaya tersebut dapat memanfaatkan dari alokasi dana desa guna pelaksanaan ketahanan pangan desa.

Berdasarkan hasil pengamatan pra-observasi yang dilakukan, permasalahan ketahanan pangan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya petani di desa Wonosari yaitu permasalahan banjir dilahan pertanian yang mengakibatkan para petani mengalami gagal tanam bibit padi hingga 3 (tiga) kali, kondisi banjir diperparah dengan belum adanya saluran drainase serta tata kelola lahan yang belum dilakukan. Kondisi atau struktur tanah yang merupakan lahan gambut dengan pH asam yang tinggi menyebabkan masyarakat tidak dapat memiliki perkebunan untuk menanam sayuran maupun obat-obatan. Masyarakat berupaya melakukan budidaya sayuran seperti cabai, terong dan jahe merah namun akhirnya tanaman tersebut tidak dapat hidup. Selain itu, permasalahan pengelolaan padi pasca panen tidak dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri karena para petani tidak dapat mengeringkan gabah secara mandiri. Sehingga para petani cenderung lebih senang menjual hasil panen dalam bentuk gabah. Permasalahan tersebut perlu untuk menjadi perhatian dari berbagai pihak terkait guna mewujudkan penguatan ketahanan pangan di desa Wonosari.

Permasalahan yang dihadapi Desa Wonosari terkait ketahanan pangan dapat berimplikasi besar terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut, permasalahan krusial lainnya seperti kurangnya dukungan teknis, ketidakcukupan anggaran atau kebijakan yang tidak sesuai dapat memperburuk kondisi pertanian dan ketahanan pangan. Infrastruktur pertanian yang tidak diperhatikan mengakibatkan kerugian finansial bagi petani dan menurunnya produktivitas pangan.

Ketahanan pangan bukanlah program yang berdiri sendiri, namun suatu program bersama seluruh stakeholder untuk mewujudkannya baik dari kementerian desa, kementerian pertanian maupun dari kementerian lainnya. Kolaborasi antar stakeholder sangat penting untuk mewujudkan ketahanan pangan, melalui kementerian desa menggulirkan kebijakan dana desa untuk ketahanan pangan. Alokasi dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani yang diatur dalam UU 28 Tahun 2023 tentang APBN memerlukan perhatian khusus agar dapat dimanfaatkan dengan efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat desa. bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani minimal 20%. Angka yang cukup besar dan penggunaannya membutuhkan perencanaan yang cukup matang. Merupakan tantangan tersendiri bagi Desa dalam menghadapi pelaksanaan program tersebut. Sehingga dibutuhkan kerjasama dengan

lembaga pemerintah, NGO, dan sektor swasta yang memiliki pengalaman dan sumber daya untuk mendukung program ketahanan pangan dan hewani.

Desa adalah suatu organisasi lokal yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (*selfgoverning community*) dan pemerintahan lokal yang mandiri atau otonom (*local selfgovernment*). *Monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaan pada pembangunan desa sangat penting untuk dilakukan, agar penentuan pembangunan di desa mengacu pada regulasi yang telah dibuat. Dana desa dapat dimanfaatkan serta menghasilkan peran yang positif sebagai penggerak roda ekonomi pembangunan desa, apabila penggunaannya dikelola dengan baik, transparan, akuntabel dan optimal dengan pola swakelola serta mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan pengawasan yang melekat.

Dana desa memberikan porsi dukungan yang besar guna mencapai tujuan ketahanan pangan Latifah & Aziz, p. (2016a, p. 194). Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk membiayai pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan desa. Fungsi alokasi dana desa adalah guna mendukung program prioritas nasional dan mitigasi, pemulihan ekonomi nasional dan penanganan bencana alam maupun non-alam. Ketahanan pangan desa adalah kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh warga desa secara mandiri, kolaboratif, dan berkelanjutan. Ketahanan pangan desa juga berkaitan dengan upaya penanggulangan stunting, yaitu kondisi pertumbuhan anak yang terhambat akibat kurangnya asupan gizi (BPS, 2023).

Penyelenggaraan dana desa membantu meningkatkan aksesibilitas masyarakat desa dan derajat partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Sofianto 2017: 23-32). Pemerintahan desa bersifat elitis dan tidak inklusif dalam mengidentifikasi proyek spin-off karena Musdes tidak menjadi ajang penyerapan aspirasi masyarakat. Para pemimpin desa juga belum begitu memahami urgensi dan tujuan dari beberapa proyek yang telah disetujui. Aktor inti dalam pengembangan rencana adalah kepala desa, pemimpin perencanaan dan PKK, kelompok elit yang bertanggung jawab untuk memberikan nilai-nilai dan membentuk opini masyarakat tentang rencana ketahanan pangan (Khairunnisa dan Rahmatunnisa, 2022) Selanjutnya, Latifah dan Aziz melakukan Penelitian. (2016), b) Pelaksanaan pembangunan modal desa masih dinilai belum efisien karena belum memadainya kapasitas dan

kemampuan pemerintah desa serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan modal desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dan Khoirunurrofik, (2022, p. 496) menunjukkan bahwa elit pedesaan merupakan partisipan penting dalam transformasi pembangunan pedesaan. Oleh karena itu, subyek pembangunan desa harus memperkuat hubungan eksternal, meningkatkan modal sosial, dan memperkuat hubungan dengan subyek utama pelaksana pembangunan. Desa mempunyai wilayah yang dapat dikelola dengan baik sebagai sumber pendapatan ekonomi, perlindungan dan kedaulatan (A. Halim & Adianto, 2021, p. 90). Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Pemukiman Kembali (Kemendes PDTT, 2018) menyatakan bahwa dana desa tidak hanya menjadi sumber dana pembangunan desa, namun juga menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi desa. Jika banyak infrastruktur yang dibangun, otomatis akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena dana desa dapat dimanfaatkan masyarakat desa untuk membuka peluang usaha melalui badan usaha desa (BUMDes).

Berdasarkan penelitian terkait dana desa, efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2016 hingga 2019 termasuk dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana tingkat desa di desa ini adalah tahun 2016 (100%), 2017 (97,80%), 2018 (99,80%), dan 2019 (100%). Kendala dalam mencapai alokasi dana di tingkat desa terletak pada pemahaman masyarakat terhadap ADD. Cara mengatasi hambatan pencapaian alokasi dana desa dapat dilakukan melalui pelatihan terkait pengelolaan alokasi dana desa (Mamuaja et al., 2021, p.250). Rencana Ketahanan Pangan Dana Desa berdampak pada perekonomian masyarakat. Rencana ketahanan pangan meningkatkan produksi masyarakat desa dan ketersediaan pangan di lumbung desa, meningkatkan keterjangkauan pangan warga desa, dan meningkatkan keberagaman konsumsi pangan, keseimbangan gizi, keamanan, dan ketahanan pangan. kebersihan, kualitas tinggi, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal (Akmal,2023,p.23).

Kebijakan ketahanan pangan tidak hanya untuk menciptakan kecukupan pangan dan pembangunan ekonomi pedesaan, akan tetapi kecukupan pangan bagi masyarakat miskin, menciptakan cadangan pangan Masyarakat dan lumbung desa penting untuk ditingkatkan (Purwaningsih, 2008, p. 2). Implementasi pembangunan dengan menggunakan dana desa

dirasakan belum cukup efektif karena kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa yang belum memadai dan peran serta masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan dana desa (Latifah & Aziz, 2016a, p. 195).

Kemandirian pengelolaan pemerintahan dan perencanaan pembangunan di tingkat desa menimbulkan urgensi pengelolaan keuangan di tingkat desa. Pada hakekatnya terdapat dana desa yang besar dari pemerintah pusat untuk mendanai pengelolaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan kemasyarakatan. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus mampu menyusun laporan keuangan dan memastikan pembukuan yang jelas. Penelitian Hanifa menunjukkan kinerja pemerintah desa akan meningkat jika pelaporan keuangan dipertanggungjawabkan dengan baik. (Runtunuwu et al., 2021, p.14).

Pada proses perencanaan, sebagian besar desa belum mempunyai sistem informasi desa yang memadai, sehingga banyak data yang tidak sesuai dengan fakta yang melihat kondisi sosial dan ekonomi desa tentang data kerawanan desa. Data kerawanan desa sangat dibutuhkan untuk merumuskan dokumen RPJMDes dan RKPDes serta menjawab permasalahan sosial ekonomi yang terjadi di desa. RPJMDes dan RKPDes dibuat bukan hanya sekedar untuk kepentingan penyerapan dana desa. Pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan perlu dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat pedesaan mempunyai kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan desa secara mandiri dan berkelanjutan. Dana Desa diharapkan mampu menunjang kegiatan mulai dari produksi, penyediaan lahan dan prasarana pendukung, pengolahan dan pemasaran (kemenkopmk, 2022).

Dengan adanya regulasi yang mengatur desa dan diikuti dengan kucuran dana transfer dari pemerintah pusat tidak serta merta wajah desa semakin baik justru sebaliknya beberapa desa dalam pengelolaan dan penggunaannya masih banyak yang tidak tepat sasaran dalam pemanfaatannya, Kondisi tersebut tentu sangat ironi, secara finansial dukungan anggaran cukup besar namun pemanfaatannya tidak sesuai dengan dokumen perencanaan, ketidaktepatan berdampak pada sasaran, output, target dan kebutuhan besaran anggaran tidak sesuai, pertanggungjawaban dana desa hanya sebatas kewajiban administrasi, Bentuk ketidakpahaman pengelolaan Dana Desa juga menjadi penghambat dalam mewujudkan wajah desa yang lebih baik. Desa selama ini hanya fokus membangun tanpa memikirkan

apa yang diinginkan oleh masyarakatnya serta melihat pada kondisi kearifan lokal di wilayahnya. Banyak kepala desa yang pada akhirnya berpikir mudah untuk menghabiskan dana desa hanya untuk pembangunan tanpa memberdayakan masyarakat, serta tidak melibatkan struktur pemerintahan yang ada

Dalam konteks perencanaan dan pemanfaatan sumber daya maupun keuangan di tingkat desa, kepala desa memang memiliki tanggung jawab penting. Proses koordinasi yang dilakukan oleh kepala desa dengan pimpinan tertinggi atau pihak berwenang di tingkat yang lebih tinggi sering kali dilakukan namun tidak melibatkan instansi pembina atau pengarah. kepala desa melakukan koordinasi dengan pimpinan tertinggi atau pejabat terkait lainnya secara langsung tujuan dari koordinasi ini adalah untuk memastikan bahwa rencana yang diajukan sesuai dengan kebijakan atau kepetingan politik jangka pendek dan mendapatkan dukungan serta persetujuan seperti halnya pemilihan periode berikutnya.

Hal tersebut merupakan bagian dari politik jangka pendek yang merujuk pada kebijakan atau keputusan yang diambil dengan fokus pada hasil atau manfaat yang dapat dicapai dalam waktu dekat atau segera, tindakan yang dirancang untuk mendapatkan keuntungan politik cepat dengan menaikkan popularitas atau meraih dukungan pemilih dalam waktu singkat, tanpa selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang. Disadari atau tidak bahwa lemahnya keberdayaan masyarakat desa dampak dari *maladministrasi*, terlihat dari pendekatan pembangunan *top down* tindakan yang membatasi kebebasan seseorang (*Paternalistik*), pengaturan kewenangan (*Sentralistik*), dan prosedur dan aturan baku (*Mekanistik*). Masyarakat ditempatkan sebagai objek harus mengikuti apa yang telah rencanakan oleh program pembangunan, walaupun tidak relevan dengan potensi dan kebutuhan Masyarakat.

Pada alokasi pemanfaatan dana ketahanan pangan di beberapa desa, alokasi pemanfaatan dana ketahanan pangan yang seharusnya dialokasikan pada program ketahanan pangan desa antara lain untuk pengembangan usaha pertanian, termasuk perkebunan, perhutanan, peternakan dan perikanan, pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa, pengolahan pasca panen, untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, pengembangan pertanian keluarga dan pekarangan Pangan Lestari, seperti hidroponik atau bioponik, pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian dan perikanan serta penguatan atau penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau BUMDes

bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan hewani. Namun, anggaran 20% dari dana desa guna ketahanan pangan desa, di beberapa desa justru di gunakan untuk melakukan pembangunan jalan hal ini sejalan dengan hasil penelitian Pradana (2024) menyatakan tren korupsi pengelolaan keuangan desa di Provinsi Lampung terus mengalami kenaikan, dalam rentang 2017 sd 2022 telah terjadi 50 perkara korupsi dengan 62 terdakwa. Masih Menurut Pradana (2024) kejadian korupsi juga tersebar hampir merata di seluruh kabupaten di Provinsi Lampung. Selama tahun 2017-2022, korupsi pengelolaan telah terjadi pada 12 dari 13 kabupaten yang memiliki wilayah administratif tingkat desa di Provinsi Lampung. Tentunya hal ini menjadi polemik bagi ketahanan pangan desa, sehingga menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam melakukan upaya pengembangan pemanfaatan dana ketahanan pangan.

Penelitian ini penting dilakukan karena dengan adanya data dan informasi yang akurat dari hasil penelitian, pemerintah desa maupun pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk pemanfaatan dana ketahanan pangan desa. Penelitian ini juga memberikan dasar yang kuat untuk alokasi dana yang lebih efektif dan efisien dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. selain itu dengan dilakukannya penelitian yang mendalam tentang bagaimana mengelola dana ketahanan pangan desa, desa bisa mengembangkan sistem pertanian yang lebih efisien dan dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Berdasarkan pada uraian di atas dalam penelitian ini, peneliti akan memecahkan permasalahan pemanfaatan dana ketahanan pangan desa, sedangkan topik dari penelitian ini yaitu anggaran 20% dana ketahanan pangan dan hewani bersumber dari dana desa. Dari berbagai literasi maupun jurnal terkait, yang menjadi kebaruan atau *novelty* dari penelitian ini adalah politik anggaran model pemanfaatan dana ketahanan pangan desa, selain itu penulis melakukan implementasi dari model yang digunakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh secara langsung sehingga mendapatkan gambaran yang empiris dari model tersebut. Dengan Politik anggaran model pemanfaatan dana ketahanan pangan, diharapkan model ini akan bermanfaat bagi kepala desa pengguna dana desa untuk mengalokasikan secara tepat dalam mewujudkan ketahanan pangan, model pemanfaatan ketahanan pangan ini nantinya akan menjadi kebijakan bagi pemerintah desa maupun pemerintah daerah untuk melaksanakannya

Beberapa hal yang terkait dengan para pihak atau aktor yang terlibat dalam model pemanfaatan dana ketahanan pangan, diketahui bahwa komunikasi antar para aktor belum terjalin dengan baik serta sistem birokrasi yang dilakukan oleh kepala desa dalam penyusunan alokasi anggaran dana desa khususnya 20% untuk ketahanan pangan dilakukan langsung oleh kepala desa tanpa melakukan koordinasi. Dalam penyusunan alokasi anggaran tersebut, pihak terkait tidak ikut dilibatkan dalam penyusunan alokasi ketahanan pangan. Kepala Desa mengambil peran sentral atau peran utama tanpa melibatkan pihak atau aktor lainnya. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan kebijakan mengenai pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan, dengan demikian dalam penelitian ini teori yang akan digunakan sesuai dengan permasalahan tersebut yaitu *Teori Rasional Choice Institutionalism* dan *Teori Network Institutionalism*

1.2 Rumusan Masalah

Secara umum telah dijabarkan permasalahan pada latar belakang di atas, maka secara khusus rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik anggaran dilihat dari perspektif *Teori Rasional Choise Instituonalism* dan *Teori Network Instituonalism* dalam pemanfaatan dana ketahanan pangan desa di desa Wonosari?
2. Bagaimana model pemanfaatan dana ketahanan pangan desa dilihat dari perspektif teori *Rasional Choise Instituonalism* dan *Teori Network Instituonalism* di desa Wonosari?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi politik anggaran dilihat dari perspektif *Teori Rasional Choice Institutionalism* dan *Teori Network Institutionalism* dalam pemanfaatan dana ketahanan pangan desa di desa Wonosari.
2. Menemukan model pemanfaatan dana ketahanan pangan desa dilihat dari perspektif *Teori Rasional Choice Institutionalism* dan *Teori Network Institutionalism* di Desa Wonosari.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berguna bagi semua elemen, baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1.4.1 Secara teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan menganalisa dana ketahanan pangan didesa.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan pertimbangan khusus dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa
3. Penelitian ini mempunyai kontribusi pengetahuan bagi mahasiswa jurusan studi pembangunan lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2 Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah, kemudian dapat menjadi tolak ukur untuk melaksanakan model pemanfaatan dana ketahanan pangan didesa.
2. Sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan tentang pemanfaatan dana ketahanan pangan dalam membangun desa.
3. Menjadi acuan untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa selanjutnya.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *Rational Choice Institutionalism* dan Teori *Network Institutionalism*

2.1.1 Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Institutionalism*)

2.1.1.1 Definisi Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Institutionalism*)

Meade et al., p. (1972, p. 1424) menjelaskan bahwa Teori Pilihan Rasional adalah teori ekonomi neoklasik yang diterapkan pada sektor publik yang mencoba menjembatani antara ekonomi mikro dan politik dengan melihat pada tindakan warga, politisi, dan pelayan publik sebagai analogi terhadap kepentingan pribadi dan konsumen. Jika demikian, maka kita harus melihat bagaimana Adam Smith, pengarang *The Wealth of Nation* (1776), menjelaskan bahwa “orang bertindak untuk mengejar kepentingan pribadi mereka, melalui mekanisme “*the invisible hand*” menghasilkan keuntungan kolektif yang memberi manfaat pada seluruh masyarakat”. Buchanan dan Tullock (1962) menyebutkan dua asumsi kunci teori pilihan rasional.

- 1) Individu yang rata-rata lebih tertarik untuk memaksimalkan utilitas (kegunaan). Hal ini berarti preferensi individunya akan mengarah pada pilihan-pilihan yang dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya.
- 2) Hanya individu yang membuat keputusan, bukan kolektif. Hal tersebut dikenal sebagai metodologis individualisme dan menganggap bahwa keputusan kolektif adalah agregasi dari pilihan individu.

Heckathorn dalam Smart & Ritzer (2001), memandang bahwa memilih itu sebagai tindakan yang bersifat rasional dimana pilihan tersebut sangat menekankan pada prinsip efisiensi dalam mencapai tujuan dari sebuah tindakan. Coleman (1994) memberikan gagasan mengenai teori pilihan rasional bahwa “orang-orang bertindak secara purposif menuju tujuan, dengan tujuan (dan demikian juga tindakan-tindakan) yang dibentuk oleh nilai-nilai atau preferensi”. Coleman menambahkan bahwa bagi aktor rasional yang berasal dari ekonomi, dalam memilih tindakan-tindakan tersebut seorang aktor akan lebih memaksimalkan utilitas, atau pemenuhan kepuasan kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi pada intinya konsep yang tepat mengenai pilihan rasional adalah ketika seseorang memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Hubungan antara teori pilihan rasional dengan penelitian ini, yaitu teori pilihan rasional menjelaskan bagaimana memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka atau dengan kata

lain memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir biaya. Meskipun teori ini berakar pada ilmu ekonomi, tetapi dalam perkembangannya teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada berbagai macam disiplin ilmu termasuk di dalamnya bagaimana menjelaskan sebuah pilihan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam perumusan kebijakan publik seperti pengalokasian dana desa khususnya dana ketahanan pangan desa.

2.1.1.2 Bentuk dan Unsur Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Institutionalism*)

Sudut pandang dari *Rational Choice Institutionalism* menyatakan bahwa institusi adalah sekumpulan aturan yang mengatur perilaku individu dalam organisasi dan individu tidak mempunyai kekuatan untuk merubahnya. Institusi juga merupakan ekuilibrium dalam menjalankan sesuatu. Dampak yang ditimbulkan akan menjadi tiga bentuk tentang pandangan *Rational Choice Institutionalism* terhadap peran institusi, terutama untuk proses kebijakan publik.

Ketiga bentuk tersebut adalah *principal-agent*, *game-theory*, dan *rulebased models* Peters, (2012, p. 233). Bentuk yang pertama, yaitu *principal-agent*, memandang hubungan antara pemimpin (*principal*) dan pengikut (*agent*), yang menghasilkan proses terlembaga yang melibatkan pola hubungan antara pemimpin dan pengikut di setiap organisasi. Jika dilihat dari sudut pandang negara, posisi sebagai pemimpin adalah parlemen, sedangkan posisi agent sendiri merupakan birokrasi atau administrasi publik di organisasi tersebut Puspitasari, (2019, p. 80). Bentuk kedua, adalah *game-theory* yang tidak memandang keberagaman aktor dalam ordinasi dan subordinasi, semua aktor adalah setara dan memiliki kepentingan yang sama, interaksi para aktornya berlangsung dalam proses yang panjang dan menemukan keseimbangan. Kerjasama timbal balik di antara mereka yang diakibatkan terbentuknya pola hubungan yang dipakai untuk mencapai kepentingan masing-masing aktor Puspitasari, (2019, p. 80). Kemudian bentuk yang ketiga, yaitu *rule-based* lebih tertarik terhadap institusi daripada aktor lainnya, antara aturan dan institusi dibentuk untuk mencapai keseimbangan dan stabilitas, seperti ungkapan Elinor Ostrom yang di mana aturan institusi dapat membantu mengendalikan perilaku para aktor yang menyimpang Puspitasari, (2019, p. 81).

Yang utama dari *Rational Choice Institutionalism* ialah peran intitusi dalam mengendalikan perilaku agen dan meminimalisir *uncertainty* dan *transaction cost*. Menurut *Rational Choice Institutionalism*, institusi menyediakan peluang bagi aktor dan tindakan mereka diprediksi selama institusi tidak ada perubahan yang fundamental. Rhodes et al., (2006, p. 30).

Rational Choice Institutionalism (RCI) adalah pendekatan teoritis yang memeriksa institusi sebagai sistem aturan dan insentif. Dalam analisis RCI, terdapat beberapa unsur kunci yang membentuk dasar pemahaman tentang bagaimana institusi beroperasi Shepsle, (2009, p. 30). Berikut merupakan unsur-unsur yang digunakan dalam analisis yaitu:

1. Aktor: Merujuk pada individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam proses keputusan. Aktor-aktor ini memiliki preferensi dan tujuan yang memengaruhi perilaku mereka terhadap institusi.
2. Perilaku: Ini mencakup tindakan dan interaksi antara aktor-aktor. Bagaimana aktor berperilaku dalam konteks institusi memengaruhi hasil dan perubahan institusi.
3. Strategi: Aktor-aktor memilih strategi berdasarkan preferensi dan tujuan mereka. Strategi ini melibatkan pertimbangan tentang bagaimana tindakan mereka akan memengaruhi hasil dan bagaimana mereka dapat memaksimalkan keuntungan mereka.
4. Sekuen: Merujuk pada urutan tindakan dan keputusan yang diambil oleh aktor-aktor. Urutan ini memengaruhi bagaimana institusi berubah dan bagaimana hasil terbentuk.
5. Informasi: Aktor-aktor mengumpulkan informasi tentang situasi dan pilihan mereka. Informasi ini memengaruhi strategi dan keputusan mereka.
6. Perkiraan Sebab-Akibat: Aktor-aktor memperkirakan konsekuensi dari tindakan mereka dan memengaruhi strategi serta keputusan. Unsur ini berkaitan dengan ekspektasi atau predisi aktor terhadap dampak atau konsekuensi dari setiap pilihan.
7. Preferensi: Preferensi individu atau kelompok memainkan peran penting dalam mempengaruhi tindakan dan keputusan terkait institusi, preferensi juga dapat berubah seiring dengan situasi, informasi dan pengalaman yang diperoleh oleh aktor.
8. Hasil: Hasil dari interaksi antara aktor-aktor dan institusi. Hasil ini mencakup perubahan institusi, kebijakan yang diadopsi, dan dampak lebih luas pada masyarakat Epstein, (1991, p. 252).

Pergeseran paradigmatik dalam pengelolaan pemerintah daerah di Indonesia, dari yang sentralistik otoriter di bawah Era Orde Baru ke sistem demokratis-de-sentralistik di bawah Era Reformasi, menuntut pergeseran sistem evaluasi kapasitas kelembagaan pemerintah daerah mana pun di Indonesia. Membandingkan kapasitas kelembagaan berbasis kinerja dengan menggunakan metode sepuluh kinerja antar sektor yang dikembangkan oleh peningkatan kapasitas didapat kesimpulan bahwa desentralisasi simetris perlu diganti, atau setidaknya dianggap diganti dengan desentralisasi asimetris yang lebih cocok dengan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang beragam. Darmastuti, (2013, p. 15)

2.1.2 Teori *Network Institutionalism*

2.1.2.1 Definisi Teori *Network Institutionalism*

Dalam beberapa hal, “jaringan kelembagaan” adalah sebuah *oxymoron*. Kata jaringan sering kali menyiratkan informalitas dan individualisme, sedangkan kata “dilembagakan” menyiratkan formalisme dan impersonalisme. Perspektif jaringan juga cenderung lebih fokus pada perilaku kelembagaan. Namun, wajar jika kita memahami jaringan sebagai institusi informal (walaupun dalam beberapa kasus bisa bersifat formal) Rhodes dkk., (2006, hal. 76). Dalam pengertian ini, jaringan dapat dianggap sebagai institusi yang mewakili pola interaksi atau pertukaran perilaku antar individu atau organisasinya, suatu pola yang stabil dan berulang. Hall menggambarkan pendekatan institusional yang memandang jaringan sebagai variabel mediasi penting yang mempengaruhi distribusi kekuasaan, konstruksi kepentingan dan identitas, dan dinamika interaksi Hall, (1986, hal. 20).

Tidak ada paradigma jaringan kelembagaan tunggal, dan terdapat diskusi yang tumpang tindih dalam ilmu politik, teori organisasi, administrasi publik, sosiologi, dan ekonomi. Namun menurut Emirbayer, hal. 4, ada empat prinsip atau asumsi dasar. (1997, p. 290) Di antara berbagai gambaran pendekatan jaringan institusional, yaitu: Asumsi pertama adalah perspektif relasional terhadap tindakan sosial, politik dan ekonomi. Membandingkan pendekatan relasional dan atribusi dengan penjelasan sosial. Fenomena dapat dijelaskan dari sudut pandang individu, kelompok, atau organisasi. Sebaliknya, hubungan yang ditekankan oleh pendekatan jaringan kelembagaan tidak dapat direduksi menjadi individu sebagai unit dasar penjelasannya. Asumsi dasar yang kedua adalah asumsi kompleksitas. Hubungan antar individu, kelompok, dan organisasi dinilai kompleks karena hubungan

antar individu, kelompok, dan organisasi bersifat tumpang tindih dan lintas sektoral. Kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang tidak memiliki definisi yang jelas tentu saja tidak bersatu dan seringkali saling eksklusif. Asumsi dasar ketiga dari pendekatan jaringan kelembagaan adalah bahwa jaringan yang baik merupakan sumber daya sekaligus pembatas perilaku. sebagai sumber daya. Mereka adalah saluran informasi dan bantuan yang dimobilisasi untuk mencapai kepentingan tertentu; sebagai pembatas, mereka adalah struktur dan kontrol sosial yang membatasi tindakan. Asumsi dasar keempat adalah bahwa jaringan memobilisasi informasi, kemampuan sosial, sumber daya, dan modal sosial dalam berbagai cara yang sangat berbeda. Jaringan menyediakan akses ke berbagai sumber daya, informasi dan dukungan.

Studi tentang pendekatan jaringan kelembagaan menyajikan aspek ilmu politik yang menarik, terutama karena ilmuwan politik secara historis berfokus pada pemahaman dinamika kekuasaan dan pengaruhnya melalui hubungan personal. Pendekatan ini sangat menarik karena menyediakan kerangka kerja yang sistematis. Selain itu, banyak tantangan dalam ilmu politik berkisar pada interaksi yang rumit dan hubungan kolaboratif di antara kelompok kepentingan, lembaga publik, atau negara.

Hubungan yang dimaksud dapat berupa “aliansi”, “faksi” atau “aliansi”. Dalam konteks ini, pendekatan jaringan institusional dapat digunakan untuk menjelaskan secara tepat pola hubungan politik. ketiga. Pendekatan jaringan institusional menolak dikotomi sederhana antara penjelasan individualistis dan berorientasi kelompok. Ia berpendapat bahwa perilaku individu harus dipahami dalam konteksnya, namun menolak asumsi perspektif kelompok yang terpadu, yang berguna mengingat ketegangan antara pendekatan individualistis dan berorientasi kelompok dalam ilmu politik. Arti istilah “jaringan” memberikan gambaran singkat mengenai teknik yang digunakan untuk menganalisis jaringan, sebelum berfokus pada bidang substantif dalam jaringan kelembagaan terkemuka, yaitu: a) jaringan kebijakan; b) organisasi c) pasar; gerakan sosial; e) Pengaruh sosial, psikologi sosial dan budaya politik.

Jaringan adalah sekumpulan hubungan antara individu, kelompok, atau organisasi. Hubungan, seperti persahabatan antara dua anggota Parlemen atau pertukaran kerja sama antara dua badan publik. Meskipun dua individu atau organisasi juga dapat dianggap sebagai suatu hubungan, jaringan institusional cenderung lebih fokus pada jenis hubungan

yang positif. Perspektif Durkheim menjelaskan solidaritas sosial, dan banyak studi jaringan menekankan dasar hubungan sosial dan dasar emosional dari hubungan. Namun, bukan berarti jaringan yang dimaksud harus merupakan jaringan solidaritas. Jaringan mungkin hanya merupakan mode interaksi atau koneksi. Misalnya, dua kelompok pemangku kepentingan mungkin berinteraksi dalam arena kebijakan, atau dewan direksi sebuah organisasi non-pemerintah (LSM) mungkin berbagi dewan direksi yang sama.

Hubungan-hubungan ini tidak selalu menghasilkan solidaritas sosial dan hasil yang nyata. Namun mereka berpendapat bahwa koneksi tersebut mungkin merupakan saluran informasi, ide, atau sumber daya. Saling ketergantungan menyediakan cara ketiga dalam menafsirkan jaringan. Pentingnya tawar-menawar dalam hubungan politik menjadikan metode pertukaran ini sebagai jaringan alami bagi ilmu politik. Granovetter, hal. (1973, hal. 1365) berpendapat bahwa pendekatan jaringan sosial memimpin garis antara pemahaman perilaku sosial yang terlalu tersosialisasi (ditentukan oleh norma) dan kurang tersosialisasi. Dari perspektif ini, jaringan sosial mempunyai dimensi sosial dan instrumental (pertukaran). Namun, Granovetter berpendapat bahwa aktor-aktor sosial tidak terikat oleh norma-norma sosial dan bahwa hubungan antara dua aktor merupakan unit dasar dari setiap pendekatan jaringan yang umumnya tertarik pada rangkaian hubungan yang saling terkait.

Oleh karena itu, jaringan paling sederhana sebenarnya memerlukan setidaknya tiga peserta berbeda. Sebagian besar analisis jaringan fokus pada sifat jaringan global sebagai struktur sosial tunggal (yaitu kumpulan yang saling berhubungan). Dalam menganalisis jaringan, hierarki organisasi adalah salah satu tipe jaringan yang umum. Bawahan terhubung dengan atasan, yang terhubung dengan atasan, hingga mencapai puncak piramida. Jaringan berbeda dari hierarki. Seperti yang ditunjukkan oleh Kontopoulos, p. (1993, p. 45), perbedaannya adalah bahwa hierarki dibedakan dengan “banyak-ke-satu” hubungan, dimana banyak bawahan terkait dengan hanya satu yang lebih tinggi. Sebuah jaringan sebaliknya “terjerat” pada jaringan hubungan yang ditandai dengan hubungan “banyak-ke-banyak”. Jaringan dapat dikategorikan tidak hanya berdasarkan sifat hubungannya seperti hubungan positif yang berulang yang didasarkan pada kewajiban bersama, kepercayaan, visi bersama, dan timbal balik tetapi juga berdasarkan struktur keseluruhannya. Analisis jaringan sosial menggunakan metode seperti mengidentifikasi sentralitas dan "subkelompok." Sentralitas berfungsi sebagai metrik yang berharga karena mengungkap

signifikansi atau keunggulan masing-masing peserta dalam suatu jaringan, dengan memanfaatkan data dari semua anggota. Berbagai ukuran sentralitas telah dirumuskan untuk merangkum berbagai dimensi tentang apa yang mendefinisikan peserta sentral.

2.1.2.2 Teknik dan Unsur Analisis Teori *Network Institutionalism*

Teknik analisis jaringan lainnya yaitu dengan mengidentifikasi “sub-kelompok” dalam jaringan, teknik ini sangat berguna untuk mengidentifikasi perpecahan sosial atau faksi. Analisis jaringan sosial juga membedakan antara “kohesi” dan “kesetaraan” sebagai dasar untuk sub-kelompok. Pendekatan kohesi menunjukkan bahwa sub-kelompok didasarkan pada kerapatan ikatan. Oleh karena itu, semakin besar jumlah ikatan dalam suatu kelompok, seharusnya semakin kohesif. Sebaliknya, pendekatan kesetaraan berpendapat sub kelompok akan terdiri dari aktor yang memiliki hubungan setara dengan pihak ketiga. Perbedaan antara kohesi dan kesetaraan terkait dengan serangkaian diskusi yang lebih luas dalam analisis jaringan. Perspektif kohesi menunjukkan bahwa mekanisme penting dalam jaringan beroperasi melalui hubungan langsung. Perpanjangan dari logika ini menunjukkan bahwa jika interaksi lebih sering dan intens maka hubungan akan lebih kohesif. Pada tingkat jaringan global, kemudian, jaringan yang lebih padat dianggap menjadi yang lebih kohesif. Logika meluas ke beberapa jaringan.

Analisis jaringan mengacu pada situasi di mana dua aktor terikat bersama dalam jenis yang berbeda dengan cara misalnya persahabatan, saran, atau rekan kerja. Ada dua cara yang digunakan dalam mengumpulkan data pada analisis jaringan sosial. Pertama cara egosentris, cara ini dimulai dengan mengetahui dan mewawancarai aktor vocal/ dominan (ego) di jaringan dan kemudian mengumpulkan informasi jaringan pada hubungan ego kepada orang lain (alter). Setelah itu fase berikutnya mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang hubungan antara ego dengan alter.

Masalah umum dengan data egosentris adalah bahwa hal itu sangat selektif, karena definisi jaringan hanya mencerminkan “ego”. Padahal jaringan yang lengkap menyediakan perspektif yang lebih komprehensif. Data lengkap untuk jaringan dikumpulkan dengan mengidentifikasi kelompok pelaku dan kemudian mengumpulkan informasi tentang hubungan di antara mereka. Data tersebut sulit untuk dikumpulkan karena dua alasan. Pertama, mengidentifikasi hubungan antara semua aktor dalam jaringan menciptakan volume besar data bahkan untuk sejumlah kecil pelaku. Kedua, jaringan lengkap

menghadapi masalah spesifikasi batas. Analisis jaringan umumnya memecahkan masalah dengan teknik yang berbeda untuk mengumpulkan data.

Salah satu pendekatan adalah menentukan batas pada awal atas dasar non-jaringan, kriteria misalnya batas organisasi atau unit kerja, kebijakan sektor, atau unit geografis. Dalam kasus seperti itu, seringkali berguna untuk memulai dengan yang lengkap daftar individu, kelompok, atau organisasi yang terkandung dalam batas ini. Pendekatan kedua sering digunakan ketika batas sulit untuk ditentukan. Bahkan, identifikasi yang merupakan bagian dari jaringan mungkin salah satu tujuan utama untuk mengumpulkan data Rhodes et al., (2006, p. 77). Dalam hal ini, *snowball sampling* digunakan untuk mengumpulkan data jaringan. Sama seperti data egosentris, pendekatan ini dimulai dengan mewawancarai beberapa aktor kunci dan kemudian meminta komentarnya tentang hubungan mereka. Kemudian meminta mereka menentukan yang berhubungan dengannya pada wawancara putaran pertama. Berikut merupakan unsur-unsur yang digunakan dalam analisis *Network Institutionalism* yaitu:

1. Jaringan Kebijakan / *Policy Networks*

Jaringan Kebijakan Literatur jaringan kebijakan itu sendiri muncul pada konklusi beberapa aliran penelitian. Pengembangan konsep jaringan kebijakan muncul dari sub-pemerintah. gagasan bahwa pembuatan dan penerapan kebijakan dikontrol oleh sekelompok agensi, legislator, dan kelompok minat terpilih. Hecla Rhodes et al., (2006, p. 80) menciptakan istilah “jaringan masalah” untuk mendeskripsikan lebih banyak bentuk keterkaitan daripada yang tersirat oleh istilah,, sub-pemerintah atau “Segitiga besi”. Pembuatan kebijakan dan implementasi membutuhkan koordinasi dan negosiasi yang rumit di antara banyak aktor yang berbeda. Jaringan kebijakan tumbuh pada studi kekuatan komunitas yang pada dasarnya menguji sosial struktur politik di kota-kota. Semua pendekatan ini menggabungkan dua gambar politik yang agak bertentangan organisasi dan proses: semuanya menekankan bahwa struktur dan proses politik sangat terbagi-bagi, yang terdiri dari partisipasi dari beragam aktor itu menunjukkan bahwa para aktor ini saling terkait atau interdependensi dalam domain kebijakan spesifik.

Dengan demikian, pendekatan jaringan memiliki keuntungan mewakili ide-ide dari kedua pluralis (menekankan di verentiation) dan ahli teori elit (menekankan konektivitas). Generasi selanjutnya dari penelitian jaringan kebijakan mulai memperjelas perbedaan internal ke jaringan dan mengartikulasikan mekanisme dimana mereka bekerja. Rhodes

membedakan konsep Hecho tentang jaringan isu “dari kebijakan komunitas” dalam hal stabilitas dan pembatasan jaringan. Dia juga mengartikulasikan perspektif “kekuatan-ketergantungan” yang menyediakan kerangka kerja untuk memikirkan mengapa dan bagaimana jaringan dibentuk dan bagaimana mereka beroperasi. Di sebuah tinjauan terbaru dari literatur jaringan kebijakan.

2. Organisasi / *Organizations*

Studi tentang organisasi adalah bidang lain dimana kelembagaan jaringan terwakili dengan baik. La Porte (1976) mendefinisikan kompleksitas organisasi dalam hal jumlah unit dan jumlah interkoneksi antara unit-unit ini. memberikan prekursor awal untuk institusionalisme jaringan ini. Pergeseran ke perspektif sistem terbuka, terutama dengan fokusnya yang meningkat hubungan interorganisasional, memberikan dorongan. Benson, p. (1975, p. 229) politik pendekatan ekonomi terhadap hubungan antarorganisasi mengklaim “jaringan” dari organisasi adalah unit analisis baru. Rhodes et al., p. (2006, p. 82) Satu dekade atau lebih kemudian, peningkatan kemampuan ekonomi kelembagaan yang disediakan konteks lain untuk artikulasi ide jaringan. Oliver Williamson mengajukan pasar “dan hierarki” sebagai dua cara pengorganisasian alternatif transaksi ekonomi.

Kerangka kerja menempatkan organisasi pada suatu kontinum antara kontrak (pasar) dan otoritas (hierarki). Powell Rhodes et al., p. (2006, p. 82) berpendapat bahwa “organisasi jaringan” bukanlah pasar atau pun hierarki. Dia berpendapat bahwa organisasi jaringan mencapai koordinasi melalui kepercayaan dan timbal balik daripada melalui kontrak atau otoritas. Organisasi menunjuk pada aspek struktural yang membuat mereka sulit untuk menggambarkan baik sebagai pasar atau sebagai hierarki. Nohria & Eccles (1990) dalam Rhodes et al., p. (2006, p. 82) memberikan dorongan tambahan untuk memikirkan organisasi sebagai jaringan. Fragmentasi penyampaian layanan dan kompleksitas proses implementasi menjadi perhatian utama literatur ini. Satu tema umum adalah bagaimana mencapainya koordinasi di antara berbagai lembaga publik dengan misi yang tumpang tindih dan wewenang.

3. Transaksi Hubungan Sosial/ *Markets*

Ekonomi politik dan sosiologi ekonomi juga telah menggunakan gagasan jaringan untuk mengkonseptualisasikan pasar dan dinamika pasar, dan untuk menggambarkan hubungan antara negara dan pasar. Granovetter (1973) memberikan pernyataan tentang pendekatan jaringan pasar bahwa organisasi jaringan berbeda baik dari pasar atau hierarki, Granovetter

berpendapat bahwa banyak transaksi ekonomi dibentuk oleh hubungan sosial yang dibangun di atas norma kepercayaan dan timbal balik Rhodes et al., (2006, p. 83).

4. Mobilisasi Politik dan Gerakan Sosial / *Political Mobilization and Social Movements*

Konsep jaringan juga memiliki dampak signifikan dalam studi politik mobilisasi dan gerakan sosial. Diani (1995) menggunakan pendekatan jaringan untuk menggambarkan hubungan antara organisasi lingkungan dan antara aktivis lingkungan di Milan. Dengan keanggotaan dalam organisasi protes bawah tanah di Polandia, Bernhard (2005) menjelaskan bagaimana gerakan Solidaritas yang kuat muncul untuk menantang Komunis rezim Rhodes et al., (2006, p. 84). Diani dan McAdam (2003) memberikan gambaran tentang hubungan tersebut antara gerakan sosial dan jaringan. Pekerjaan yang terkait erat dengan para ilmuwan politik telah memperhatikan jaringan internasional LSM yang dijuluki "transnasional jaringan advokasi Rhodes et al., (2006, p. 84).

5. Pengaruh Sosial, Psikologi Sosial dan Budaya Politik / *Social Influence, Social Psychology and Political Culture*

Pendekatan jaringan juga telah digunakan untuk memahami pola-pola sosial, kognisi sosial, dan budaya politik. Krackhardt (1990) konsep jaringan kognitif adalah salah satu ide yang paling menarik dalam genre ini. Dalam mempelajari komputer Wrm, Krackhardt menemukan bahwa karyawan lebih terpusat sebenarnya jejaring sosial juga lebih akurat dalam pemahaman kognitif jaringan sosial mereka (jaringan kognitif). Psikolog sosial juga menggunakan pendekatan jaringan untuk memodelkan bagaimana proses ketidakefisienan jaringan sosial bekerja. Ansell dalam Rhodes et al., p. (2006, p. 85) Friedkin (1998) memberikan pendekatan yang kuat untuk mempengaruhi pemodelan ini.

Dalam ilmu politik, proses jaringan juga dipahami sebagai suatu cara untuk memodelkan efek kontekstual secara tepat. Ilmuwan politik telah menggunakan jaringan model ini untuk menganalisis ketidakcocokan tetangga pada sikap politik terhadap kandidat (Huckfeldt & Sprague, 1987). Mempelajari kognisi dan ketidakmampuan sosial, pendekatan jaringan juga telah diterapkan untuk mempelajari budaya politik. Mohr & Duquenne (1997) tentang evolusi historis kesejahteraan sosial kategori dalam studi New York City dan (Ansel, 2012) tentang bagaimana jaringan institusional dan simbol-simbol berinteraksi untuk menghasilkan penataan kembali institusi kelas Perancis, Rhodes et al., (2006, p. 86).

2.2 Tinjauan Politik Anggaran

2.2.1 Definisi Politik Anggaran

Mengelola anggaran adalah sebuah seni untuk mencapai sebuah tujuan. Mengelola anggaran bukan hanya pekerjaan teknis akuntansi, tetapi sejatinya adalah pekerjaan yang sifatnya manajerial dan juga filosofis. Mengelola anggaran adalah sebuah pekerjaan yang sangat berkaitan dengan tata kelola (*governance*) dan pencapaian tujuan. Mengelola anggaran harus dipandu oleh tujuan apa yang hendak dicapai dan dengan cara apa ia dicapai serta bagaimana ia dicapai dan seterusnya. Semua itu diperlukan sebuah seni, sehingga hanya manusia yang memiliki jiwa seni dan kapasitas yang mumpuni yang bisa melakukannya dengan baik dan berkualitas.

Jika politik adalah sebuah seni, maka politik anggaran juga merupakan sebuah seni yang merupakan penjabaran atau tidak lanjut dari politik khususnya di bidang anggaran. Karena ia merupakan seni, maka diperlukan kemampuan ‘seniman’ untuk merumuskan dan mengelola anggaran dengan baik. Tetapi tidak berarti mereka yang disebut sebagai seniman dapat membuat produk anggaran yang baik dan berkualitas. Sungguh tidak mudah membuat produk anggaran yang berkualitas. Begitu juga tidak mudah untuk mengelola dan melaksanakan apa yang telah dianggarkan dengan baik.

Anggaran bisa menjadi alat kemakmuran dan kesejahteraan bila dirumuskan dan dikelola dengan baik. Tetapi sebaliknya ia bisa menjadi sumber bencana yang berkepanjangan jika tidak bisa dikelola dengan baik. Anggaran adalah sebuah produk kebijakan yang isi dan kualitasnya harus baik serta dapat dilaksanakan dengan baik pula. Jika isi dan kualitas kebijakan anggaran sudah baik, tetapi tidak bisa dilaksanakan dengan baik pula, maka ia seperti daftar keinginan karena tidak akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Kebijakan anggaran yang baik isinya harus bisa diimplementasikan dengan baik pula. Tolok ukurnya bukan pada output berupa tingginya serapan anggaran, tetapi pada kinerja yang harus dicermati dari hasil dan manfaat yang dirasakan oleh sasaran atau target kebijakan.

Politik yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk kebijakan anggaran adalah seni dalam mengelola kebijakan agar dana yang dibutuhkan oleh organisasi yang bernama negara atau pemerintahan itu senantiasa mendapat alokasi dana yang mencukupi sehingga peran dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Masing-

masing unit organisasi dalam negara bisa mendapatkan alokasi dana yang berbeda beda besarnya karena tugas dan fungsi yang diemban juga berbeda-beda.

Politik anggaran adalah sesuatu yang sangat penting dan menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Jangan dikira bahwa sebagai alat itu kurang penting keberadaannya, jika diperhadapkan atau diperbandingkan dengan keberadaan sebuah tujuan, seolah tanpa alat itu sebuah tujuan bisa diraih. Pemikiran yang menempatkan posisi alat sebagai sesuatu yang kurang penting dibandingkan dengan posisi tujuan adalah sesuatu pemikiran atau kesimpulan yang meloncat dan tidak logis karena untuk mencapai sebuah tujuan diperlukan sebuah sarana atau prasarana untuk mencapainya. Bahkan secara filosofis bisa dinyatakan bahwa sebuah tujuan itu hanya sebuah sebutan dari sebuah rangkaian panjang sebuah proses untuk mencapainya, dimana rangkaian panjang sebuah proses itu terdiri banyak alat atau sarana yang membuat sebuah tujuan dipersepsi sudah tercapai atau sebaliknya, Nugraha (2024).

Politik anggaran adalah penetapan kebijakan-kebijakan tentang proses anggaran yang meliputi berbagai pertanyaan, seperti bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya; bagaimana uang publik didapatkan, dikelola dan didistribusikan; siapa yang diuntungkan; dan peluang yang tersedia, baik untuk penyimpangan negatif maupun untuk meningkatkan pelayanan publik. Secara umum, politik anggaran dapat diartikan sebagai proses politik yang terjadi dalam penentuan dan pengalokasian anggaran publik (Kompas.com, 2022).

Dasar hukum dari politik anggaran adalah Pasal 23 Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal tersebut berbunyi:

- 1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- 3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

2.2.2 Tujuan Politik Anggaran

Tujuan utama dari politik anggaran adalah guna mencapai dan mengimplementasikan tujuan politik pemerintah dengan cara yang terencana dan terukur melalui pengelolaan sumber daya keuangan. Anggaran negara bukan hanya sekadar dokumen finansial, tetapi juga merupakan alat strategis yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Tujuan politik yang ingin dicapai melalui anggaran negara dapat beragam, seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan (artikelpendidikan.id, 2023).

Dalam tahapan penganggaran merupakan proses yang sangat penting, sebuah perencanaan yang telah disusun akan gagal karena anggaran tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja. Sehingga tujuan dari penganggaran harus dipahami oleh perumus kebijakan anggaran, yaitu anggaran harus berbasis kinerja dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Berbasis kinerja mempunyai pengertian bahwa anggaran yang disusun harus terukur, serta memenuhi unsur input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak) (Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Mesuji, 2011: 12).

2.2.3 Faktor-Faktor dalam Politik Anggaran

Politik anggaran tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi politik anggaran antara lain :

1. Kondisi ekonomi: Kondisi ekonomi suatu negara akan mempengaruhi alokasi sumber daya keuangan negara. Pada saat kondisi ekonomi sedang mengalami pertumbuhan, pemerintah cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk dialokasikan ke berbagai sektor.
2. Prioritas politik: Prioritas politik pemerintah juga akan mempengaruhi alokasi anggaran. Pemerintah akan cenderung mengalokasikan lebih banyak anggaran pada sektor-sektor yang dianggap penting dalam mencapai tujuannya.
3. Tekanan masyarakat: Tekanan dari masyarakat juga dapat mempengaruhi politik anggaran. Jika terdapat tuntutan yang kuat dari masyarakat terhadap suatu sektor atau program, pemerintah akan cenderung mengalokasikan anggaran lebih banyak pada sektor atau program tersebut.

2.2.4 Proses Penyusunan Anggaran

Politik anggaran dimaknai sebagai penyelidikan atas tindakan dan kewenangan. Hal ini menjadi bagian manifestasi dari distribusi kekuasaan para aktor untuk pembuatan kebijakan anggaran. Sehingga mudah untuk dipahami sebab dari tarik-menarik antara para aktor utama dalam penganggaran, tidak terlepas dari keinginan dalam upaya memperbesar pengaruh dari masing-masing aktor, sebagaimana dapat terlihat melalui terakomodasinya kepentingan actor, Hamka et al., (2022, p. 90).

Untuk memahami proses penyusunan anggaran Norton dan Elson (2002) menyatakan bahwa dibutuhkan pemahaman mengenai;

- a) Struktur formal mengenai peran dan tanggung jawab dalam proses penganggaran,
- b) Peran Vital Pemerintah ketika pengambilan keputusan, pilihan politik dan akuntabilitas sistem manajemen pengeluaran publik,
- c) Jaringan kekuasaan dan pengaruh *stakeholders* (di luar proses formal) yang mempengaruhi hasil dari proses anggaran.
- d) Insentif yang diberikan dari tindakan yang mempengaruhi politisi dan birokrasi dalam pengambilan keputusan selama proses penyusunan dan penetapan anggaran serta pelaporan.
- e) Ruang pengambilan keputusan birokrasi pada semua level serta proses penetapan anggaran.

2.2.5 Dimensi Politik Anggaran

Politik anggaran juga berkaitan dengan perebutan dari sumber daya publik dari para tokoh/aktor dan pemangku kepentingan, yang berada di dalam maupun di luar sistem politik Soeparno, (2022,p.32). Politik anggaran memiliki beberapa dimensi, antara lain:

- a. Dimensi teknis, yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran secara rasional, efisien, dan efektif.
- b. Dimensi politis, yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan pengaruh, kekuasaan, dan kepentingan berbagai pihak dalam proses anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- c. Dimensi sosial, yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan dampak dan manfaat anggaran bagi kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat.

Dimensi politik anggaran merupakan suatu konsep yang menggambarkan bagaimana proses penganggaran tidak hanya sekadar perhitungan angka-angka, namun juga melibatkan berbagai kepentingan, pengaruh, dan dinamika kekuasaan. Dengan kata lain, anggaran bukan hanya soal angka-angka belaka, tetapi juga merupakan cerminan dari perebutan pengaruh dan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Terdapat beberapa dimensi utama politik anggaran :

1. **Negosiasi dan Tawar-Menawar:** Proses penganggaran melibatkan negosiasi yang intens antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Setiap kelompok akan berusaha memaksimalkan alokasi anggaran untuk kepentingan mereka masing-masing.
2. **Pembentukan Koalisi:** Untuk mencapai tujuannya, berbagai kelompok sering kali membentuk koalisi. Koalisi ini akan saling mendukung dalam upaya mempengaruhi keputusan anggaran.
3. **Pengaruh Kelompok Kepentingan:** Kelompok kepentingan seperti partai politik, pengusaha, serikat pekerja, dan LSM memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses penganggaran. Mereka akan melobi anggota legislatif atau pejabat pemerintah untuk mendukung program-program yang mereka usulkan.
4. **Peran Birokrasi:** Birokrasi pemerintah juga memiliki peran penting dalam proses penganggaran. Birokrasi memiliki pengetahuan dan informasi yang mendalam tentang kebutuhan anggaran berbagai sektor, sehingga mereka dapat mempengaruhi keputusan anggaran.
5. **Opini Publik:** Opini publik juga dapat mempengaruhi proses penganggaran. Pemerintah seringkali mempertimbangkan pendapat masyarakat dalam menentukan prioritas anggaran, terutama menjelang pemilihan umum

Secara keseluruhan, dimensi politik anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan keseimbangan antara kepentingan politik dan kepentingan publik. Dimensi politik anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien, efektif, dan berkeadilan.

2.2.6 Politik Anggaran Pemerintah Desa yang Baik

Politik anggaran desa merujuk pada proses pengalokasian, pengelolaan, dan penggunaan dana desa dalam kerangka kebijakan pembangunan desa. Berdasarkan pendapat dari Abubakar, (2023,p.1) beberapa aspek yang terkait dengan politik anggaran desa:

1. **Perencanaan Anggaran:** Politik anggaran desa dimulai dengan perencanaan anggaran yang komprehensif. Ini melibatkan penyusunan rencana pembangunan desa, identifikasi prioritas pembangunan, dan penetapan alokasi dana desa untuk setiap kegiatan dan sektor pembangunan. Perencanaan anggaran desa harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa untuk memastikan representasi kepentingan mereka.
2. **Alokasi Anggaran:** Alokasi anggaran desa harus dilakukan dengan adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kebutuhan, potensi, dan keterbelakangan desa. Prinsip keadilan dan keberlanjutan harus menjadi panduan dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran. Faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, populasi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan khusus lainnya harus dipertimbangkan dalam proses alokasi.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Politik anggaran desa harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai alokasi dan penggunaan dana desa kepada masyarakat. Masyarakat desa juga harus memiliki akses yang mudah dan informasi yang memadai untuk memantau penggunaan dana desa serta memberikan umpan balik terkait kebijakan dan program pembangunan.
4. **Pengawasan dan Evaluasi:** Politik anggaran desa juga melibatkan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa. Pemerintah desa, bersama dengan lembaga pengawasan yang relevan, harus melakukan pemantauan yang efektif terhadap penggunaan dana desa, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi pengeluaran, dan pencapaian hasil pembangunan. Evaluasi berkala juga harus dilakukan untuk menilai dampak pembangunan dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.
5. **Partisipasi Masyarakat:** Partisipasi aktif masyarakat desa dalam politik anggaran desa sangat penting. Masyarakat harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran desa. Melibatkan masyarakat dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa akan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka tercermin dalam kebijakan dan program pembangunan.

2.3 Konsep Ketahanan Pangan

Berdasarkan pada konsep ketahanan pangan menyatakan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhannya yang tinggi, maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan bangsa. Karena harus ada lembaga yang mengatur ketersediaan, stabilitas dan pola konsumsinya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memperhatikan pangan dari masyarakatnya, melalui Perpres No. 66 Tahun 2021 pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional. Dalam kita perlu mengetahui arti, aspek, tujuan dan faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan Wityasari, (2021, p. 2).

2.3.1 Definisi Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang di suatu negara setiap saat tercermin dari makanan bergizi, aman, bermutu, beragam, terjangkau dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Berikut merupakan definisi dari Ketahanan Pangan menurut para ahli yaitu:

1. *United Nations' Committee on World Foods Security* Komite PBB tentang Ketahanan Pangan Dunia, Ketahanan pangan adalah semua orang setiap saat memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi ke pangan yang cukup, aman, dan bergizi yang memenuhi preferensi pangan dan kebutuhan pangan mereka.
2. *Food and Agriculture Organization* (1997), Ketahanan pangan adalah sebagai suatu kondisi dimana semua rumah tangga memiliki akses secara fisik maupun ekonomi untuk mendapatkan pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.
3. Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015, Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

2.3.2 Aspek Ketahanan Pangan

Aspek ketahanan pangan berdasarkan laporan dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, (2022) dalam upaya pemenuhan pangan dan gizi bagi masyarakat dapat menggunakan sistem. Sistem ketahanan pangan dibagi kedalam 3 aspek yang terdiri dari :

1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan yang baik dan memiliki gizi yang cukup untuk masyarakat. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Produksi : jumlah pangan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Distribusi : proses penyaluran pangan dari bagian produksi kepada masyarakat secara tepat.
- c. Pertukaran : banyaknya pangan yang dihasilkan dari proses pertukaran atau barter dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2. Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan pangan yaitu kemampuan masyarakat untuk membeli atau memperoleh pangan yang baik dan bergizi dengan harga yang sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat. Keterjangkauan pangan melalui sisi ekonomi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan atau daya beli, stabilitas harga pangan, maupun tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah.

3. Keamanan Pangan

Keamanan pangan yaitu tindakan serta upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencegah dan melindungi pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi. Makanan dikategorikan aman jika baik kuantitas dan kualitas yang dikonsumsi secara langsung akan menentukan status gizi, akan tetapi penyerapan gizi didalam tubuh dipengaruhi oleh kondisi fisik dari seseorang. Agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif, dibutuhkan asupan pangan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi tersebut dilakukan dengan penerapan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang dimulai dari keluarga.

2.3.3 Tujuan Ketahanan Pangan

Tujuan ketahanan pangan dilakukan dalam rangka untuk :

- a. Meningkatkan kemampuan dalam memproduksi pangan secara mandiri;
- b. Tersedianya pangan yang beraneka ragam serta sesuai dengan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi untuk dikonsumsi masyarakat;
- c. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan, terutama pada pangan pokok dengan harga sesuai, wajar serta terjangkau bagi memenuhi kebutuhan masyarakat;
- d. Memudahkan serta meningkatkan akses pangan untuk masyarakat, dan terutama bagi masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi;
- e. Menaikkan nilai tambah serta daya saing komoditas pangan pada pasar dalam negeri dan pasar luar negeri;
- f. Menaikkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat mengenai pangan yang aman, bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi masyarakat;
- g. Menaikkan kesejahteraan para petani, nelayan, pembudi daya ikan serta pelaku usaha pangan; dan
- h. Upaya perlindungan dan pengembangan kekayaan sumber daya pangan secara nasional. (UU No. 18 Tahun 2012)

2.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan yaitu :

1. Cuaca/Iklim. Kondisi cuaca serta pemanasan global yang terjadi beberapa tahun mempengaruhi penurunan pada produksi padi. Temperatur yang tinggi serta kemarau yang harus dialami menjadi hambatan dalam pertanian sehingga berdampak pada pengelolaan lahan pertanian yang tidak dapat diandalkan.
2. Teknologi Peningkatan. Teknologi dapat menambah pengetahuan masyarakat dalam hal budidaya pertanian serta proses dalam pengolahan pangan dengan praktis dan sehat. Implementasi teknologi dapat digunakan pada proses penanaman, pemeliharaan dan proses panen hingga pengolahan komoditas pangan. Selain itu, teknologi pertanian dapat digunakan untuk sistem penyimpanan hasil produksi pangan yang tepat. Dengan tujuan supaya tanaman dan komoditas pangan aman ketika proses pendistribusian hingga saat digunakan masyarakat. Teknologi rekayasa pangan digunakan untuk menghasilkan varietas tanaman pangan yang unggul.

3. Lahan Pertanian. Salah satu faktor utama dalam menentukan produktivitas dari terpenuhinya komoditas pangan yaitu tersedianya lahan pertanian yang luas. Jika lahan pertanian mengalami penurunan tentu produktivitas lahan akan berkurang dan produksi komoditas akan berkurang.
4. Sarana dan Prasarana. Yang mempengaruhi ketahanan pangan salah satunya adalah sarana prasarana karena dengan adanya sarana dan prasarana publik yang baik, proses distribusi komoditas pangan tentu akan memudahkan proses pendistribusian. Contohnya, jika di suatu wilayah yang sulit diakses akan membuat distribusi terganggu dan jika dibiarkan akan menyebabkan krisis pangan. Dapat disimpulkan bahwa, akses transportasi dan infrastruktur menjadi hal yang krusial supaya pendistribusian pangan dapat memenuhi seluruh wilayah. Tidak hanya sarana dalam pendistribusian, sarana guna meningkatkan produktivitas komoditas pertanian. Seperti, sarana pengadaan pupuk, benih unggul, dan sebagainya.
5. Kondisi Ekonomi, Politik, Sosial dan Keamanan. Aspek penting dalam suatu negara dapat terpenuhi maka ketahanan pangan akan mudah untuk diwujudkan. Aspek penting tersebut meliputi empat poin yaitu kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Jika dari keempat aspek tidak berjalan dengan baik yang menghasilkan dampak luas ke berbagai sisi lainnya yang dapat merugikan masyarakat terutama pada ketahanan pangan (Wityasari,2021,p.5).

2.3.5 Konsep Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan dimana kondisi semua individu dalam suatu negara atau wilayah memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun kualitas, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Ini melibatkan berbagai aspek yang memastikan pangan yang tersedia adalah aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur Purwaningsih, (2008, p. 25). Melalui pendekatan sistemik yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan, pembangunan ketahanan pangan dapat dilakukan secara efektif untuk mencapai kondisi pangan yang cukup dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan suatu dukungan

kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan yang disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2.1 Konsep Ketahanan Pangan



Sumber : *Indek Ketahanan Pangan, 2022.*

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

2.3.6 Indikator Ketahanan Pangan

Indikator dalam ketahanan pangan yang digunakan sebagai landasan dalam penentuan IKP yaitu:

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih komoditas padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah. Produksi bersih didekati dari angka produksi setelah dikurangi susut, tercecer, penggunaan untuk benih, pakan dan industri non pangan. Sedangkan konsumsi normatif ditentukan sebesar 300 gram/kapita/hari. Data produksi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah menggunakan angka tetap 2021 dari BPS dan Kementerian Pertanian.

2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indikator ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; FAO 2015). Data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bersumber dari Susenas 2021, BPS.
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran. Distribusi pengeluaran untuk pangan dari total pengeluaran merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga. Teori Engel menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan semakin turun. Pengeluaran pangan merupakan proksi yang baik untuk mengukur kesejahteraan dan ketahanan pangan (Suharjo, (1996, p. 25); Azwar, (2004, p. 30). Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil (Deaton & Muellbauer, (1980, p. 98). Data yang digunakan bersumber dari Susenas 2021, BPS.
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan dengan mendorong aktivitas ekonomi di suatu daerah. Karena itu, ketersediaan tenaga listrik dijadikan salah satu indikator kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013). Rumah tangga tanpa akses listrik diduga akan berpengaruh terhadap kerentanan pangan dan gizi. Data persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik bersumber dari Susenas 2021, BPS.
5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun Rata-rata lama sekolah perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingkat pendidikan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi, dan menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan pangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pendidikan berhubungan erat dengan penyerapan pangan dan ketahanan pangan, (Khan dan Gill (2009). Sumber data yang digunakan berasal dari Data Susenas 2021, BPS.

6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dan air hujan (termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m. Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian ketahanan pangan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, daerah dengan akses terhadap air bersih rendah memiliki kejadian malnutrisi yang tinggi. Sofiati et al., (2018, p. 26). Peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting untuk mengurangi masalah kesehatan khususnya diare, sehingga dapat memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh. DKP dan WFP, (2015); Kavosi et al., (2014, p. 73). Sumber data berasal dari data Susenas 2021, BPS.
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk. Ketersediaan tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisian medis) yang cukup di suatu wilayah akan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat yang pada gilirannya dapat menekan penyakit-penyakit infeksi yang berdampak pada masalah gizi, sekaligus mengampanyekan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk akan mempengaruhi tingkat kerentanan pangan suatu wilayah. Sofiati et al., (2018, p. 26). Data tenaga kesehatan bersumber dari Profil Tenaga Kesehatan Tahun 2021, Kementerian Kesehatan.
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*). Balita *stunting* adalah anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO 2005). Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan pada kelompok penyerapan pangan. Pemprov NTT et al. (2015). Data *stunting* diperoleh dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, Kementerian Kesehatan.
9. Angka harapan hidup pada saat lahir. Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. Angka harapan hidup merupakan salah satu dampak dari status kesehatan di suatu wilayah. Meningkatnya angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan kualitas konsumsi dan kesehatan ibu hamil, status kesehatan secara fisik dan psikis masyarakat pada

umumnya, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Angka harapan hidup saat lahir berasal dari Data Susenas 2021, BPS.

2.4 Tinjauan Teori *Rational Choice Institutionalism* dan Teori *Network Institutionalism* dengan Pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan

Teori *Rational Choice Institutionalism* dan *Teori Network Institutionalism* adalah dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis pemanfaatan dana ketahanan pangan. Teori *Rational Choice Institutionalism* adalah salah satu pendekatan institusionalis yang beranggapan bahwa aktor-aktor politik bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepentingan dan utilitas mereka, serta dipengaruhi oleh institusi-institusi yang ada. Sedangkan *Teori Network Institutionalism* tidak ada satu paradigma jaringan kelembangaan yang eksis, jaringan yang paling sederhana membutuhkan setidaknya tiga aktor yang berbeda.

Pemanfaatan dana ketahanan pangan adalah salah satu kebijakan publik yang berkaitan dengan alokasi sumber daya untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pangan bagi masyarakat. Teori tersebut berfokus pada bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam pemanfaatan dana ketahanan pangan, bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepentingan dan utilitas mereka, serta bagaimana institusi-institusi yang ada mempengaruhi pilihan-pilihan mereka.

Kaitan antara teori *Rational Choice Institutionalism* dengan pemanfaatan dana ketahanan pangan dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

1. Bagaimana aktor-aktor politik, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, partai politik, dan kelompok kepentingan, memilih dan menentukan alokasi dana ketahanan pangan berdasarkan kalkulasi rasional mereka, seperti mempertimbangkan biaya dan manfaat, preferensi dan insentif, serta batasan dan peluang yang ada.
2. Bagaimana institusi-institusi, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan, norma, dan tradisi, mempengaruhi pilihan dan perilaku aktor-aktor politik dalam pemanfaatan dana ketahanan pangan, seperti dengan menetapkan aturan-aturan, mekanisme-mekanisme, sanksi-sanksi, dan insentif-insentif yang berlaku.
3. Bagaimana hasil dan dampak dari pemanfaatan dana ketahanan pangan terhadap kondisi ketahanan pangan di Indonesia, seperti dengan mengukur indikator-indikator, seperti *prevalensi undernourishment*, *food insecurity experience scale*, *global hunger index*, dan lain-lain” Baidhowah, (2020a, p. 96).

Sedangkan Teori *Network Institutionalism* berfokus pada bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam pemanfaatan dana tersebut terhubung dalam jaringan-jaringan sosial yang membentuk norma-norma, nilai-nilai, dan kepercayaan bersama, serta bagaimana jaringan-jaringan tersebut mempengaruhi perilaku dan hasil-hasil mereka. Pemanfaatan dana ketahanan pangan adalah salah satu kebijakan publik yang berkaitan dengan alokasi sumber daya untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan bagi masyarakat.

Kaitan antara teori *Network Institutionalism* dengan pemanfaatan dana ketahanan pangan dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

1. Bagaimana jaringan-jaringan sosial, seperti kelompok petani, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan lembaga penelitian, berinteraksi dan berkolaborasi dengan aktor-aktor politik, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, partai politik, dan kelompok kepentingan, dalam proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemanfaatan dana ketahanan pangan.
2. Bagaimana norma-norma, nilai-nilai, dan kepercayaan bersama yang ada dalam jaringan-jaringan sosial mempengaruhi pilihan dan perilaku aktor-aktor politik dalam pemanfaatan dana ketahanan pangan, seperti dengan menciptakan konsensus, komitmen, legitimasi, dan akuntabilitas yang berlaku.
3. Bagaimana hasil dan dampak dari pemanfaatan dana ketahanan pangan terhadap kondisi ketahanan pangan di Indonesia, seperti dengan mengukur partisipasi, koordinasi, sinergi, dan kapasitas yang terbangun dalam jaringan-jaringan sosial.

2.5 Tinjauan Model Pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan

Model merupakan representasi yang disederhanakan dari suatu objek, benda, atau konsep dari alam semesta, dirancang untuk memberikan pemahaman tentang fenomena yang sebenarnya terjadi. Model ini berisi informasi penting untuk mempelajari sistem atau keadaan yang diwakili. Model bisa berupa tiruan dari benda, sistem, atau peristiwa asli, hanya menyajikan informasi yang dianggap esensial untuk analisis. Achmad, (2008, p. 16) mengidentifikasi empat bentuk model umum, yakni model sistem, model mental, model verbal, dan model matematika.

Studi pemodelan bertujuan untuk mengumpulkan informasi penting tanpa membatasi model menjadi satu. Satu sistem dapat memiliki berbagai model tergantung pada perspektif dan kepentingan pembuat model. Pemodelan sistem melibatkan aktivitas untuk membuat representasi sederhana dari objek atau situasi aktual. Jenis klasifikasi model dalam penelitian ini lebih mendekati pada model empiris, sedangkan model hipotetik yang dirumuskan berdasarkan data-data dan saran-saran atau masukan dari kondisi objektif yang ada di lapangan.

Pemanfaatan dana desa secara optimal memang memerlukan pendekatan yang holistik dan terencana, mencakup proses atau tindakan yang dilakukan untuk mengoptimalkan hasil dari suatu hal atau situasi. Pemanfaatan dilakukan dengan cara mencari informasi mengenai kondisi Pembangunan desa melalui memahami tujuan, sumber daya alam, kondisi alam, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, dan akses informasi, selanjutnya adalah mempertimbangkan faktor penghambat seperti kapasitas aparatur setempat, kerjasama dan partisipasi Masyarakat sehingga ke depannya melalui model yang sesuai dapat memanfaatkan dana desa dengan baik dan maksimal, memberi pelatihan dan meningkatkan kerjasama dan partisipasi Masyarakat. F. Halim et al., (2021, p. 97).

Model pemanfaatan dapat dilakukan melalui model partisipatif dengan cara ikut serta dan memanfaatkan sumber daya Masyarakat desa untuk menjadi agen perubahan untuk desa mereka. Masyarakat terlibat langsung dalam merencanakan, mengelola dan mengatur dana desa untuk tujuan pembangunan desa menggunakan asset dan potensi yang ada di daerah setempat. Model ini diterapkan dengan harapan dapat manfaat sebagai penggerak dan pelaksana dalam pembangunan daerah secara bersinergi baik pemerintah daerah, dan Masyarakat daerah melalui pelibatan sumber daya manusia. Faizah et al., (2022, p. 6).

Perencanaan yang matang dan pemanfaatan dana yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa alokasi dana desa, khususnya untuk program ketahanan pangan dan hewani, benar-benar memberikan dampak positif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peruntukan dana harus melalui *assesment* atau penelusuran tentang kebutuhan masyarakat desa, masalah yang dihadapi Masyarakat desa, dan potensi yang ada di desa tersebut. Priyono, (2019, p. 83). Selain itu diperlukan implementasi kebijakan dengan melibatkan kepentingan keluaran sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dilibatkan. Akib, (2012, p. 2).

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam rangka pembangunan ketahanan pangan melalui program lumbung pangan masyarakat pada realitanya dapat dikatakan belum maksimal, karena salah satu domain yang belum tercapai yaitu privat sector (sektor swasta). Prinsip-prinsip good governance sudah berhasil dijalankan, seperti akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dalam melayani masyarakat, transparansi yang dilakukan tentang program, peningkatan partisipasi masyarakat, dan landasan hukum yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, faktor yang menjadi pendukung dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam rangka pembangunan ketahanan pangan melalui program lumbung pangan masyarakat pada Kelompok Wanita Tani Guyup Rukun Pekon Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu adalah pertama masyarakat yang dinamis yaitu mereka tidak menutup diri dan ingin mengubah kehidupan menjadi lebih baik, dan yang kedua lingkungan yang mendukung seperti sumber daya manusianya maupun sumber daya alam Pekon Sukoharjo. Nurarifaha, Rahayu Sulistiowatib, dan Nana Mulyana, (2019, p. 93)

2.6 Tinjauan Dana Desa

2.6.1 Definisi Dana Desa

Dorongan untuk membentuk Negara yang makmur yang tercukupi serta sejahtera secara lahir dan batin merupakan cita-cita yang ideal setiap pemerintah di berbagai Negara. Termasuk juga Negara Indonesia yang berupaya melakukan perbaikan secara sistematis terus-menerus melakukan perubahan diberbagai lini bidang dalam upaya terselenggaranya pemerintah yang berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Fahmi, (2013, p. 25).

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagai prasyarat inti dalam mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan bangsa dan negara. Maka dinilai tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi indikasi dalam mewujudkan suatu demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan rakyat. Indonesia selaku negara berkembang, berupaya melakukan pembangunan di segala lini, termasuk dalam skala pemerintahan terkecil yaitu desa, yang menjadi ujung tombak dalam pembangunan.

Guna merealisasikan hal tersebut, tentunya harus disertai dengan dukungan modal yang mencukupi. Modal pembangunan desa tidak akan tercukupi jika hanya bersumber dari pendapatan desa. Sehingga akan berdampak pada upaya percepatan pembangunan yang tidak dapat dilakukan. Maka pemerintah memberikan dana desa sebagai upaya mempercepat pembangunan desa.

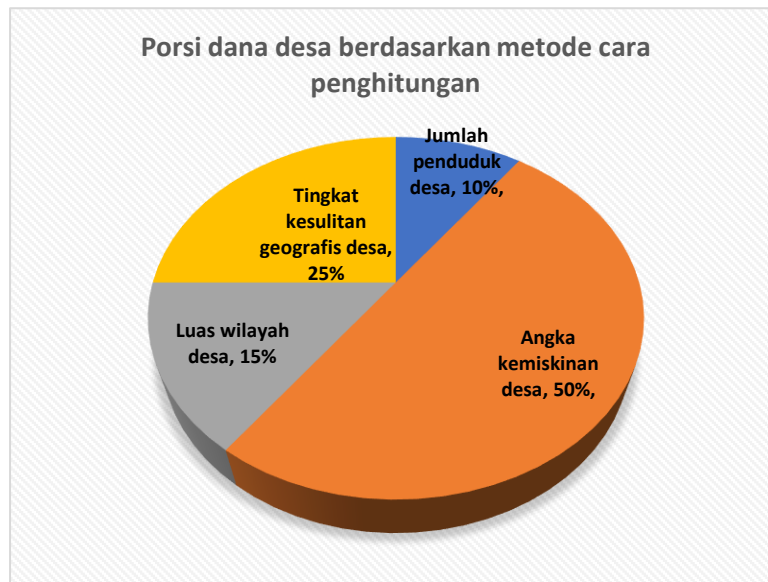
Dana desa ialah “dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi Desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten atau Kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa”.

Berdasarkan pendapat dari Nurhakim yang menyatakan bahwa, “*Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dasar yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatunya, baik dalam bentuk uang atau barang yang dapat digunakan sebagai barang milik desa, berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban*”. Nurhakim & Yudianto, (2018, p. 39). Dari uraian tersebut, keuangan desa adalah “seluruh hak dan kewajiban dasar yang dapat dinilai dengan uang, dan semuanya, baik berupa uang atau barang itu dapat digunakan sebagai milik Desa, terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”.

Dana desa adalah dana APBN yang dialokasikan untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan guna pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan diadakannya dana desa ialah meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengentaskan kemiskinan, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dan objek pembangunan. Masing- masing Desa memiliki porsi dana desa berdasarkan metode cara penghitungan dana desa. Proporsi dan bobot formula mulai 2018 adalah sebagai berikut:

1. 77% porsi Alokasi Dasar,
2. 3% Alokasi afirmasi untuk daerah tertinggal dan daerah sangat tertinggal.
3. 20% Porsi berdasarkan Alokasi Formula:

Gambar 2.2 Porsi Perhitungan Dana Desa



Sumber : Kemendes & PDT, 2023

Saat dana desa sudah diperoleh maka penggunaannya pun harus sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan dana desa. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah:

1. Swakelola yang berbasis dengan sumber daya desa, yang mana pelaksanaannya dilakukan secara mandiri dengan mendayagunakan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga kerja, pikiran dan keterampilan warga Desa serta kearifan lokal.
2. Keadilan, yaitu memprioritaskan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan status sosial.
3. Tipologi Desa, yaitu mempertimbangkan situasi dan kondisi dari kenyataan karakteristik ekonomi, sosiologis, antropologis, geografis, dan ekologi Desa, serta mempertimbangkan perkembangan atau perubahan dan kemajuan Desa
4. Kebutuhan prioritas, yaitu memprioritaskan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar Masyarakat Desa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan tingkat kemiskinan, dan juga kesejahteraan masyarakat.
5. Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat. Selalu melibatkan masyarakat lokal, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai ke tahap evaluasi.
6. Kewenangan Desa, yaitu berupa kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan hak asal – usul.

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN, Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan dari APBD. Mekanisme penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), dan selanjutnya ke Desa (APBDes). Ada 2 tahap penyaluran yaitu sebagai berikut:

1. Tahap I, disalurkan sebesar 60% dari total pagu Dana Desa, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli.
2. Tahap II, disalurkan sebesar 40% dari pagu Dana Desa, paling cepat bulan Agustus. Lalu paling lambat 7 hari kerja setelah Dana Desa berhasil diterima di APBD Kabupaten/Kota pada setiap tahap, Dana tersebut harus segera disalurkan ke Desa.

2.6.2 Sumber Dana Desa

Sumber Dana Desa merupakan berbagai aliran dana yang diterima oleh pemerintah desa dari berbagai pihak dan saluran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan desa. Dana-dana ini dapat berasal dari anggaran pemerintah pusat, daerah, kontribusi masyarakat, serta sumber lain yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desa memiliki berbagai sumber pendapatan, sumber dana desa atau sumber dari pendapatan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Desa, yang berasal dari Hasil usaha, hasil aset, swadaya partisipasi, gotong-royong masyarakat, dan lain-lain dari pendapatan asli Desa.
2. Dana Desa dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota (paling sedikit sebesar 10%)
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (minimal sebesar 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
6. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2.6.3 Tujuan Dana Desa

Tujuan Dana Desa untuk mendukung pembangunan dan pengembangan desa dengan cara yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dana Desa diharapkan dapat mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan kualitas hidup mereka melalui berbagai program dan kegiatan. Penggunaan alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa harus dilakukan dengan mengikuti prinsip efisiensi dan efektivitas, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alokasi yang disebutkan, Dana Desa dibagi menjadi dua bagian utama: 30% untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% untuk pemberdayaan Masyarakat Berikut merupakan tujuan utama dari dana desa adalah :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa.
3. Pembangunan Infrastruktur Desa, dengan mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Pengurangan kemiskinan dengan Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
5. Peningkatan kualitas hidup yaitu dengan meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
6. Pembangunan Kapasitas Pemerintahan Desa dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
7. Pengembangan Kegiatan Sosial dan Budaya yaitu dengan mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.

Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, Dana Desa diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan sosial serta ekonomi secara keseluruhan. Beberapa manfaat dari dana desa yaitu:

1. Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan. Adanya anggaran dana desa akan mempercepat penyaluran atau akses di desa, mengatasi permasalahan yang pelan-pelan dapat diselesaikan khususnya dalam hal pembangunan prasarana umum karena pendistribusian anggaran dilaksanakan secara adil dan merata.

2. Memajukan SDM yang ada di desa. Semakin besarnya anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya, menuntut SDM yang ada di desa untuk lebih berkualitas dalam mengelola dana tersebut. Oleh karena itu selain dana tersebut digunakan bagi pembangunan desa seperti infrastruktur serta sarana dan prasarana, akan tetapi juga digunakan untuk pembangunan SDM yang berkualitas.

2.6.4 Prioritas Dana Desa

Dana Desa dirancang untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;
 - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa merupakan bagian integral dari manajemen keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara

administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa yang lebih luas. Prioritas pemanfaatan dana desa digunakan untuk:

1. Pembangunan Desa:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa:
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
 - c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
 - d. pengembangan seni budaya lokal; dan
 - e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.
3. Dana Desa untuk Operasional Pemerintahan Desa;
4. Tagging BLT Dana Desa untuk pengentasan Kemiskinan Ekstrem;
5. Tagging untuk ketahanan pangan nabati dan hewani;
6. Fokus Kebijakan Penggunaan Dana Desa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.

2.6.5 Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa merujuk pada semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dana Desa digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi desa. Menurut (Soleh & Rochmansjah, 2010), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa dalam pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterima. Untuk memastikan keberhasilan dalam perumusan kebijakan, komunikasi yang efektif baik secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat sangat penting. Dalam proses perumusan kebijakan sebaiknya dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat guna mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan.

2. Value for Money

Dalam konteks otonomi daerah *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah mencapai *Good Governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah, untuk mendukung pengelolaan keuangan dana public

3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan individu yang berintegritas dan memiliki kejujuran tinggi. Kepercayaan dan integritas dalam pengelolaan keuangan adalah kunci untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel

4. Transparansi

Transparansi memainkan peran kunci dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan efektif. Transparansi merupakan betuk keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan sehingga dapat diketahui dan diawasi. Transparansi pengelolaan keuangan daerah akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5. Pengendalian

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah proses krusial dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara efisien dan efektif. Salah satu metode yang digunakan untuk evaluasi ini adalah *analisis varians*, yang membandingkan antara anggaran yang dianggarkan dan pencapaian aktual. Dengan dilakukannya evaluasi secara rutin dan analisis varians pada APBD, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan tetap pada jalur yang benar, memperbaiki kekurangan, dan mencapai hasil yang optimal untuk kepentingan masyarakat.

pemerintah daerah sebagai regulator bertanggung jawab pada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, kontrol, pengelolaan anggaran, dana desa dan pengembangan dan pengetahuan, serta kebijakan inovatif membutuhkan perda desa. Diantaranya menginisiasi forum pengembangan desa, mengatur arah kewenangan pengelolaan desa bagi pemerintah desa, kota/kabupaten hingga provinsi, dan menetapkan desa yang menjadi prioritas kebijakan pengembangan dan dibutuhkan prioritas aksesibilitas yaitu pembangunan infrastruktur, pengembangan desa-desa di Lampung. Sari YR, dkk. (2022, p. 130)

2.7 Kerangka Berpikir

Dalam pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendorong penggunaan Dana Desa dalam mewujudkan ketahanan pangan secara mandiri, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat SDGs Desa. Kepmendesa PDTT Nomor 82 Tahun 2022. Pedoman Ketahanan Pangan di Desa merupakan dokumen penting yang dirancang untuk memberikan arahan dan panduan dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program serta kegiatan ketahanan pangan di tingkat desa. Dokumen ini memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa upaya ketahanan pangan dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Hubungan antara (Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa, 2022) dengan prioritas dana desa untuk ketahanan pangan yaitu: Kepmendesa PDTT Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa adalah keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh warga desa, pencapaian kemandirian pangan desa, dan memastikan desa terlepas dari kerawanan pangan.

Prioritas dana desa untuk ketahanan pangan adalah salah satu arah kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan arahan Presiden untuk tahun 2024. Dana desa ditentukan penggunaannya paling sedikit 20% untuk program ketahanan pangan, paling sedikit 40% untuk bantuan langsung tunai desa, paling sedikit 8% untuk dukungan pendanaan penanganan covid-19 dan sisanya untuk program sektor prioritas lainnya. Hubungan antara kedua hal tersebut adalah bahwa Kepmendesa PDTT Nomor 82 Tahun 2022 menjadi acuan bagi desa dalam

merencanakan, melaksanakan, dan memantau program ketahanan pangan yang dibiayai oleh dana desa.

Program ketahanan pangan di desa adalah komponen kunci dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup melalui berbagai kebijakan dan strategi yang terintegrasi. Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan ketersediaan pangan tetapi juga berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta mengatasi kemiskinan, Masyarakat desa harus terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan untuk memastikan bahwa program memenuhi kebutuhan lokal dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Hubungan antara prioritas dana desa untuk ketahanan pangan terhadap model pemanfaatan dana ketahanan pangan yaitu: Prioritas dana desa untuk ketahanan pangan adalah salah satu kebijakan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022. Kebijakan ini menetapkan bahwa dana desa ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total pagu yang diterima desa.

Model pemanfaatan dana ketahanan pangan adalah cara-cara yang dapat dilakukan oleh desa untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam rangka meningkatkan produksi, ketersediaan, aksesibilitas, dan konsumsi pangan yang sehat, bergizi, aman, dan beragam. Model pemanfaatan dana ketahanan pangan dapat meliputi berbagai macam kegiatan, seperti pengembangan komoditas pangan lokal, pembangunan infrastruktur penunjang, pemberdayaan kelompok tani, pengembangan usaha perhutanan sosial, pembangunan pasar lokal dan pusat distribusi, serta penanganan COVID-19 dan bantuan langsung tunai. Hubungan antara prioritas dana desa untuk ketahanan pangan dengan model pemanfaatan dana ketahanan pangan adalah saling mendukung dan memperkuat.

Dengan adanya prioritas dana desa untuk ketahanan pangan, desa dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melaksanakan berbagai model pemanfaatan dana ketahanan pangan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa. Dengan demikian, desa dapat meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penurunan stunting.

Hubungan antara model pemanfaatan dana ketahanan pangan melalui *teori rational choice institutionalism* dan *teori network institutionalism* untuk mencapai kemandirian dan berkelanjutan yaitu: Model pemanfaatan dana ketahanan pangan adalah suatu cara untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara efektif dan efisien. Model ini dapat dipengaruhi oleh teori rasional choice dan network institutionalism.

Teori rasional choice adalah suatu pendekatan yang mengasumsikan bahwa individu atau kelompok akan memilih tindakan yang dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir biaya. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana rumah tangga atau petani mengambil keputusan terkait dengan produksi, konsumsi, dan distribusi pangan.

Network institutionalism adalah suatu bentuk kerjasama antara berbagai aktor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil, yang saling berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama. Network institutionalism dapat meningkatkan koordinasi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan ketahanan pangan.

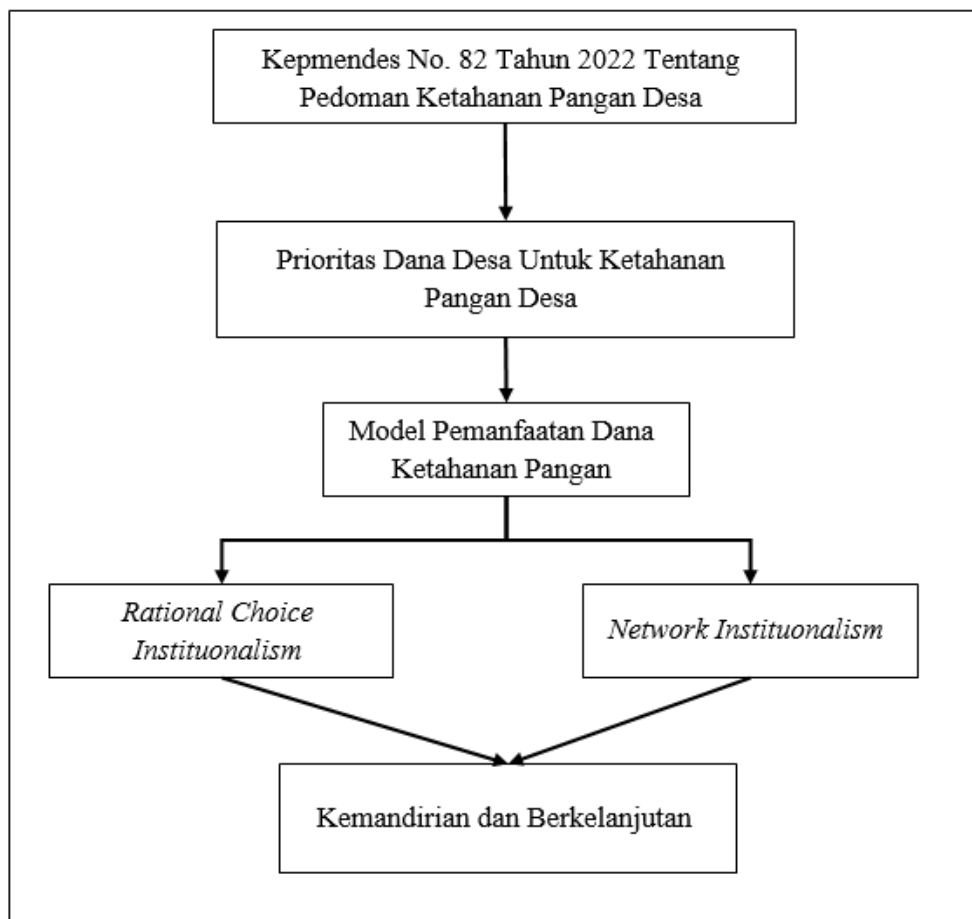
Hubungan antara model pemanfaatan dana ketahanan pangan dengan teori rasional choice dan network institutionalism dapat berpengaruh terhadap kemandirian dan berkelanjutan. Kemandirian adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Berkelanjutan adalah kemampuan untuk mempertahankan ketahanan pangan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Secara umum, hubungan antara model pemanfaatan dana ketahanan pangan dengan teori *rasional choice* dan *network institutionalism* dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Ketersediaan pangan: model pemanfaatan dana ketahanan pangan dapat meningkatkan ketersediaan pangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, mengembangkan teknologi dan inovasi, serta memperbaiki infrastruktur dan logistik. *Teori rasional choice* dapat memotivasi petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pangan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga, permintaan, risiko, dan insentif. *Network institutionalism* dapat memfasilitasi kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan sektor pertanian dan pangan.

2. Akses pangan: model pemanfaatan dana ketahanan pangan dapat meningkatkan akses pangan dengan memberikan bantuan, subsidi, atau kredit kepada rumah tangga atau kelompok yang rentan atau kurang mampu. Teori rasional choice dapat menjelaskan bagaimana rumah tangga atau kelompok memilih sumber pangan yang sesuai dengan preferensi, keterjangkauan, dan ketersediaannya. *Network institutionalism* dapat meningkatkan distribusi dan diversifikasi pangan dengan melibatkan berbagai pihak dalam rantai pasok pangan.
3. Utilisasi pangan: model pemanfaatan dana ketahanan pangan dapat meningkatkan utilisasi pangan dengan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat tentang gizi dan kesehatan. Teori rasional *choice* dapat menggambarkan bagaimana rumah tangga atau kelompok mengonsumsi pangan yang seimbang, aman, dan bermutu dengan mempertimbangkan manfaat, biaya, dan dampaknya. *Network institutionalism* dapat meningkatkan kualitas dan keamanan pangan dengan mengatur standar, regulasi, dan pengawasan pangan.

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir



Sumber : *Diolah Peneliti, 2024*

III METODE PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Penelitian disertasi ini merupakan penelitian menggunakan berparadigma *post-positivism*, dengan judul penelitian “*Politik Anggaran Model Pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan Desa*” menggunakan paradigma *post-positivism* karena bertujuan untuk melihat persepsi khalayak atau masyarakat dan pemerintahan terkait mengenai politik anggaran pada model pemanfaatan dana ketahanan pangan desa, sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari teori *rational choice institutionalism* dan teori *network institutionalism* yang melibatkan proses *encoding* dan *decoding* dan politik anggaran yang diterapkan oleh pemerintah desa serta pendapat dari para pihak yang terlibat.

Paradigma *post-positivism* yaitu suatu pandangan yang menyatakan sebuah teori tidak dapat dianggap sepenuhnya benar karena masih ada perilaku dan tindakan manusia yang harus dipelajari. J.Creswell & Poth, (2018). *post-positivism* mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Pengetahuan yang berkembang dalam paradigma *post-positivism* adalah pengamatan dan pengukuran yang didasarkan pada realitas objektif yang terjadi di lingkungan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, perilaku dan perspektif setiap individu menjadi hal yang sangat penting bagi penelitian dimulai dari peneliti dan teori yang akan digunakan, lalu pengumpulan data yang berguna untuk mendukung atau menyangkal teori tersebut, serta membuat revisi yang diperlukan dan melakukan tes tambahan. J.W. Creswell & Creswell, (2018). lima asumsi yang terdapat dalam paradigma *post-positivism* (Phillips dan Burbules) dalam J. W. Creswell & Creswell, p. (2018, p. 45), di antaranya yaitu:

- 1) Pengetahuan bersifat dugaan dan kebenaran mutlak tidak akan pernah ditemukan. Sehingga, bukti yang terdapat dalam sebuah penelitian tidak dapat sepenuhnya sempurna atau bahkan salah, penelitiam dilakukan untuk mendukung atau menyangkal hipotesis.
- 2) Penelitian kualitatif cenderung dilakukan dengan menguji sebuah teori. Hal ini dilakukan untuk membuat sebuah asumsi yang dapat menyempurnakan atau mengabaikan beberapa asumsi lainnya agar tercipta satu asumsi yang lebih kuat.

- 3) Pengetahuan terbentuk melalui data, bukti, dan beberapa pertimbangan yang rasional. Dalam praktiknya, peneliti akan mengumpulkan data dan informasi mengenai instrumen penelitian melalui langkah-langkah yang telah diselesaikan atau direkam oleh peneliti sebelumnya.
- 4) Penelitian kualitatif cenderung menggunakan daftar pertanyaan yang relevan untuk menjelaskan sebuah situasi atau menggambarkan adanya hubungan sebab dan akibat.
- 5) Peneliti harus bersikap objektif agar dapat mengkaji metode dan menyusun kesimpulan penelitian tanpa adanya prasangka atau bias.

Penelitian ini diperkuat dengan data mengenai alokasi dana desa serta hasil penelitian melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam model pemanfaatan dana ketahanan pangan desa. Sehingga, penelitian ini melihat dari sudut pandang para pihak atau actor yang terlibat dalam model pemanfaatan dana ketahanan pangan melalui teori *rational choice institutionalism* dan teori *network institutionalism*.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif, adalah Metode penelitian yang berdasarkan pada pengolahan data yang sifatnya deskriptif. Djama'an Satori, (2011). Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa memberikan manipulasi data variable yang diteliti dengan cara melakukan wawancara langsung. Bahri, (2017).

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara personal secara mendalam (*in-depth interviews*) untuk mendapatkan informasi mendalam dan personal serta observasi untuk memahami secara spesifik fenomena yang terjadi di desa Wonosari terkait dengan topik penelitian. Hennink et al., (2020, p. 243). Wawancara dan observasi tidak hanya menjadi data dalam penelitian, tapi sekaligus refleksi paradigma. Hennink et al., (2020, p. 255). Setiap karakteristik bisa saling terkait satu sama lain dan tidak berdiri sendiri karena penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mengeksplorasi dan memahami individu dari masalah sosial. J. W. Creswell, (2013, p. 66). Sehingga, Djamba & Neuman, (2002) berpendapat, penelitian dengan pendekatan kualitatif biasanya menggunakan rangkaian langkah atau tahapan yang sedikit berbeda dengan pendekatan kuantitatif, lebih bervariasi, kurang linier, fluid atau fleksibel.

3.3 Fokus Penelitian

Penetapan fokus dan deskripsi fokus penelitian 2 (dua) hal: Pertama, menetapkan fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri, misalnya, jika kita membatasi diri pada penggunaan teori-teori tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti, sedang teori-teori yang tidak sesuai sedapat mungkin dihindari penggunaannya. Kedua, penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi seperti perolehan data yang baru dilapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus penelitian, maka peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. Moleong, (2002).

Adapun fokus penelitian ini untuk mendeskripsikan politik anggaran dalam pemanfaatan dana desa, khususnya yang berkaitan dengan dana ketahanan pangan dan hewani, yang alokasinya 20% dari total dana desa. Penelitian ini berfokus pada Desa Wonosari, yang terletak di Kecamatan Mesuji Timur. Dengan demikian, penelitian ini akan menggali bagaimana proses pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan dan hewani, serta memahami dinamika politik anggaran yang terjadi dalam konteks desa tersebut.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Pemilihan Desa Wonosari sebagai objek penelitian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Desa Wonosari merupakan salah satu desa yang memenuhi kriteria sebagai Kampung Tangguh Nusantara tahun 2021, penilaian berdasarkan kriteria 3 pilar yaitu tangguh kesehatan, tangguh keamanan dan tangguh ketahanan pangan.
2. Desa Wonosari memiliki lahan seluas 425 Ha/m dan memiliki persediaan air tawar yang melimpah karena berbatasan langsung dengan Sungai Cambai.
3. Desa Wonosari dicanangkan sebagai salah satu desa penghasil padi di Kabupaten Mesuji, sehingga perlu adanya perbaikan pada infrastruktur pertanian.

4. Sesuai dengan surat Keputusan Bupati Mesuji No B/375/I.02/HK/MSJ Tahun 2018 tentang Penetapan kawasan pedesaan agropolitan. Desa wonosari kecamatan Mesuji timur merupakan salah satu desa dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Agropolitan, membangun desa dalam sebuah kerangka pembangunan yang koheren terencana, dan terpadu.
5. Desa Wonosari salah satu desa lokasi *Rice Milling Plant* (RMP) merupakan penggilingan padi tiga tahap atau lebih dengan kapasitas besar 3.0 ton gabah/jam milik pemerintah daerah merupakan hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Kota Terpadu Mandiri (KTM) kawasan transmigrasi Mesuji.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan peneliti untuk membantu dan mendukung proses analisis data sehingga hasil penelitian didasarkan pada data yang relevan dan bukan hanya berspekulasi. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dilaksanakan secara langsung di lapangan dengan menentukan hal yang dibutuhkan dan mencatat semua yang berkaitan dengan penelitian berfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian sehingga memperoleh gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti. Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang faktual dan valid sesuai dengan penelitian :

1. Observasi *Non-Participant*

Observasi adalah teknik yang memiliki ciri yang spesifik dari pada Teknik yang lain yaitu wawancara dan kuisioner. Menurut Hardani et al. (2020, p. 15) melalui bukunya yang berjudul metode penelitian kualitatif dan kuantitatif mengatakan:

“Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun dilaksanakan secara tidak langsung”

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi *non participant* dimana peneliti tidak terlibat dalam kegiatan, namun peneliti secara langsung berkunjung ke Balai Desa Wonosari, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan Mesuji Timur dan lembaga yang berkaitan dengan pemanfaatan dana desa yaitu Lokasi RMP, Koperasi Argo Lestari dan Kelompok Tani. Mengamati perilaku secara langsung untuk menghasilkan data yang lebih autentik dengan tujuan mendapatkan gambaran objektif dan alami mengenai tindakan, perilaku, atau interaksi yang terjadi. Kunjungan dilakukan peneliti menyesuaikan jam kerja operasional secara bergantian.

2. Wawancara Mendalam (*In-dept Interview*)

Dalam Teknik pengumpulan data, diperlukan data yang relevan, salah satunya melalui teknik wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan responden. Farida dalam bukunya "Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa" mendefinisikan teknik pengumpulan data utama yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lengkap dan mendalam sebagai wawancara mendalam. Nugrahani, (2014, p. 124). Wawancara mendalam ini dilakukan secara informal, sehingga prosesnya lebih terbuka. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) sebagai pengajuan/pemberi pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan. Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh data yang sangat akurat karena bersumber langsung dari pemilik tempat penelitian.

Wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti, di mana responden dapat memberikan pendapat, persepsi, perasaan, aktivitas, dan ide-ide mereka secara terbuka. Untuk memastikan keefektifan wawancara, peneliti membuat naskah pedoman wawancara yang digunakan sebagai acuan untuk menggali informasi dari responden.

Peneliti melakukan wawancara mendalam guna memperoleh gambaran yang empiris mengenai politik anggaran model pemanfaatan dana ketahanan pangan desa dengan para aktor atau para pihak yang terkait yaitu Bapak Arif Dwiyanto, S.T., M.T sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan wawancara dilakukan pada tanggal 1 Maret 2024 Selama 2 (dua) Jam mulai pukul 09 s.d 11 Wib, bertempat di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Mesuji, Bapak Feri Antomi, S.Sos., M.H sebagai Kepala Bidang Kelembagaan dan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa wawancara dilakukan pada tanggal 17 Maret 2024 Selama 1 (Satu) Jam mulai pukul 10 s.d 11 Wib, bertempat di kantor Bappelitbangda, bapak M Asyraf, S.H.I., M.M sebagai Sekretaris Camat Mesuji Timur wawancara dilakukan pada tanggal 08 Maret 2024 Selama 1 (Satu) Jam mulai pukul 13 s.d 14 Wib, bertempat di kantor Bappelitbangda Kabupaten Mesuji, bapak Aspari Kepala Desa Wonosari wawancara dilakukan pada tanggal 29 Januari 2024 Selama 2 (Dua) Jam mulai pukul 09 s.d 11 Wib, bertempat di Balai Desa Wonosari serta bapak Mahdi selaku tokoh masyarakat desa wonosari wawancara dilakukan bertempat di kediaman bapak mahdi pada tanggal 29 Januari 2024 selama 1.5 (satu setengah) jam mulai pukul 12.30 s.d 14 Wib. Selama dalam pelaksanaan penelitian, peneliti juga melakukan diskusi ringan dikemas dengan kegiatan “*klinik Inovasi*” kegiatan dilakukan 1 (satu) minggu sekali setiap hari jumat pukul 09 s.d 11 Wib pembahasan dengan para aktor terlibat sehingga memperoleh data penelitian yang valid dan relevan.

3.5.2 Studi Pustaka

Peneliti melakukan penelitian dengan mempelajari berbagai buku perpustakaan serta mencari referensi dari berbagai sumber internet. Studi mengenai politik anggaran dimaksudkan menguak tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah dan para pihak yang terlibat, mengapa tindakan itu dilakukan, dengan cara dan mekanisme apa dilakukan, untuk kepentingan siapa, dan bagaimana hasil, akibat, dan dampaknya. Masalah politik anggaran adalah masalah kebijakan publik dan artinya harus dikaji lintas keilmuan, sehingga mampu menangkap setiap fenomena yang terjadi tidak sebatas angka-angka.

Dalam kaitan tersebut, maka peneliti memilih untuk mengambil paradigma *post-positivism* dengan metode kualitatif deskriptif, guna melihat berbagai sudut pandang yang melingkupi kasus ini. Mengapa peneliti mengambil posisi demikian? dikarenakan banyaknya pro dan kontra yang terdapat dalam kasus ini sehingga tidak mencukupi jika hanya dibahas dalam salah satu paradigma tertentu saja. Lebih lanjut, kutipan berikut sangat tepat untuk menggambarkan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini:

“Decision-making is not a one-shot activity, but part of a choice process in which choice possibilities, relevant criteria and urgency of choices gradually become more clear. In the reality of actual policy analysis we observe that decision-making is based less on information engineering and more on compliance with legal procedures or regulatory frameworks. Consequently, in many choice situations – especially in those within the public domain – we observe a tendency to suppress straightforward optimisation behaviour and instead to favour ‘satisficing’ or compromise modes of planning”. Medda & Nijkamp, (1999)

Pendapat Medda tersebut membuktikan bahwa dalam hal pembuatan keputusan bukan murni kegiatan sepihak, akan tetapi juga merupakan bagian dari proses memilih yang didalamnya terdapat banyak kemungkinan, kriteria yang berhubungan sehingga pilihan yang lebih penting menjadi semakin jelas.

Dalam penelitian ini, sumber data dan informasi sangat penting sebagai landasan berpikir untuk memahami topik yang dibahas. Studi Pustaka dilakukan dengan cara studi literatur dan pencarian *online*, bertujuan untuk melengkapi data pendukung yang diperlukan dalam penelitian serta memberikan dasar yang kuat mengapa penelitian ini perlu dilakukan.

Studi pustaka tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam menyusun kerangka teoritis, tetapi juga digunakan untuk membangun hasil dan pembahasan penelitian. Melalui tinjauan pustaka, peneliti dapat menggali berbagai teori, konsep, dan temuan penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendukung argumentasi dalam penelitian ini. Semua informasi yang diperoleh dari studi pustaka ini akan menjadi acuan untuk menyusun kerangka teoritis yang disajikan dalam gambar 2.3 pada halaman 52

1. Studi Literatur

Menurut Farida dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif mengungkapkan: *“Melalui literatur dapat diketahui perlu-tidaknya pendekatan baru untuk memecahkan masalah yang pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya. Selain itu, melalui literatur, dapat ditemukan teori yang berseberangan dengan pengalaman empirik yang telah dimiliki, ataupun pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya”.* Nugrahani, (2014, p.71)

Dalam suatu penelitian, studi pustaka memegang peranan penting, terutama untuk penelitian akademik yang bertujuan untuk mengembangkan aspek teoritis dan praktis. Studi pustaka membantu menyiapkan landasan teori dan kerangka berpikir sehingga peneliti dapat membuat dugaan sementara secara teoritis. Dalam penelitian yang lebih mendalam, studi pustaka dapat memberikan dukungan yang kuat. Dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan jurnal dan buku sebagai sumber teori untuk mengumpulkan dan mengelola data pustaka mengenai pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan.

Dalam penelitian ini, studi literatur dilakukan dengan beberapa langkah yang terstruktur. Langkah pertama adalah menemukan teori-teori yang relevan yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti juga melihat temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan politik anggaran dan pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan dan hewani. Langkah kedua adalah mengidentifikasi dan mencantumkan sumber-sumber utama yang digunakan dalam studi literatur, seperti artikel ilmiah, buku, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat berdasarkan kajian-kajian terdahulu.

Selanjutnya, peneliti mencari celah atau kekurangan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang belum banyak diteliti, khususnya dalam konteks politik anggaran dalam model pemanfaatan dana ketahanan pangan desa. Celah-celah ini menjadi alasan utama mengapa penelitian ini dianggap penting untuk mengisi kekosongan pengetahuan yang ada. Meskipun terdapat beberapa perdebatan dan perbedaan pendapat dalam literatur yang ada, peneliti memutuskan untuk membatasi fokus penelitian pada kajian mengenai politik anggaran dalam model pemanfaatan dana ketahanan pangan desa, guna memperjelas ruang lingkup penelitian dan menjaga konsistensi analisis.

2. Pencarian Online Atau *Internet Searching*

Pengumpulan informasi atau data melalui penelusuran online dilakukan melalui internet, dengan menggunakan penelusuran online, peneliti memperoleh data yang luas. Dalam penelusuran online untuk penelitian tentang politik anggaran dalam model pemanfaatan dana ketahanan pangan desa. Berikut hal-hal konkret yang telah dilakukan peneliti:

a. Mencari Literatur Terkait

Peneliti mencari artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, buku, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan politik anggaran, ketahanan pangan desa dan pembangunan desa. Hal ini dilakukan dengan menggunakan database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan database lainnya. Selanjutnya peneliti mencari dokumen yang mengulas kebijakan pemerintah atau studi kasus di daerah lain yang relevan dengan topik penelitian.

b. Mencari Data Statistik dan Laporan Pemerintah

Peneliti melakukan pengumpulan data terkait alokasi dan pemanfaatan dana ketahanan pangan desa mencari melalui situs web pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, atau situs Pemerintah Daerah. dalam hal ini juga peneliti mencari laporan tahunan, anggaran desa dan dokumen terkait kebijakan ketahanan pangan yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang relevan.

c. Mencari Kebijakan atau Regulasi Terkait

Peneliti juga telah mencari peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan dana desa, seperti Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah, atau kebijakan khusus yang menyangkut ketahanan pangan. Kebijakan tersebut ditemukan melalui situs resmi kementerian dan lembaga yang mengatur pengelolaan dana desa dan ketahanan pangan, seperti situs Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

d. Mengakses Data dari Organisasi Non-Pemerintah (NGO)

Peneliti mencari laporan atau studi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi internasional yang bekerja di bidang ketahanan pangan, seperti FAO, IFPRI, atau WFP, laporan-laporan yang disediakan oleh organisasi ini sering kali memberikan analisis kritis terkait pengelolaan anggaran dan keberhasilan program ketahanan pangan di desa.

e. Menggunakan Alat Pencarian Khusus untuk Data Keuangan

Peneliti menggunakan situs yang menyediakan informasi terkait keuangan publik atau transparansi anggaran, seperti Open Data Portal, untuk melihat bagaimana anggaran desa digunakan, termasuk alokasi dana untuk ketahanan pangan.

f. Meninjau Media Berita dan Artikel Opini

Selanjutnya peneliti juga mengakses artikel-artikel berita dan opini yang membahas tentang politik anggaran dan ketahanan pangan di media massa lokal maupun nasional, seperti Kompas, Tempo, Lampung Post dan Tribun Lampung. Artikel-artikel tersebut sering membahas masalah kebijakan ketahanan pangan dan implementasinya di tingkat desa, serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat.

Dengan penelusuran online yang sistematis dan menggunakan kebijakan yang tepat dalam memilih sumber yang relevan, peneliti telah mengumpulkan berbagai data yang mendalam mengenai politik anggaran dan pemanfaatan dana ketahanan pangan desa. Selanjutnya, data yang diperoleh dapat dianalisis untuk memahami dinamika pengelolaan anggaran dalam konteks ketahanan pangan di tingkat desa.

3.6 Informan Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kualitatif memiliki tipe yang fokus pada pendalaman sampel yang relatif lebih kecil atau sedikit, *single cases*, diseleksi untuk tujuan spesifik tertentu. Pemilihan sampel dengan tujuan tertentu ini merupakan teknik logika unik dari sebuah strategi penelitian kualitatif dan dinamakan “*Purposive Sampling*”. Patton, (2014,p.398). Pemilihan informan agar sesuai dengan tujuan penelitian haruslah diikuti dengan informan yang memiliki kekuatan bercerita dan kaya pengalaman informasi, serta memiliki daya ingat dan kesadaran untuk menceritakan kembali pengalaman realitas kehidupannya.

Purposeful sampling: Selecting information-rich cases to study, cases that by their nature and substance will illuminate the inquiry question being investigated (Patton, 2014, p. 401).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memudahkan penentuan informan yang sesuai dengan objek penelitian. Dari beberapa informan yang tersedia, peneliti memilih informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pertama, Informan memahami peraturan dan kebijakan mengenai prioritas alokasi dana desa untuk ketahanan pangan.
2. Kedua, Informan terlibat dalam melaksanakan pelaksanaan kebijakan mengenai prioritas alokasi dana desa untuk ketahanan pangan.
3. Ketiga, Informan menjalankan politik anggaran dalam pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan
4. Informan bersedia untuk di wawancara, guna kelengkapan isi dari penelitian ini.

Informan di ambil dari berbagai aktor yang berbeda kedudukannya, hal ini dikarenakan dilakukan dua kali *Focus Group Discussion* (FGD). *Pertama* FGD dilakukan di lokasi penelitian yaitu di aula Desa Wonosari pada hari selasa tanggal 24 Januari 2024 selama 3 (tiga) jam mulai pukul 09 s.d 12 WIB terfokus pada pengambilan data dan informasi terkait pemanfaatan dana ketahanan pangan desa dengan Narasumber Prof.Dr.Ari Damastuti, M.A, Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si dan Dr. Feni Rosalia, M.Si dihadiri oleh informan kunci dan informan pendukung level lokal sedangkan *Kedua* FGD dilakukan di Aula kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Mesuji pada hari kamis tanggal 7 Maret 2024 dengan Narasumber Prof.Dr.Ari Damastuti, M.A, Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si, selama 3 (tiga) jam mulai pukul 09 s.d 12 Wib,

FGD kedua tersebut dilakukan klarifikasi informasi dan data yang diperoleh dari FGD yang pertama terkait pemanfaatan dana ketahanan pangan dihadiri oleh informan kunci dan informan pendukung level regional. FGD sendiri merupakan diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal serta dilaksanakan dengan panduan dan didampingi oleh peneliti sebagai moderator. Adapun informan kunci dan informan pendukung tersaji pada uraian berikut.

3.6.1 Informan Kunci

Informan kunci yaitu seseorang yang paling paham dan menguasai informasi mengenai tentang permasalahan yang sedang diteliti. Adanya informan kunci direkomendasikan terkait kriteria tertentu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kriteria mengenai informan kunci diantaranya, sebagai berikut :

1. Informasi kunci merupakan pihak yang mengetahui dan bertanggung jawab atas pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan.
2. Informan kunci yang dipilih adalah bagian penting dari pemerintah yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.
3. Informan tepat untuk dijadikan informan kunci karena dapat memberikan dan menambah informasi yang dibutuhkan mengenai penelitian ini.
4. Informan kunci dipilih karena dirasa dapat membantu serta mendukung secara penuh kepada penelitian ini.

Tabel 3.1 Informan Kunci (Primer)

Nama Informan	Jabatan	Informasi
Arif Dwiyanto, S.T., M.T	Kadis Ketahanan Pangan	Peran Pemerintah Kabupaten Mesuji Dalam Ketahanan Pangan
M Asyraf, S.H	Sekretaris Camat Mesuji Timur	1. Peran Kecamatan dalam mendukung ketahanan pangan 2. Penerapan Dana Ketahanan Pangan di desa Wonosari
Feri Antomi, S.Sos., M.H	Kepala Bidang Kelembagaan dan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Kontribusi Dinas PMD Dalam Ketahanan Pangan Desa 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Ketahanan Pangan Desa
Aspari	Kepala Desa Wonosari	1. Proses Perencanaan dan Penggaran Dana Ketahanan Pangan Desa Wonosari 2. Penggunaan Dana Ketahanan Pangan Desa Wonosari

Sumber : *Diolah Peneliti 2024*

3.6.2 Informan Pendukung

Dalam penelitian ini, informan pendukung berperan penting dalam memperjelas dan memperkuat informasi yang diberikan oleh informan kunci. Mereka membantu peneliti dalam memastikan validitas informasi yang diberikan oleh informan kunci. Peneliti telah merumuskan kriteria untuk memilih informan pendukung, yaitu mereka berkontribusi atau ikut serta dalam politik anggaran dalam model pemanfaatan dana ketahanan pangan desa. Berikut adalah daftar informan pendukung yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3.2 Informan Pendukung

Nama Informan	Jabatan	Informasi
Eko Pascoyo	Tenaga Ahli Desa	Peran Dalam meningkatkan ketahanan pangan di tingkat desa
Nurdin Umbara	Badan Permusyawaratan Desa	1. Pengawasan dari program dana ketahanan pangan 2. Pencapaian Pembangunan dana ketahanan pangan
Munadi	Tokoh Masyarakat	1. Pendapat mengenai pencapaian program ketahanan pangan desa 2. Pendapat mengenai dampak dari dana ketahanan pangan
Zul Fitri, S.T	Fungsional Perencanaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat	1. Mengenai program dana ketahanan pangan untuk desa 2. Mengenai proses penyusunan anggaran dana ketahanan pangan
Sahroni, S.Psi	Kepala Bidang Program Perencanaan Evaluasi Pembangunan Bappelitbangda	proses anggaran dana desa untuk ketahanan pangan
Maksum, S.Pt	Kepala Bidang Anggaran BPKAD	Peran Pemerintah dalam pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan
Zulkarnai	Pendamping Desa	Tugas Pedampingan Pengelolaan pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan
Dr. Supriyanto, S.T.P., M.Kom	<i>Assistant Director of Agromaritim Service and Digital Farming & Department of Mechanical and Biosystem Engineering, IPB University</i>	Kontribusi Akademisi pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan Desa

Koperasi Argo Lestari dan Perusahaan Swasta	NGO	Mengenai keterlibatan dalam pengelolaan dana ketahanan pangan desa
1. Sulastri 2. Rahayu 3. Sudarman 4. Wahid 5. Edi Susanto	<i>Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Wanita Tani KWT), Kelompok Tani, Karang Taruna, Pengurus Bumdes</i>	1. Peran dalam pemanfaatan dana ketahanan pangan desa 2. Keterlibatan dalam pengelolaan dana ketahanan pangan desa
Suranto	<i>Petani Lokal</i>	1. Pendapat dampak dari alokasi dana ketahanan pangan di desa 2. Kendala pengelolaan dana ketahanan pangan

Sumber : *Diolah Peneliti 2024*

Guna mengkonfirmasi atau menambah pemahaman, peneliti menggunakan informan data (data sekunder) yang di dapat dari *searching online* pada website kementerian, laporan elektronil atau e-dokumen. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan perspektif yang sudah ada dan bisa mengisi kekosongan informasi atau memberikan bukti serta mendukung argumen yang dikemukakan oleh informan sebelumnya. Sumber ini juga sangat penting dalam proses triangulasi, yaitu penggunaan berbagai sumber data untuk memastikan konsistensi dan keabsahan temuan. Dengan mencocokkan informasi dari informan pendukung dan data sekunder, peneliti dapat memverifikasi hasil penelitian dan mengurangi bias atau subjektivitas.

Selain itu, data sekunder memberikan konteks lebih besar atau latar belakang teori yang relevan dengan topik sedang diteliti, membantu peneliti menghubungkan temuan penelitian dengan teori atau kajian yang lebih luas, di sisi lain, dapat memberikan wawasan praktis atau pengalaman langsung yang menghubungkan temuan dengan konteks sosial, budaya, atau organisasi yang relevan. Penggunaan data sekunder juga menghemat waktu dan sumber daya, karena peneliti dapat mengakses informasi yang sudah ada tanpa harus mengumpulkan data baru. Keberadaan informan pendukung dan data sekunder dapat meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif, karena data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber yang dapat saling menguatkan, memberikan kedalaman, konteks, validitas, dan kredibilitas yang lebih tinggi terhadap temuan penelitian. Berikut adalah daftar informan pendukung data sekunder yang digunakan:

Tabel 3.3 Informan Pendukung (*data sekunder*)

Sumber Informasi	Informasi	Uraian
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PDPT)	Mengenai regulasi alokasi dana ketahanan pangan desa	<i>internet searching</i>
Kementerian Pertanian	Peran Pemerintah dalam Ketahanan Pangan	<i>internet searching</i>
Kementerian Keuangan, DJPK	Kebijakan dalam dana ketahanan pangan desa	<i>internet searching</i>
Dinas PMD Propinsi Lampung dan Dinas Propinsi Lampung	Mengenai kebijakan tingkat regional dalam dana ketahanan pangan	<i>internet searching</i>

Dumber : *Diolah Peneliti, 2024*

3.7 Uji Keabsahan Data

Menurut Lexy J. Moleong (2010) dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif*, untuk menentukan keabsahan atau reliabilitas data dalam penelitian kualitatif, peneliti harus melakukan review terhadap beberapa kriteria. Hal ini penting untuk dilakukan memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang baik dan dapat dipercaya. Berikut adalah beberapa kriteria yang harus dipenuhi peneliti dalam memastikan keabsahan data dalam penelitian kualitatif:

a. Kepercayaan dan Keaslian (*credibility*)

Dalam penelitian ini, pendekatan triangulasi data dan teknik digunakan untuk menguji keabsahan dan validitas data yang diperoleh. Triangulasi adalah proses penggabungan atau perbandingan berbagai sumber, metode, atau teori untuk meningkatkan keakuratan dan validitas temuan. Penerapan triangulasi data dan teknik dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keabsahan dan validitas data yang dikumpulkan. Dengan membandingkan data dari berbagai sumber (informan) dan metode (wawancara, observasi, dokumentasi), peneliti memastikan bahwa hasil penelitian ini mencerminkan kenyataan yang ada di lapangan dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih kuat dan dapat dipercaya.

b. Transferabilitas (*Transferability*)

Peneliti dalam menyajikan laporan penelitian memastikan bahwa uraian yang disajikan jelas, ringkas, sistematis, dan dapat dipercaya. Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu dan mengaitkannya dengan teori baru, khususnya pada bab penelitian. Dengan pendekatan ini, laporan penelitian ini tidak hanya menunjukkan hasil yang diperoleh, tetapi juga memperkuat kontribusi penelitian tersebut terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang diteliti.

c. Kebergantungan (*dependability*)

Keandalan (reliabilitas) dalam konteks penelitian kualitatif merujuk pada sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya dan konsisten. Menurut Sugiyono (2012), pengujian keandalan dapat dilakukan melalui audit menyeluruh terhadap seluruh proses penelitian. Audit di sini berarti penilaian yang sistematis terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan oleh peneliti dari awal hingga akhir penelitian untuk memastikan bahwa prosedur yang digunakan dapat dipercaya dan dijelaskan dengan jelas kepada pihak lain. Dengan adanya audit ini, peneliti dapat memastikan bahwa proses penelitian berjalan dengan baik, transparan, dan konsisten, serta hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan valid.

3.8 Teknik Analisis Data

Humphrey et al. (1992, p. 142) berpendapat validasi data dalam penelitian kualitatif merupakan kajian mencari dan memperluas makna kehidupan, "*searching for life's meaning*" Moustakas (1994, p. 10) yang disampaikan melalui narasi jawaban informan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan peneliti. Maka dari wawancara dua informan, penelitian dilanjutkan dengan teknik analisis dan validasi data, dengan mengorganisasi data untuk dianalisis. Hasil wawancara informan kemudian ditranskrip dalam bentuk tulisan untuk dilihat dan dibaca kembali kesesuaian jawaban dengan unsur-unsur yang terkait dengan tujuan penelitian. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

Selanjutnya dalam analisis data penelitian ini dilakukan saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012), secara bertahap mengelompokkan data hasil dari observasi dan wawancara sehingga memperoleh suatu kesimpulan data. Berikut penjabaran analisis data penelitian ini:

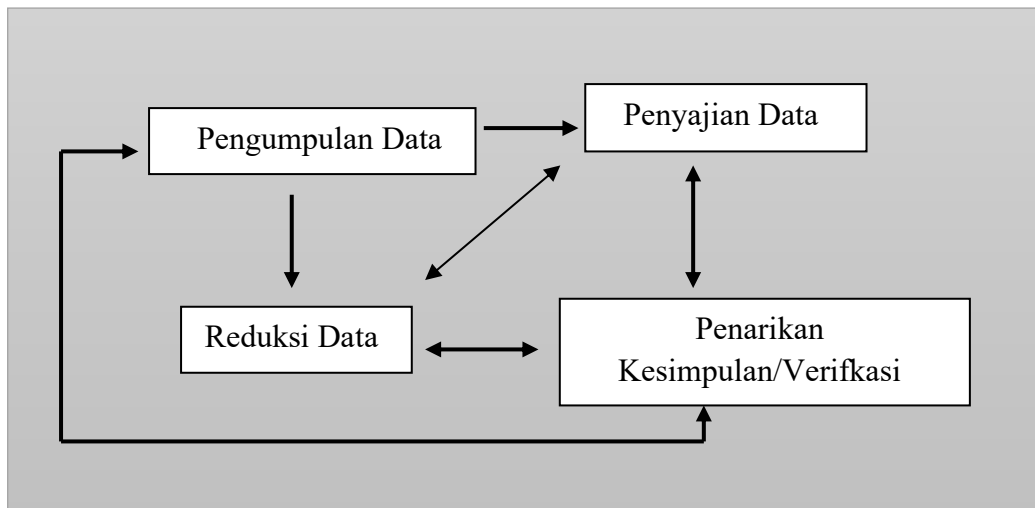
a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan salah satu tahapan penting dalam proses analisis data, terutama dalam penelitian kualitatif. Aktifitas reduksi data dalam penelitian ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang berlangsungnya penelitian, dengan tujuan untuk menyaring dan memilih data yang dianggap relevan dan penting. Proses ini dilakukan oleh peneliti tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah data, tetapi juga untuk memfokuskan perhatian pada informasi yang benar-benar signifikan dan mendukung tujuan penelitian. Berikut dalam aktifitas reduksi data yang dilakukan peneliti. 1). Pemilihan Data yang Relevan, 2). Penyederhanaan Data, 3). Membuang Data yang Tidak Perlu. 4). Meringkas Data dan 5). Penyusunan Ulang Data

b. Penyajian data (*data display*) adalah langkah penting setelah reduksi data dalam proses analisis data penelitian. Dalam penyajian data yang dilakukan bertujuan untuk memvisualisasikan data yang telah direduksi sehingga lebih mudah dipahami, dianalisis, dan digunakan peneliti untuk menarik kesimpulan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan keadaan atau peristiwa yang diteliti secara lebih jelas, sehingga mempermudah interpretasi dan penarikan kesimpulan

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) adalah tahap akhir analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, bertujuan untuk menyimpulkan temuan-temuan yang telah dihasilkan dari pengumpulan, reduksi data, dan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan pengumpulan data lebih lanjut.

Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, menekankan bahwa kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada data yang valid dan konsisten. Penarikan kesimpulan sementara, yang dapat berubah jika ada bukti baru, menggambarkan sifat penelitian kualitatif yang dinamis dan terbuka terhadap revisi berdasarkan bukti yang ada. Model interaktif Miles dan Huberman memberikan kerangka yang berguna dalam analisis data kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang kredibel tentang politik anggaran dalam model pemanfaatan dana ketahanan pangan desa.

Gambar 3.1. Interaktif Miles dan Huberman.



Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012)

3.9 Analisis Stakeholder Power-Interest Matrix:

Dalam melakukan analisis memetakan dan mengelompokkan para pemangku kepentingan para aktor dalam suatu kebijakan, Peneliti menggunakan analisis *Power-Interest Matrix* (Johnson, Scholes dan Whittington, 2008), berdasarkan dua dimensi utama: **kekuatan (power)** dan **kepentingan (interest)**. Tool ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi aktor yang memiliki pengaruh sangat besar, aktor yang memiliki kepentingan besar, aktor yang utama dan aktor kunci.

Tabel 3.4 Analisis Stakeholder Power-Interest Matrix

<i>Power\Interest</i>	<i>High Interest</i>	<i>Low Interest</i>
<i>High Power</i>	Kuadran 1: Actor memiliki pengaruh sangat besar (<i>High Power, High Interest</i>)	Kuadran 2: Actor memiliki pengaruh, namun tidak terlalu tertarik (<i>High Power, Low Interest</i>)
<i>Low Power</i>	Kuadran 3: Actor memiliki pengaruh, namun kekuatan terbatas (<i>Low Power, High Interest</i>)	Kuadran 4: Actor memiliki kekuatan dan kepentingan rendah (<i>Low Power, Low Interest</i>)

Sumber : *Power-Interest Matrix* (Johnson, Scholes dan Whittington, 2008)

Penjelasan Kuadran dan Manajemen Aktor

1. Kuadran 1: *High Power, High Interest* (Aktor memiliki pengaruh sangat besar)
Aktor dalam kuadran ini memiliki pengaruh besar dan kepentingan tinggi terhadap program. Mereka sangat terlibat dan dapat mempengaruhi keberhasilan program secara signifikan. Libatkan mereka secara aktif dalam pengambilan keputusan
2. Kuadran 2: *High Power, Low Interest* (Aktor memiliki pengaruh, namun Kepentingannya Rendah/tidak terlalu tertarik)
Aktor dalam kuadran ini memiliki pengaruh tetapi tidak terlalu tertarik atau terlibat dalam program, Mereka bisa memberikan masukan yang berharga.
3. Kuadran 3: *Low Power, High Interest* (Aktor memiliki pengaruh namun kekuatan terbatas).
Aktor dalam kuadran ini memiliki pengaruh, namun kekuatan mereka terbatas. Mereka dapat memberikan masukan yang berharga meskipun tidak memiliki pengaruh besar dengan kekuatan terbatas.
4. Kuadran 4: *Low Power, Low Interest* (Aktor memiliki kekuatan dan kepentingan rendah)
Aktor dalam kuadran ini memiliki sedikit pengaruh dan juga tidak terlalu tertarik dengan program. Berikan informasi yang diperlukan saja, dan pastikan mereka tidak menjadi penghalang atau masalah selama program.

Langkah-Langkah dalam menggunakan *Power-Interest Matrix*

1. Identifikasi Aktor

Langkah pertama, Peneliti mengidentifikasi semua aktor yang terlibat atau dipengaruhi oleh kebijakan atau keputusan yang sedang dianalisis. aktor mencakup pemerintah desa, kelompok tani, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. yang memiliki pengaruh terhadap kepentingan ketahanan pangan.

2. Menilai Kekuatan dan Kepentingan Masing-Masing Aktor

Peneliti menentukan tingkat **kekuatan** dan **kepentingan** setiap aktor. Kekuatan merujuk pada kemampuan mereka untuk mempengaruhi hasil program ketahanan pangan, sementara kepentingan menunjukkan seberapa besar mereka terpengaruh oleh program ketahanan pangan. Penilaian ini biasanya menggunakan skala 1-5, di mana 1 berarti rendah dan 5 berarti tinggi.

3. **Menempatkan aktor dalam Matriks**

Setelah dilakukan penilaian, aktor ditempatkan dalam matriks sesuai dengan tingkat kekuatan dan kepentingan mereka.

4. **Menentukan Strategi Pengelolaan Aktor**

Berdasarkan posisi para aktor dalam matriks, tentukan strategi untuk berkomunikasi dan mengelola hubungan dengan para aktor tersebut. Untuk para aktor yang memiliki kekuatan dan kepentingan tinggi, peneliti lebih sering berkomunikasi dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, sedangkan untuk yang memiliki kekuatan rendah dan kepentingan rendah, peneliti memberikan perhatian minimal.

5. **Evaluasi dan Perbarui Secara Berkala**

Para aktor, kekuatan, dan kepentingan dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengecekan secara berkala guna memperbarui matriks dan strategi memastikan agar manajemen aktor kepentingan tetap efektif.

Dengan menggunakan *Power-Interest Matrix*, peneliti dapat mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan secara lebih terstruktur dan efisien. Dalam proses ini sangat membantu peneliti memahami posisi masing-masing aktor dan menyusun strategi komunikasi yang tepat, pada akhirnya meningkatkan kemungkinan keberhasilan model atau kebijakan yang sedang dijalankan.

IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Mesuji

Kabupaten Mesuji mempunyai kesempatan untuk merancang kebijakan dan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal serta memanfaatkan keunggulan geografisnya, termasuk kemungkinan pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan memaksimalkan manfaat dari jalur transportasi yang ada. Seperti posisi strategis yang dimiliki kabupaten Mesuji yang menjadi pintu gerbang dari Provinsi Lampung menuju Provinsi lainya melalui jalur tol serta jalan lintas Sumatra.

Sejarah awal Kabupaten Mesuji memang memiliki latar belakang yang menarik. Pada tahun 1942, hijrahnya Muhammad Ali Pesirah Pangeran Jugal dari Sirah Pulau Padang Afdeling Kayu Agung beserta keluarganya menandai tonggak penting dalam pembentukan komunitas di Mesuji. Kepindahan atau hijrah ini juga melibatkan beberapa suku lainnya seperti Seri Pulau, Sugi Waras, Kayu Agung, Palembang, dan Lampung. Proses migrasi ini menyebar ke sembilan wilayah yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Mesuji. Ibrohim, (2023).

Pada tahun 1982, Kabupaten Mesuji menjadi salah satu wilayah tujuan untuk Program Transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kemudian dilanjutkan pada tahun 1985 dan tahun 1992. Pada saat itu, wilayah Mesuji masih termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara. Lalu di tahun 1997, Kabupaten Lampung Utara mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang. Wilayah Mesuji akhirnya menjadi bagian dari Kabupaten Tulang Bawang (Ibrohim, 2023).

Perubahan dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks lokal, masyarakat Kabupaten Tulang Bawang yang berasal dari 7 (tujuh) Kecamatan (Mesuji, Mesuji Timur, Tanjung Raya, Panca Jaya, Simpang Pematang, Way Serdang, dan Rawajitu Utara) mempunyai inisiatif untuk melakukan pemekaran wilayahnya guna membentuk Kabupaten baru. Upaya kolektif tersebut diprakarsai oleh Tim Formatur Pembentukan Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Mesuji (disebut Tim Sembilan) pada tanggal 12 Februari 2005 yang beranggotakan; Ismail Ishak, Jaswani, Drs. Marzuki, Drs. Abdul Karim

Mahfudz, Mat Jaya, Wasito, S.Pd., Mulkipli, Sugiarto, S.Pd., dan Sabariman. Selanjutnya terbentuklah Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Mesuji (P3KM). Melalui proses yang cukup panjang dan didukung oleh berbagai pihak sehingga pada Sidang Paripurna DPR-RI pada tanggal 29 Oktober 2008, Mesuji akhirnya disahkan sebagai Kabupaten, yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung yang diundangkan pada tanggal 26 November 2008. Pada tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari jadi Kabupaten Mesuji.

Kemudian untuk menjalankan UU tersebut pada tahun 2011 Depdagri menerbitkan Permendagri No. 66 Tahun 2011 untuk kabupaten ini yang berguna untuk mendukung perangkat kerja Kabupaten Mesuji tersebut (BPS, 2023). Kabupaten Mesuji memiliki luas wilayah 2.184,00 km² yang terdiri dari 7 Kecamatan dan 105 Kampung. Pengembangan ini semenjak terbukanya Mesuji menjadi tujuan Transmigrasi sejak tahun 1983 dari mulai SP 1 dan seterusnya sampai terbukanya pabrik dan tambak udang Dipasena dan lainnya di Mesuji.

Kabupaten Mesuji mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Rawa Jitu Selatan dan Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang, serta Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan.

Terletak di Provinsi Lampung, Indonesia, Kabupaten Mesuji dikenal dengan wilayahnya yang sebagian besar berada di dataran rendah. Salah satu sungai utama yaitu Sungai Buaya, yang merupakan sungai terbesar di wilayah kabupaten Mesuji dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas 731,12 hektare. DAS merupakan area yang berfungsi sebagai tangkapan air untuk sungai tersebut, yang penting untuk pengelolaan sumber daya air dan mitigasi banjir.

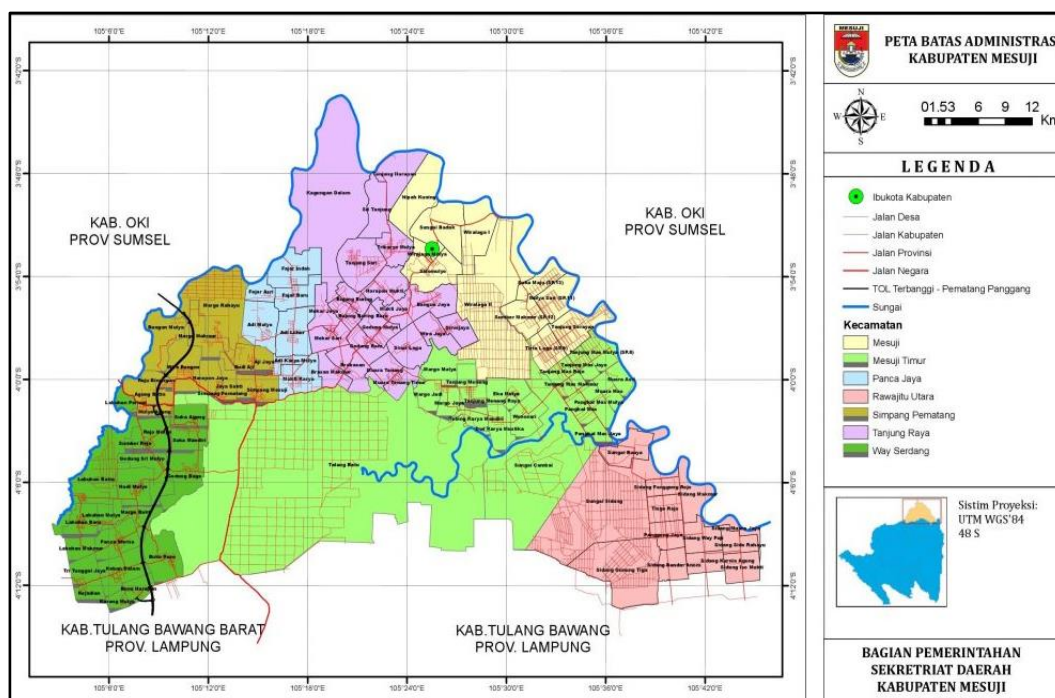
Tabel 4.1 Data Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa	Luas (km ² /sq.km)	Jumlah Penduduk (ribu)
1	Way Serdang	20	304,43	46.571
2	Simpang Pematang	13	166,38	29.653
3	Panca Jaya	7	96,27	19.056
4	Tanjung Raya	21	357,0	44.414
5	Mesuji	11	267,38	24.057
6	Mesuji Timur	20	735,29	40.802
7	Rawajitu Utara	13	273,76	28.132

Sumber : Data BPS 2023.

Pada peta administrasi gambar 4.1 pembagian wilayah kecamatan digambarkan dengan warna-warna berbeda guna memudahkan identifikasi, Warna-warna tersebut membantu visualisasi dan pemahaman mengenai pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Mesuji, membuatnya lebih mudah untuk merencanakan dan mengelola berbagai aspek dalam administrasi dan pengembangan daerah, kecamatan Mesuji diwakili oleh warna biru telur bebek, kecamatan Mesuji Timur diwakili oleh warna kuning, kecamatan Panca Jaya diwakili oleh warna cokelat, kecamatan Rawajitu Utara diwakili oleh warna hijau lumut, kecamatan Simpang Pematang diwakili oleh warna merah jambu, kecamatan Tanjung Raya diwakili oleh warna ungu dan kecamatan Way Serdang diwakili oleh warna hijau Muda.

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Mesuji



Sumber : Bappelitbangda, 2023

a. Sempadan Sungai

Sungai (Way) Mesuji merupakan sungai utama yang memegang peranan vital dalam sistem hidrologi wilayah kabupaten Mesuji. Sungai Mesuji mengalir dari Timur ke Barat Provinsi Lampung, membentang sepanjang perbatasan antara Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan, dan akhirnya bermuara di Laut Jawa, dengan Panjang Sekitar 220 km (wilayah Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang). Sebagai daerah tangkapan air (*Catchment Area*), DAS Sungai Mesuji berfungsi menyerap air dari berbagai sungai kecil yang mengalir ke sungai utama ini. Secara keseluruhan, Sungai Mesuji adalah komponen kunci dalam sistem hidrologi dan lingkungan di Kabupaten Mesuji dan sekitarnya, memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan ekologis.

b. Kawasan Sekitar Rawa

Dengan luas sekitar 20.973 hektare, mencakup beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur dan Kecamatan Rawajitu Utara, kawasan rawa sungai (Way) Mesuji merupakan bagian integral dari sistem hidrologi dan ekosistem Kabupaten Mesuji. Pengelolaan yang baik terhadap kawasan rawa hal penting untuk memastikan kelestarian fungsi ekologisnya serta manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

c. Kawasan Hutan Rakyat

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi, khususnya untuk Hutan Tanam Industri (HTI), dikelola dengan fokus pada penanaman jenis tanaman albasia dan karet. Kawasan HTI terletak di Register 45 Sungai Buaya yang mencakup Kecamatan Way Serdang dan Kecamatan Mesuji Timur. Seluruh kawasan HTI mencakup luas sekitar 42.762 hektare.

2) Kawasan Hutan Rakyat

Sesuai dengan Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) dari tahun 2003 hingga 2007, Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Mesuji memiliki luas Kawasan sekitar 2.600 hektare. Jenis Tanaman Karet Sekitar 832.000 batang dan Jati: Sekitar 208.000 batang, Kawasan hutan rakyat ini tersebar di seluruh kecamatan.

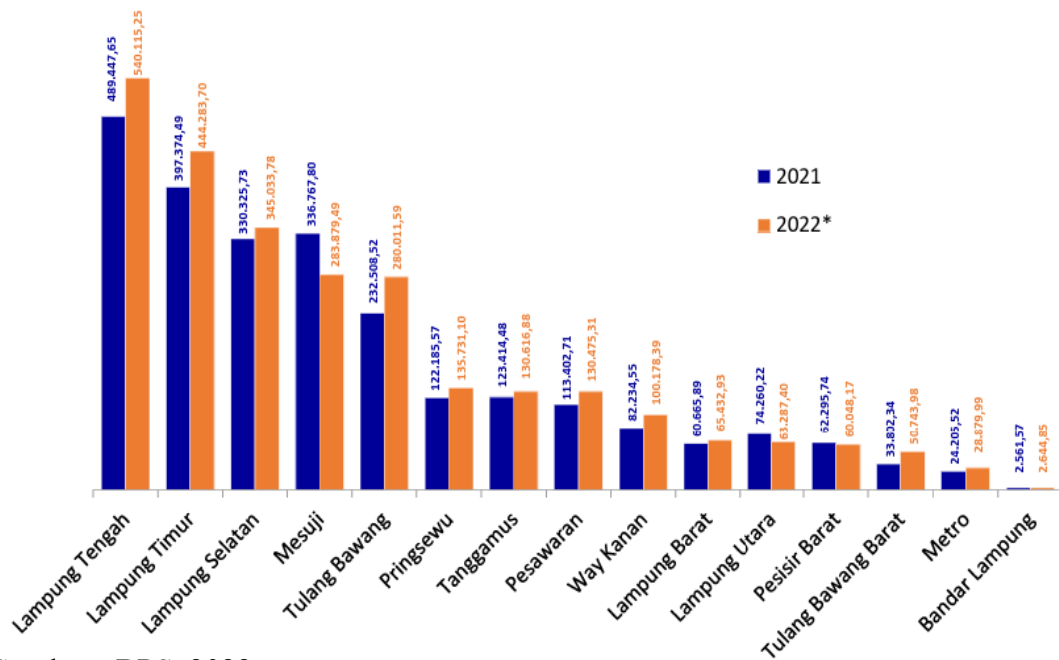
3) Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian mencakup berbagai jenis penggunaan lahan, termasuk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Sebagian besar penggunaan lahan di kawasan kabupaten Mesuji ditujukan untuk pertanian tanaman pangan, yang meliputi tanaman seperti padi, jagung, dan kedelai. Untuk kawasan strategis kabupaten direncanakan kawasan berikut:

- a) Kawasan KTM Mesuji di Mesuji Timur direncanakan sebagai pusat kegiatan agropolitan dengan fokus pada pertanian pangan, hortikultura, dan minapolitan. Pengembangan juga mencakup wisata agro dan perdagangan.
- b) Kawasan Kota Bahari Wiralaga diarahkan untuk memaksimalkan potensi bahari dengan kegiatan perikanan, pusat perdagangan dan jasa, industri pengolahan hasil, serta perkebunan.
- c) Kawasan Minapolitan Rawajitu Utara berfokus pada sektor perikanan dengan dukungan pusat perdagangan dan jasa.

Berikut ini disajikan data pertanian padi di Kabupaten Mesuji pada Tahun 2021-2022 :

Gambar 4.2 Produksi Padi di Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota (Ton-GKG), 2021 dan 2022*



Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan data gambar 4.2 terdapat tiga Kabupaten dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada tahun 2022 adalah Lampung Tengah, Lampung Timur dan Lampung Selatan. Sementara itu Kabupaten Mesuji pada tahun 2022 urutan ke 4, Berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 Kabupaten Mesuji total produksi padi (GKG) pada urutan ke 3. Total produksi padi di Propinsi Lampung pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 2,66 juta ton GKG atau mengalami kenaikan sebanyak 175,91 ribu ton GKG (7,08 persen) dibandingkan 2021. Produksi padi tertinggi di Propinsi Lampung pada tahun 2021

dan tahun 2022 terjadi di bulan April. Sementara produksi padi terendah pada tahun 2021 dan tahun 2022 terjadi di bulan Januari.

Tabel 4.2 Data Pertanian Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2022

Bulan	Produksi Padi Perbulan di Kabupaten Mesuji (Ton)	
	2021	2022
Januari	0	0
Februari	4 860,36	4 635,33
Maret	134 821,22	59 162,39
April	83 088,65	85 869,38
Mei	270,58	9 586,92
Juni	83,79	1 041,40
Juli	4 349,77	3 681,81
Agustus	28 425,82	6 122,29
September	55 055,86	82 052,61
Oktober	25 811,75	41 351,50
November	0	3 255,91
Desember	0	175,18

Sumber : BPS Pertanian Mesuji, 2022.

Berdasarkan data pada tabel 4.2 diketahui pada bulan Januari 2021 dan 2022 kabupaten Mesuji tidak menghasilkan produksi padi. Jumlah produksi padi tertinggi di tahun 2022 bulan April sebesar 85.869,38 ton sedangkan produksi padi ditahun 2021 tertinggi di bulan April sebesar 83.088,65 ton. Dan data luas pertanian di kabupaten Mesuji disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Luas Sawah di Kabupaten Mesuji Tahun 2023

Kecamatan	Luas Baku Lahan Sawah Versi BPN (Ha)		
	HGU	Non HGU	Total
Way Serdang	236	177	413
Simpang Pematang	247	678	925
Panca Jaya	32	434	466
Tanjung Raya	645	204	849
Mesuji	1.815	8.601	10.416
Mesuji Timur	495	6.894	7.389
Rawajitu Utara	0	10.153	10.153
Total	3.470	27.141	30.611

Sumber : BPN 2023.

Berdasarkan data pada tabel 4.3 diketahui bahwa lahan persawah terluas berada di kecamatan Mesuji yaitu seluas 10.416 Ha. Sedangkan kecamatan Mesuji Timur seluas 7.389 Ha. Data pertanian di Kabupaten Mesuji pada tiap kecamatan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 Data Produksi Padi Kabupaten Mesuji Tahun 2022

Kecamatan	Produksi Padi Tahun 2022 Ton GKP (Gabah Kering Panen)
Way Serdang	1.786,40
Simpang Pematang	9.631,60
Panca Jaya	3.812,00
Tanjung Raya	9.064,00
Mesuji	103.206,60
Mesuji Timur	87.070,50
Rawajitu Utara	110.938,80
Total	325.509,90

Sumber : BPN 2022.

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa produksi padi dalam bentuk gabah kering terbesar yaitu kecamatan Rawajitu Utara sebesar 110.938,80 ton kemudian Mesuji 103.206.60 ton dan selanjutnya kecamatan Mesuji Timur sebesar 87.070,50 ton.

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Mesuji Timur

Kecamatan Mesuji Timur adalah salah satu dari tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Secara geografis, kecamatan ini terletak di bagian timur Kabupaten Mesuji, yang berbatasan dengan kecamatan-kecamatan lain dan merupakan wilayah yang memiliki potensi alam yang cukup besar. Kecamatan Mesuji Timur memiliki karakteristik yang khas dalam hal keanekaragaman alam dan potensi ekonomi, dengan sebagian besar wilayahnya masih didominasi oleh kawasan pertanian dan Perkebunan

1. Lokasi dan Wilayah

Secara Geografi kecamatan Mesuji timur terletak di bagian timur Kabupaten Mesuji, yang memiliki batas-batas wilayah yaitu berbatasan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Mesuji dan beberapa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah kecamatan Mesuji timur bervariasi, namun seperti pada umumnya mencakup area yang cukup luas dengan kondisi topografi yang datar hingga berbukit-bukit rendah.

2. Demografi

Penduduk yang ada di Kecamatan Mesuji Timur terdiri dari berbagai etnis dengan mayoritas penduduk adalah suku Lampung. Sedangkan pada umumnya perekonomian penduduknya bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Sedangkan untuk kepadatan penduduk kecamatan Mesuji timur relatif rendah dibandingkan dengan kawasan perkotaan, dengan komunitas yang lebih tersebar di area pedesaan.

3. Ekonomi

- Sektor Pertanian: Pertanian merupakan kegiatan perekonomian yang utama di kecamatan Mesuji timur, dengan tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, serta tanaman perkebunan seperti kelapa sawit dan karet. namun tak sedikit juga lahan-lahan pertanian yang ada tersebut beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk
- Perdagangan serta Industri: Aktivitas yang terdapat di kecamatan Mesuji timur pada umumnya merupakan perdagangan yang berfokus pada kebutuhan lokal dengan beberapa industri kecil dan menengah yang berkembang.

4. Pendidikan dan Kesehatan

- Fasilitas Pendidikan yang terdapat di kecamatan Mesuji timur berupa sekolah dasar maupun sekolah menengah, meskipun terdapat fasilitas pendidikan belum sepenuhnya memadai di seluruh desa.
- Untuk fasilitas Kesehatan dikecamatan Mesuji timur terdapat puskesmas serta klinik kesehatan melayani kebutuhan dasar masyarakat. Namun disisilain, terdapat terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan spesialistik.

5. Infrastruktur

Transportasi yang ada di kecamatan Mesuji timur, Jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Mesuji Timur dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Mesuji serta dengan daerah-daerah sekitarnya. Infrastruktur jalan bervariasi dari kondisi yang baik hingga kondisi yang memerlukan perbaikan. Fasilitas umum yang ada seperti pasar tradisional, balai desa, serta fasilitas lainnya ada, akan tetapi jumlahnya dan kualitas sangat bervariasi antar desa.

a. Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan di Kecamatan Mesuji Timur memiliki beragam kondisi. Beberapa jalan utama yang menghubungkan kecamatan ini dengan kecamatan lain mungkin sudah dalam kondisi baik dan layak untuk dilalui, sehingga memperlancar transportasi antar kecamatan dan mempermudah akses ke pasar, pusat pemerintahan, dan fasilitas lainnya. Namun, terdapat juga jalan yang memerlukan perbaikan yang dapat menghambat mobilitas masyarakat, terutama pada musim hujan yang dapat menyebabkan jalan-jalan berlumpur atau tergenang air.

b. Fasilitas Umum

Terkait dengan fasilitas umum, Kecamatan Mesuji Timur memiliki beberapa fasilitas penting yang berfungsi untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti pasar tradisional dan balai desa. Pasar tradisional berfungsi sebagai tempat jual beli barang kebutuhan sehari-hari dan juga sebagai pusat ekonomi lokal bagi masyarakat. Balai desa biasanya digunakan untuk kegiatan administratif maupun kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat setempat.

6. Budaya dan Sosial

Masyarakat Mesuji Timur masih sangat menjaga berbagai tradisi dan budaya lokal yang ada, termasuk dalam upacara adat, festival maupun hari-hari besar keagamaan masih sering melibatkan paguyuban. Kehidupan sosial di kecamatan Mesuji timur masih cenderung bergantung terhadap hubungan kekerabatan dan komunitas desa yang erat.

Secara keseluruhan, kehidupan sosial di Kecamatan Mesuji Timur mencerminkan suatu komunitas yang sangat menghargai nilai-nilai kekeluargaan, adat, dan tradisi, serta menjunjung tinggi prinsip gotong royong sebagai fondasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

7. Topografi

- Dataran Rendah dan Berawa: Wilayah yang ada di Kecamatan Mesuji Timur hampir sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan area berawa-rawa. Hal tersebut sangat mempengaruhi pola pertanian serta kehidupan sehari-hari penduduk.
- Ketinggian Kecamatan Mesuji timur yaitu antara 14 hingga 36 meter di atas permukaan laut, kondisi tersebut daerah yang berada pada daerah relatif rendah. Hal ini berpengaruh pada pola drainase dan potensi risiko banjir di beberapa area.

8. Iklim

Rata-rata suhu udara yang tinggi, antara 35 hingga 40°C, menunjukkan bahwa kecamatan Mesuji timur memiliki iklim yang panas, dapat mempengaruhi kegiatan pertanian dan kebutuhan energi untuk pendinginan.

Kecamatan Mesuji Timur mempunyai cukup luas lahan pertanian, namun tidak memiliki sawah irigasi. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya sistem pengairan yang memadai guna mendukung pengairan untuk sawah irigasi. Hampir sebagian besar lahan-lahan pertanian yang ada tergantung pada air hujan sebagai pengairannya. Berdasarkan data dari BPS. Mesuji dalam Angka (2023) Kecamatan Mesuji Timur memiliki Luas wilayah yaitu 718.78 km², sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 36.574 jiwa. Kecamatan Mesuji Timur terdiri dari 20 Desa yaitu:

Tabel 4.5 Data Desa di Kecamatan Mesuji Timur

No	Nama Desa / Kampung	Luas (Ha)
1	Dwi Karya Mustika	1.204,00
2	Eka Mulya	1.323,00
3	Margo Jadi	922,00
4	Margo Jaya	736,00
5	Margo Mulyo	719,00
6	Muara Asri	610,00
7	Muara Mas	736,00
8	Pangkal Mas	728,0
9	Pangkal Mas Jaya	571,00
10	Pangkal Mas Mulya	960,00
11	Sungai Cambai	9.942,77
12	Talang Batu	13.784,00
13	Tanjung Mas Jaya	686,00
14	Tanjung Mas Makmur	534,00
15	Tanjung Mas Mulya	1.096,00
16	Tanjung Menang Raya	749,00
17	Tanjung Mas Rejo	643,00
18	Tanjung Menang	746,00
19	Tebing Karya Mandiri	749,00
20	Wonosari	2.812,47

Sumber : BPS Mesuji, 2023.

Berdasarkan tabel 4.2, diatas luas per desa mempunyai luasan yang berbeda-beda. Desa Talang Batu memiliki luas 49.230 Ha merupakan desa terluas yang ada di Kecamatan Mesuji Timur. Sedangkan untuk yang terkecil yaitu Desa Tanjung Mas Makmur dengan luas 534 Ha. Waktu yang ditempuh ke kecamatan mesuji timur dari pusat pemerintahan yang terletak di Desa Wiralaga Mulya sekitar 60 menit dengan jarak sekitar 35 Km. Jarak tersebut menunjukkan bahwa kecamatan memiliki akses yang relatif dekat ke pusat pemerintahan kabupaten.

Dari uraian gambaran umum kecamatan Mesuji Timur terdapat tantangan dan permasalahan yang dihadapi yang pertama Resiko Banjir: dengan daerah yang berada diketinggian antara 14 hingga 36 meter di atas permukaan laut, kondisi tersebut merupakan daerah yang berada pada daerah relatif rendah. Hal ini berpengaruh resiko banjir dibeberapa area. Risiko banjir merupakan tantangan besar dalam pertanian di dataran rendah. Banjir dapat merusak

tanaman dan mengurangi hasil panen, sehingga pengelolaan air dan sistem drainase menjadi penting. Kedua Ketersediaan Sarana dan Prasarana: akses terhadap sarana pertanian seperti pupuk, bibit berkualitas, dan alat-alat pertanian seringkali terbatas di daerah pedesaan. Upaya dalam meningkatkan akses tersebut sangat dibutuhkan karena dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Ketiga Perubahan Iklim: Perubahan iklim global sangat mempengaruhi pola cuaca dan mempengaruhi hasil pertanian. Diperlukan adaptasi dan inovasi dalam teknik pertanian sangat diperlukan guna menghadapi perubahan ini.

4.1.3 Gambaran Umum Desa Wonosari

Desa Wonosari merupakan sebuah kampung yang ada di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. Tahun 1995 Desa Wonosari diresmikan oleh Pemerintah Dinas Transmigrasi Lampung. Tahun 1996 penduduk yang berasal dari kawasan hutan reboisasi mulai mengisi Desa Wonosari, sehingga pemerintah mulai mengantisipasi melakukan penempatan warga yang ada di daerah reboisasi untuk ditransmigrasikan. Sebanyak 650 KK yang merupakan angkatan trans sesuai dengan jumlah kepala keluarga berasal dari Kasui Kabupaten Lampung Utara, Lampung Timur dan Putihdoh Kabupaten Lampung Selatan..

Wonosari adalah sebuah desa yang memiliki sejarah dan perkembangan yang menarik, Wonosari memiliki makna harfiah “Inti Hutan” atau “Bagian Terpenting dari Hutan”. Nama ini mencerminkan asal-usul desa yang mungkin berkaitan dengan lokasi awalnya yang berada di area hutan. Desa Wonosari awalnya merupakan daerah binaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Transmigrasi. Transmigrasi adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di pulau-pulau padat penduduk dengan memindahkan penduduk ke daerah-daerah yang kurang padat. Sejak awal pendirian desa hingga saat ini, Wonosari telah mengalami beberapa pergantian dalam unsur pimpinan kampung. Pimpinan desa yang awalnya dijabat oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) dan Pelaksana Harian (PLH) Kepala Kampung, kini telah diisi oleh kepala kampung yang definitif.

Untuk menyusun gambaran wilayah studi dalam sebuah penelitian secara menyeluruh, penting untuk mengelompokkan informasi ke dalam kategori-kategori utama yang akan memberikan pemahaman komprehensif tentang daerah yang diteliti. Panduan untuk menyusun gambaran wilayah studi berdasarkan empat kategori utama adalah sebagai berikut:

4.1.3.1 Karakteristik Fisik dan Lingkungan

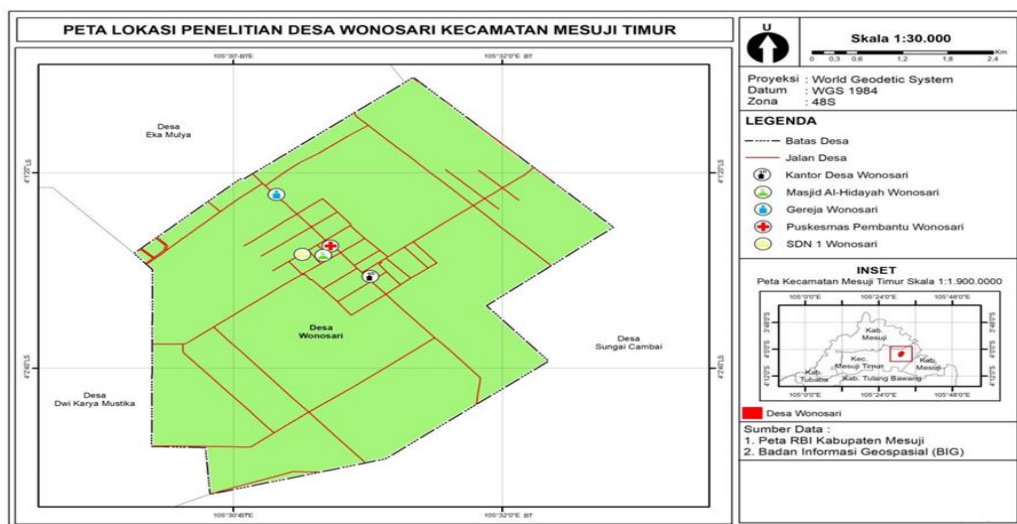
Pada bagian ini akan menggambarkan kondisi fisik dan lingkungan dari lokasi penelitian di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji yang meliputi letak geografis, iklim, topografi, hidrologi dan penggunaan lahan. dengan menyajikan informasi tersebut, dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi fisik dan lingkungan Desa Wonosari. Hal ini penting karena dapat memahami bagaimana faktor-faktor fisik dan lingkungan mempengaruhi kehidupan dan aktivitas di desa tersebut serta mendukung analisis penelitian yang relevan

1. Letak Geografis

Desa Wonosari memiliki luas wilayah 2.812,47 Ha. Secara geografis Desa Wonosari berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Eka Mulya
- Sebelah Timur berbatasan dengan PT.BTLA (sebuah perusahaan atau area tertentu yang berperan penting di wilayah tersebut).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Cambai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dwi Karya Mustika

Gambar 4.3 Peta Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur



Sumber : Profil Desa, Desa Wonosari 2023

Adapun luas wilayah dan banyaknya dusun/RK (Rukun Keluarga) di Desa Wonosari disajikan pada data berikut.

Tabel 4.6 Data Dusun/Rukun Keluarga di Desa Wonosari

No	Nama Dusun /Rukun Keluarga	Luas (Ha)	Jumlah RT
1	Dusun 01	24	4
2	Dusun 02	27,5	6
3	Dusun 03	26	4
4	Dusun 04	28,5	5
5	Dusun 05	27	5
6	Dusun 06	21	5

Sumber : *Diolah Peneliti, 2024.*

Desa Wonosari memiliki karakteristik geografis dan penggunaan lahan yang menarik serta tantangan terkait kualitas sumber daya airnya, pada tahun 1996 lahan perkebunan di Desa Wonosari mencakup sekitar 425 hektare per tahun. Menunjukkan bahwa sebagian besar lahan digunakan untuk kegiatan perkebunan yang mungkin melibatkan tanaman seperti karet, kelapa sawit, atau tanaman perkebunan lainnya. Desa Wonosari terletak di daerah lahan gambut, yang merupakan jenis tanah dengan kandungan organik tinggi memiliki karakteristik yang berbeda dari jenis tanah lainnya. Sedangkan kondisi air banyak cadangan air tawar dari Sungai Cambai, namun air tersebut tidak dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum dan memasak karena warna kuning, keruh dan bau karat

2. Iklim

Seperti pada umumnya dan daerah lainnya, Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji termasuk daerah yang beriklim tropis. Sehingga daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan yang turun pada bulan terjadinya musim. Curah hujan kecamatan Mesuji Timur adalah jumlah air hujan yang jatuh di wilayah tersebut dalam satuan milimeter (mm) per bulan atau per tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mesuji, curah hujan tertinggi di kecamatan Mesuji Timur terjadi pada bulan Maret 2023, mencapai 4295 mm. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus 2023, mencapai 729 mm. Rata-rata curah hujan tahunan di kecamatan Mesuji Timur pada tahun 2023 adalah 2100 mm.

3. Topografi

Lahan di Desa Wonosari relatif datar dengan tingkat kemiringan sekitar 3-8%. Ini menunjukkan bahwa wilayah ini tidak mengalami variasi elevasi yang signifikan dan memiliki kontur yang hampir datar, yang merupakan ciri khas dataran rendah. Ketinggian lahan berkisar antara 0-90 meter di atas permukaan laut (dpl). Ketinggian yang rendah ini menempatkan desa pada dataran rendah yang cenderung rentan terhadap banjir, terutama selama musim hujan atau saat air sungai pasang

Berdasarkan analisis mengenai kondisi geomorfologi, Desa Wonosari terletak di dataran rendah dengan sedikit bergelombang yang berarti wilayahnya tidak memiliki variasi topografi yang signifikan. Kondisi ini cenderung stabil dan lebih mudah untuk dikelola dalam hal pengembangan infrastruktur dan pertanian. Sekitar 73% dari wilayah Desa Wonosari memiliki kemiringan kurang dari 6° dan sekitar 26% dari wilayah desa memiliki kemiringan antara 6° hingga 30°. Kondisi topografi yang datar mempermudah pembangunan infrastruktur seperti jalan, bangunan, dan fasilitas umum tanpa memerlukan penyesuaian signifikan terhadap kontur tanah. Sedangkan untuk pengembangan infrastruktur harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengarahkan Desa Wonosari untuk menjadi desa yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

4. Hidrologi

Sungai Cambai adalah anak sungai dari Sungai Mesuji yang mengalir melalui Desa Wonosari, keberadaan sungai cambia merupakan aset penting yang bisa mendukung pembangunan desa, terutama dalam hal penyediaan air untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan kondisi fisiografi dan tanah desa wonosari cenderung memiliki lahan gambut dan lahan aluvial yang merupakan tanah yang terbentuk dari endapan material Sungai, tanah ini umumnya subur dan ideal untuk pertanian, tetapi lahan aluvial yang ada didominasi oleh rumput dan semak belukar serta belum mengalami pengembangan yang signifikan. Adanya aliran sungai yang dekat dengan permukiman seyogyanya dapat menjadi potensi besar untuk pembangunan jika dikelola dengan baik misalnya, sungai bisa digunakan untuk sistem irigasi, penyediaan air bersih, dan rekreasi. Namun sampai dengan saat ini belum memanfaatkan potensi aliran sungai guna mendukung pengembangan pertanian, dan meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat.

5. Penggunaan Lahan

Dalam memaksimalkan hasil pertanian perlu memperhatikan penggunaan lahan sesuai dengan kelas kesesuaian lahan dan agroekologi. Hal tersebut akan memberikan input yang sangat besar bagi petani guna meningkatkan kesuburan tanah. Produktivitas tanaman pangan sangat tergantung terhadap kualitas penggunaan lahan. pada saat awal pemilihan lahan pembangunan areal-areal tanaman produktif harus disisihkan, karena akan berdampak pada kerugian (finansial) cukup besar dikemudian hari. Oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi dalam kesesuaian lahan yang dapat menjawab tingkat kesesuaian lahan guna pengembangan komoditi secara ekonomi untuk kelayakan usaha tani.

Penggunaan lahan di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji terbagi menjadi dalam beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Kawasan peruntukan permukiman dengan luas 392,5 Ha/m. Terdapat di 6 dusun/RK (Rukun Kampung) yang mencakup area pemukiman penduduk. Ini mencakup area yang digunakan untuk perumahan, fasilitas sosial, dan ruang kehidupan sehari-hari masyarakat.
- b. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dengan luas 131,00 ha. Ruang terbuka non hijau ini mencakup area yang tidak digunakan untuk pertanian atau penghijauan, mungkin termasuk area komersial, industri ringan, atau ruang terbuka lainnya yang tidak memiliki vegetasi.
- c. Kawasan peruntukan pertanian (tanaman hortikultura, budidaya tanaman karet dan sawit) seluas 425 Ha/m
 - 1) Tanaman Hortikultura: Tanaman seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman kecil lainnya.
 - 2) Budidaya Tanaman Karet: Area yang digunakan untuk budidaya tanaman karet, yang merupakan sumber utama karet.
 - 3) Tanaman Sawit: Area untuk budidaya kelapa sawit, yang penting untuk industri minyak sawit.
- d. Kawasan Perkantoran dengan luas 12 Ha/m Area yang digunakan untuk kegiatan perkantoran dan administrasi, mungkin termasuk kantor pemerintah, lembaga swasta, atau fasilitas administratif lainnya
- e. Kawasan Prasarana Umum lainnya dengan luas 8 Ha/m. Area yang digunakan untuk prasarana umum, seperti fasilitas publik, jalan, jembatan, dan area lainnya yang mendukung infrastruktur dan layanan umum

4.1.3.2 Karakteristik Kependudukan

Berdasarkan data BPS Kecamatan Mesuji Timur Tahun 2023. Karakteristik penduduk di Kecamatan Mesuji Timur disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Kecamatan Mesuji Timur Tahun 2023

Desa/Kelurahan	Penduduk		
	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
Dwi Karya Mustika	1.086	967	2.053
Eka Mulya	1.148	1.062	2.210
Marga Jadi	1.376	1.283	2.659
Margo Jaya	868	838	1.706
Margo Mulyo	809	753	1.562
Muara Asri	397	347	744
Muara Mas	442	400	842
Pangkal Mas	529	488	1.017
Pangkal Mas Jaya	497	459	956
Pangkal Mas Mulya	808	777	1.585
Sungai Cambai	933	889	1.822
Talang Batu	2.432	2.170	4.602
Tanjung Mas Jaya	653	608	1.261
Tanjung Mas Makmur	1.006	977	1.983
Tanjung Mas Mulya	751	642	1.393
Tanjung Mas Rejo	888	837	1.725
Tanjung Menang	996	956	1.952
Tanjung Menang Raya	1.180	1.098	2.278
Tebing Karya Mandiri	737	700	1.437
Wonosari	1.431	1.356	2.787
Mesuji Timur	18.967	1.7607	36.574

Sumber : Data BPS Kecamatan Mesuji Timur 2023.

Berdasarkan data pada tabel tersebut diketahui jumlah penduduk Desa Wonosari Kecamatan Mesuji berjumlah 2.787 jiwa yang terdiri dari 1.431 laki-laki dan 1.356 perempuan. Jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Semua penduduknya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

4.1.3.3 Karakteristik Ekonomi

Desa Wonosari merupakan daerah agraris, dimana penduduknya bermata pencaharian pokok pada sektor pertanian, ada beberapa warga yang membuka warung di Desa Wonosari untuk memudahkan warga desa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena jarak antara desa dengan pasar sangat jauh.

4.1.3.4 Karakteristik Pertanian

1. Karakteristik Padi

Kondisi tanah di desa Wonosari yang merupakan tanah gambut tentunya membutuhkan varietas padi yang sesuai dengan kondisi lahan serta cuaca di lingkungan tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan diketahui bahwa sebagian besar masyarakat atau petani di desa Wonosari menanam varietas “padi kebo” atau “inpari 32”.

Varietas padi Inpari 32 adalah varietas inbrida yang dikembangkan oleh empat pemulia padi, yaitu Aan A Drajat, Nafsiyah, Cucu Gunarsih, dan Trias Sitaresmi. Varietas ini sangat cocok ditanam pada sawah irigasi dan pertama kali dilepas pada tahun 2013 di daerah Pati. Inpari 32 memiliki beberapa keunggulan, seperti produktivitas yang tinggi dengan potensi hasil mencapai 8,53 ton/ha Gabah Kering Giling (GKG). Selain itu, varietas ini juga tahan terhadap penyakit Hawar Daun Bakteri (HDB) ras III dan agak tahan terhadap penyakit tungro ras lanrang.

Namun, perlu diperhatikan bahwa Inpari 32 agak rentan roboh di musim penghujan dan rentan terhadap Wereng Batang Coklat (WBC) biotipe 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, disarankan untuk menanam padi ini pada musim tanam pertama atau di musim panas untuk menghindari kerobohan yang dapat menurunkan kualitas dan harga gabah. Pemupukan yang berimbang juga dianjurkan untuk mencegah padi roboh, terutama menghindari pemupukan urea secara berlebihan.

Inpari 32 memiliki postur tanaman yang tegak dengan jumlah anakan sekitar 20 - 25 per rumpun dan jumlah bulir padi tiap malai sekitar 250 butir dengan berat per 1000 bulir adalah 27 gram. Dengan ukuran diameter bulir yang besar, varietas ini berpotensi penuh dalam pengisian bulir, sehingga hasil yang didapat lebih banyak dibandingkan jenis padi yang berbulir lebih dari 250 per malai.

Berdasarkan hasil temuan dan kondisi di lapangan mengenai varietas padi dengan kondisi persawahan di desa Wonosari dimana terjadi gagal tanam sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali pada saat musim tanam yang disebabkan oleh musim penghujan serta struktur tanah yang asam atau lahan gambut, menurut pendapat dan pengamatan yang penulis lakukan maka hal tersebut dinilai kurang sesuai dengan kondisi lingkungan. Perlu dilakukan pengkajian

mendalam antara dinas pertanian serta kelompok tani dan masyarakat untuk mengetahui varietas padi yang cocok dengan kondisi lingkungan dan iklim di desa Wonosari.

Dari berbagai literatur diketahui varietas padi yang cocok untuk pertanian di desa Wonosari yaitu varietas padi yang cocok antara lain adalah Inpari 3, yang merupakan varietas padi rawa dan tidak memerlukan pengeringan gambut¹. Selain itu, ada beberapa jenis padi lain yang sesuai untuk ditanam di tanah gambut, seperti Cisadane, Cisangarung, IR-42, IR 46, Kapuas, Lematang, Sililin, dan Way Seputih. Varietas-varietas ini telah disesuaikan untuk tumbuh di kondisi lahan gambut yang memiliki tantangan tersendiri, seperti ketersediaan air dan kondisi tanah yang khusus.

Penting juga untuk menerapkan praktik pertanian yang ramah gambut, seperti tidak membakar dan tidak mengeringkan gambut, serta menggunakan metode pembersihan lahan secara manual untuk menjaga ekosistem gambut. Dengan memilih varietas yang tepat dan menerapkan metode budidaya yang sesuai, pertanian padi di lahan gambut dapat menjadi lebih berkelanjutan.

2. Karakteristik Petani Desa Wonosari

Karakteristik petani di desa Wonosari yaitu sebagai berikut:

Dalam konteks petani di Desa Wonosari yang umumnya terlibat dalam usaha tani padi sawah, pendapatan mereka memang dipengaruhi oleh berbagai factor. Faktor internal dan eksternal seperti motivasi, pengalaman, tingkat adopsi teknologi, dan modal. Semua factor saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga penting untuk memperhatikan keseluruhan sistem dan mendukung petani dengan cara yang komprehensif untuk meningkatkan pendapatan para petani.

Untuk luas lahan yang dikelola oleh petani bervariasi dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan mereka, Petani yang mengelola lahan yang lebih luas biasanya dapat memperoleh manfaat dari skala ekonomi. Artinya, mereka bisa mengurangi biaya per unit produk karena pembelian input seperti benih, pupuk, dan pestisida dalam jumlah besar seringkali lebih ekonomis. Mereka juga bisa memanfaatkan mesin dan teknologi dengan lebih efisien untuk lahan yang lebih besar.

Sedangkan untuk strategi pengembangan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan usaha tani padi sawah di Desa Wonosari bisa melibatkan pendekatan terpadu yang memanfaatkan berbagai faktor kunci. Beberapa strategi yang dapat diterapkan diantaranya dengan memanfaatkan motivasi petani, ketersediaan kredit, modal, bibit berkualitas, pupuk subsidi, dan dukungan pemerintah dalam penerapan teknologi

4.1.3.5 Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Wonosari

Pembangunan sarana dan prasarana memainkan peran yang sangat krusial dalam mendukung berbagai aspek kehidupan di desa, termasuk aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Terutama memiliki peran penting sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi antar kelompok masyarakat serta menghubungkan desa-desa atau wilayah-wilayah, seperti halnya infrastruktur transportasi yaitu jalan, jembatan, dan sistem transportasi umum memungkinkan mobilitas yang lebih baik untuk orang, barang, dan jasa menghubungkan desa dengan pusat-pusat ekonomi dan pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses yang baik meningkatkan kualitas hidup dan mendukung kegiatan ekonomi lokal.

1. Jalan Desa

Kondisi jalan di desa, sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam hal mobilitas dan kegiatan ekonomi. Jalan yang ada di desa saat ini adalah jalan dengan lebar 3 meter. Jalan ini berfungsi sebagai akses utama untuk mobilitas masyarakat dan transportasi barang. Peningkatan kondisi jalan di Desa Wonosari sangat penting untuk aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya Masyarakat, dengan adanya meningkatkan kualitas jalan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan pemeliharaan jalan yang efektif akan berkontribusi pada kemajuan desa secara keseluruhan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk

Kerusakan paling parah terjadi di dusun Moro Seneng, dengan lubang-lubang yang terbentuk karena ban truk yang terjebak di tengah jalan. Hal ini menyebabkan jalan menjadi tidak teratur dan sulit digunakan, dampak dari kerusakan ini mengganggu perjalanan sepeda dan kendaraan kecil lainnya, serta mengurangi kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan. Kondisi jalan di Desa Wonosari, terutama di dusun Moro Seneng, menunjukkan tantangan signifikan dalam infrastruktur transportasi yang berdampak pada kehidupan sehari-hari dan kegiatan ekonomi masyarakat. Hal yang perlu dilakukan memberikan edukasi kepada pengemudi tentang pentingnya menjaga beban kendaraan dan

dampaknya terhadap kondisi jalan. Kesadaran ini dapat membantu mengurangi kerusakan jalan secara keseluruhan. Pendekatan terintegrasi yang mencakup perbaikan struktural, pengelolaan beban kendaraan, peningkatan drainase, dan dukungan masyarakat akan membawa manfaat jangka panjang bagi pengembangan desa.

Selain jalan utama terdapat jalur belakang di Desa Wonosari berfungsi sebagai elemen pembantu dalam mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Jalur belakang merupakan jalur alternatif yang aman dan nyaman dari jalur lintas depan yang sering dilalui kendaraan berat. Dengan adanya jalur belakang, beban lalu lintas pada jalur lintas depan dapat berkurang, membantu mengurangi kerusakan jalan di jalur utama.

Gambar 4.4 Jalan Desa Wonosari dan pembangunan jalan desa wonosari



Sumber : *Dokumentasi Peneliti, 2024*

2. Saluran Air

Saluran air yang terdapat di Desa Wonosari sudah tersedia namun belum dapat digunakan secara optimal, hal ini dibuktikan pada tanggal 23 Januari 2024 ketika terjadi hujan deras di Desa Wonosari sebagian besar sawah petani mengalami banjir sehingga terjadi gagal tanam. Para petani di Desa Wonosari mengharapkan upaya untuk melakukan normalisasi pada saluran air. Bencana banjir yang terjadi di Desa Wonosari mengakibatkan sawah warga tergenang air setinggi 80 cm. Selain area persawahan, kawasan pemukiman penduduk juga mengalami banjir meskipun tidak parah. Hal ini tentunya menghambat aktivitas warga Desa Wonosari. Dampak yang dirasakan warga cukup mempengaruhi perekonomian masyarakat.

Gambar 4.5 Kondisi Saluran Air Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur



Sumber : *Dokumentasi Peneliti, 2024*

Gambar 4.6 Banjir di Sawah Warga Desa Wonosari



Sumber : *Dokumentasi Peneliti, 2024*

Kondisi akses air bersih di Desa Wonosari, yang merupakan salah satu dari 13 desa di Kecamatan Mesuji Timur, menunjukkan tantangan signifikan dalam penyediaan air bersih. Masalah akses air bersih di Desa Wonosari memerlukan pendekatan multifaset yang mencakup pengembangan infrastruktur IPA, perluasan jaringan distribusi, dan penerapan solusi alternatif. Dengan perencanaan yang baik, investasi yang tepat, dan keterlibatan masyarakat, tantangan ini dapat diatasi untuk meningkatkan akses dan kualitas air bersih

bagi seluruh penduduk desa. Dukungan dari berbagai pihak dan pendekatan yang terintegrasi akan memastikan bahwa penyediaan air bersih menjadi lebih merata dan berkelanjutan di Desa Wonosari dan wilayah sekitarnya.

3. *Rice Milling Plant (RMP)*

Rice Milling Plant adalah sebuah pabrik penggilingan beras yang terdiri dari beberapa unit mesin yang bekerja secara otomatis dan terpadu. Tujuan dari *Rice Milling Plant* adalah untuk menghasilkan beras berkualitas tinggi dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar. *Rice Milling Plant* biasanya memiliki kapasitas produksi antara 1-5 ton beras per jam. Beberapa komponen utama dari *Rice Milling Plant* adalah Pembersih Gabah, Pengupas Gabah, Pemisah, Pemutih, Pemoles, dan Ayakan Menir. *Rice Milling Plant* merupakan salah satu unit bisnis Perum BULOG yang bertujuan untuk melakukan kegiatan produksi pangan, jasa pengeringan, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan gabah beras. Desa Wonosari merupakan salah satu desa terdapat lokasi RMP dan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Gambar 4.7 RMP Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur



Sumber : *Dokumentasi Peneliti, 2024*

4.1.3.6 Mata Pencaharian

Kecamatan Mesuji Timur merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar di Kabupaten Mesuji sekitar 31,91% dari total luas wilayah kabupaten, luasnya lahan tersebut yang mendukung potensi pertanian yang signifikan. Dengan adanya lahan yang luas dan subur serta dukungan dari iklim yang sesuai untuk berbagai jenis tanaman sehingga sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat termasuk Masyarakat Desa Wonosari. Masyarakat Desa Wonosari merupakan hasil dari program transmigrasi, memberikan konteks tambahan mengenai karakteristik dan dinamika desa tersebut.

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Wonosari, cenderung mencerminkan kondisi geografis dan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Berikut adalah beberapa mata pencaharian utama masyarakat Desa Wonosari:

1. Pertanian:

- a. Masyarakat desa Wonosari mengandalkan pertanian padi sebagai mata pencaharian utama, ini menunjukkan bahwa kegiatan pertanian padi sangat penting bagi kehidupan ekonomi mereka. Petani padi di desa tersebut terlibat dalam berbagai aspek pertanian, mulai dari persiapan lahan, penanaman benih, perawatan tanaman, hingga panen dan pengolahan padi. Dengan mata pencaharian utama sebagai petani padi, masyarakat desa Wonosari berperan penting dalam memastikan ketersediaan pangan serta mempertahankan tradisi dan cara hidup pertanian mereka.
- b. Selain menanam padi, masyarakat desa Wonosari juga memanfaatkan lahan kosong untuk menanam palawija seperti jagung dan berbagai jenis sayuran. Pendekatan ini mencerminkan sistem pertanian yang beragam dan adaptif, baik untuk kebutuhan subsisten maupun komersial. Penggunaan lahan kosong yang dilakukan masyarakat untuk tanaman palawija adalah cara yang efisien untuk memaksimalkan produktivitas lahan dan mendiversifikasi sumber pendapatan, pada akhirnya meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi desa.

2. Perkebunan:

- a. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama di kabupaten Mesuji dan menjadi mata pencaharian yang sangat penting bagi masyarakat di Desa Wonosari. Dengan memanfaatkan potensi perkebunan kelapa sawit secara efektif dan berkelanjutan, masyarakat di Desa Wonosari dapat memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan dan meningkatkan kualitas hidup mereka

- b. Perkebunan karet adalah salah satu mata pencaharian yang signifikan di banyak daerah, termasuk di Desa Wonosari, perkebunan karet menjadi salah satu mata pencaharian utama, hal ini dapat memberikan berbagai manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. perkebunan karet juga dapat menjadi sumber pendapatan penting bagi Masyarakat desa Wonosari.

3. **Peternakan:**

Di Desa Wonosari, keberadaan peternakan ayam, kambing, dan sapi mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka. Secara keseluruhan, peternakan ayam, kambing, dan sapi di Desa Wonosari merupakan bagian integral dari ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara efektif, peternak dapat meningkatkan pendapatan, memperbaiki kualitas hidup, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi desa. Pengelolaan yang baik dan inovasi dalam praktik peternakan akan membantu memastikan keberlanjutan dan kesuksesan jangka Panjang

4. **Perikanan:**

Keberadaan Sungai Cambai yang melintasi Desa Wonosari memang dapat memberikan daya tarik dan manfaat besar bagi sektor perikanan di daerah tersebut, Masyarakat yang berada di sekitar Sungai Cambai mendapatkan manfaat ekonomi yang signifikan terutama melalui sektor perikanan. Pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan akan membantu memastikan bahwa manfaat tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Tabel 4.8 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Mesuji (unit), 2023

Kecamatan Subdistrict	Usaha Pertanian Perorangan ¹ Individual Agricultural Holdings ¹	Tanaman Pangan Food Crops			Hortikultura Horticulture	Perkebunan Estate Crops
		Tanaman Pangan ² Food Crops ²	Padi Paddy	Palawija Secondary Food Crops		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Way Serdang	11.271	4.117	142	4.018	1.326	6.996
Simpang Pematang	4.992	1.378	667	749	365	3.716
Panca Jaya	4.294	1.447	93	1.365	385	3.229
Tanjung Raya	9.905	2.985	269	2.728	1.905	7.438
Mesuji	4.934	3.302	2.913	534	338	2.050
Mesuji Timur	10.735	6.308	3.245	3.114	901	5.626
Rawajitu Utara	5.912	5.041	4.989	126	332	2.342
Mesuji	52.043	24.578	12.318	12.634	5.552	31.397

Sumber : BPS, Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Holtikultura 2023

Berdasarkan data diatas, Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kecamatan dan Subsektor khususnya di kecamatan Mesuji Timur sebagai berikut: Jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP)¹ 10.735 unit. Jumlah UTP Tanaman Pangan² seperti tanaman pangan 6.308 Unit, Padi 3.245 Unit, Palawija 3.114 Unit, Jumlah UTP Holtikultura³ 901 Unit. dan Jumlah UTP Perkebunan⁴ 5.626 Unit.

¹ Jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) merujuk pada unit-unit usaha pertanian yang dikelola oleh individu, baik secara langsung maupun dengan mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan sehari-hari kepada seorang manajer.

² Jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) dalam subsektor tanaman pangan mencakup unit-unit usaha yang dikelola oleh individu dan fokus pada kegiatan yang menghasilkan produk tanaman pangan, seperti padi dan palawija.

³ Jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) dalam subsektor hortikultura mencakup unit-unit usaha yang dikelola oleh individu dan fokus pada kegiatan hortikultura. Ini termasuk tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat.

⁴ Jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) dalam subsektor perkebunan mencakup unit-unit usaha yang dikelola oleh individu dan fokus pada kegiatan budidaya tanaman perkebunan.

adalah Kepala Desa Wonosari memiliki peran sentral dalam pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan, termasuk menentukan prioritas dan alokasi untuk berbagai kegiatan. Aktor lain yang memiliki kekuatan besar dalam pemanfaatan dana ketahanan pangan desa adalah pihak swasta dan Investor, karena didukung dalam hal penyediaan teknologi, modal, atau pasar untuk produk pangan desa.

5.2.3.2 Proposisi

1. Jika Politik Anggaran Dalam Pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan dipengaruhi oleh keputusan yang bersifat top down dan kekuatan jaringan sosial maka efektifitas politik anggaran memerlukan penguatan komunikasi, keterlibatan dan komitmen antar aktor.
2. Jika Politik Anggaran Dalam Pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan ditentukan oleh interaksi antar Pemerintah Desa, Kelompok Tani, Masyarakat dan Lembaga Masyarakat maka, rasionalitas individu dan jaringan sosial antar aktor lokal memiliki peran dalam menentukan keputusan politik anggaran.
3. Jika rasionalitas pengambilan keputusan anggaran dipengaruhi kepentingan jangka pendek dan urgensi politik lokal maka, akan mengakibatkan pemanfaatan dana ketahanan pangan tidak selaras dengan kebutuhan pangan berkelanjutan.

VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai model pemanfaatan dana ketahanan pangan di Desa Wonosari, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Politik anggaran dilihat dari perspektif teori *Rasional Choise Institutionalism* dan Teori *Network Institutionalism* dalam pemanfaatan dana ketahanan pangan desa di Desa Wonosari. Teori *Rational Choice Institutionalism* memfokuskan analisisnya pada perilaku individu yang rasional dalam membuat keputusan, di mana setiap individu memilih opsi yang memberikan keuntungan terbesar dengan biaya yang paling rendah. Dalam konteks pemanfaatan dana desa, ini dapat berarti bahwa para pemangku kepentingan akan cenderung mengalokasikan dana pada program-program yang diyakini akan memberikan manfaat terbesar bagi mereka atau komunitas. Di Desa Wonosari, pendekatan ini bisa menjelaskan alokasi dana ketahanan pangan ke infrastruktur, seperti pembangunan jalan, meskipun hal ini belum tentu memberikan manfaat langsung bagi ketahanan pangan itu sendiri. Sebaliknya, *Teori Network Institutionalism* berfokus pada hubungan antaraktor dalam jaringan sosial yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya dan keputusan-keputusan. Dalam konteks pemanfaatan dana ketahanan pangan di desa, hubungan antaraktor seperti pemerintah desa, masyarakat, serta lembaga desa seperti PKK dan kelompok tani sangat penting. Teori ini menyoroti bagaimana hubungan yang terjalin di dalam maupun di luar desa mempengaruhi keputusan alokasi dana.

Dari perspektif *Rational Choice Institutionalism*, para aktor yang terlibat dalam politik anggaran pemanfaatan dana ketahanan pangan di Desa Wonosari termasuk kepala desa, perangkat desa lainnya, hingga kelompok masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, Kelompok Wanita Tani, dan Kelompok Tani. Kepala desa memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana, sementara aktor lainnya berperan lebih pasif dan hanya menyetujui keputusan yang sudah diambil. Dana ketahanan pangan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, yang dianggap penting untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat dan mendukung ekonomi lokal, meskipun tujuan langsung untuk ketahanan pangan belum tercapai. Di sisi lain, teori *Network Institutionalism* memperlihatkan adanya dinamika jaringan sosial yang kurang optimal di antara aktor-aktor di desa. Hubungan antaraktor cenderung tidak seimbang, di mana pengambilan keputusan lebih didominasi oleh kepala desa, sementara partisipasi

masyarakat dan aktor lainnya kurang diperhatikan. Preferensi utama dalam politik anggaran di Desa Wonosari yang ingin dicapai adalah memiliki infrastruktur yang baik, khususnya pembangunan jalan desa. Meski demikian, keputusan-keputusan cenderung diambil oleh pemerintah desa tanpa banyak keterlibatan dari masyarakat.

Pemerintah Desa Wonosari lebih fokus pada infrastruktur, yang dianggap mendukung ketahanan pangan dengan meningkatkan aksesibilitas, meskipun program khusus ketahanan pangan masih minim dan bukan prioritas utama. Sumber daya manusia di desa juga kurang memiliki pengetahuan dan kapasitas dalam mengelola dana ketahanan pangan, sehingga bergantung pada bantuan *eksternal*. Dari sudut pandang *Rational Choice Institutionalism*, keputusan anggaran cenderung didominasi oleh kepala desa, dengan musyawarah desa yang bersifat satu arah, membatasi keterlibatan aktor lain seperti PKK, Karang Taruna, Kelompok Wanita Tani, dan Kelompok Tani. Perspektif *Network Institutionalism* menunjukkan hubungan antaraktor belum optimal karena keputusan sering dibuat secara sepihak oleh kepala desa, yang mengurangi rasa kepemilikan bersama atas program-program yang dijalankan. Minimnya keterlibatan pemerintah kabupaten juga menghambat keberlanjutan program ketahanan pangan.

Hasil implementasi politik anggaran dalam pemanfaatan dana ketahanan pangan di Desa Wonosari masih jauh dari harapan. Program ketahanan pangan yang dijalankan di desa lebih banyak bergantung pada bantuan dari dinas ketahanan pangan kabupaten, sementara dana desa itu sendiri lebih diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Pengelolaan *Rice Milling Unit* (RMP) yang ada di desa juga belum optimal, sehingga petani lebih memilih menjual hasil panen mereka kepada pedagang besar di luar desa daripada memanfaatkan fasilitas lokal. Hal ini menunjukkan bahwa politik anggaran di desa masih belum dapat mendukung ketahanan pangan secara efektif.

Secara keseluruhan, baik dari perspektif *Rational Choice Institutionalism* maupun *Network Institutionalism*, politik anggaran dalam pemanfaatan dana ketahanan pangan di Desa Wonosari masih menghadapi banyak tantangan. Keputusan-keputusan yang diambil lebih banyak didominasi oleh satu aktor, sementara keterlibatan aktor lain masih sangat minim. Hubungan antara aktor desa dan pihak *eksternal* juga belum terjalin dengan baik, sehingga program-program ketahanan pangan belum dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2. Model pemanfaatan dana ketahanan pangan desa dilihat dari perspektif teori *Rasional Choise Institutionalism* dan teori *Network Institutionalism* di desa Wonosari fokus pada ketiga aktor yaitu Petani, Bumdesma dan *Rice Milling Plant (RMP)*. Pemilihan ketiga aktor tersebut jika dilihat dari sisi petani dimana berperan sebagai produsen atau supplier yang menghasilkan komoditas penting dalam ketahanan pangan dengan berbagai kendala, isu dan hambatan yang secara garis besarnya yaitu masalah pertanian, kondisi lahan, lingkungan, cuaca ekstrim dan efek elnino yang hingga saat ini masih dirasakan oleh petani. Selain itu juga petani mengalami kendala dalam pengelolaan gabah pasca panen yang belum dapat diatasi oleh pemerintah daerah karena biaya pengelolaan pasca panen yang cukup besar membuat petani enggan untuk menyimpan beras, kebanyakan memilih menjual dalam bentuk gabah. Dan juga ketika menjual dalam bentuk beras lebih merugikan petani karena harga jual beras yang tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh petani. Dilihat dari segi bumdesma yang diharapkan sebagai pembeli langsung hasil komoditas petani terdapat kendala dari sisi peraturan dan kebijakan teknis dari pemerintah daerah serta kurangnya keyakinan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan bumdesma yang sering kali mengalami kerugian yang akhirnya tidak membawa dampak positif dalam bidang ketahanan pangan desa. Dari sisi pengelolaan pasca panen yang semestinya dapat dikelola oleh RMP namun pada kenyataannya berbagai kendala dan masalah pada RMP membuat masyarakat khususnya petani enggan untuk menggunakan RMP tersebut dan memilih pada pihak swasta atau pedagang besar dari luar kabupaten mesuji. Dengan kolaborasi antara Petani, Bundesama dan *Rice Milling Plant (RMP)* diharapkan dapat mewujudkan beberapa hal antara lain:
 - a. Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa, guna memastikan pangan dapat tersedia dan didistribusikan dengan baik di tingkat desa.
 - b. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan, dan gizi. Desa harus memperhatikan keberlanjutan bantuan pangan bagi warga yang membutuhkan.
 - c. Pemanfaatan pangan di desa. Untuk mendorong konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Beberapa keterbatasan (*limitations*) dari studi mengenai "Politik Anggaran Model Pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan Desa" dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Keterbatasan dalam analisis data

Sehubungan dengan peneliti yang juga merupakan seorang birokrat, keterbatasan waktu menjadi tantangan utama dalam membagi perhatian antara tugas sehari-hari dan pelaksanaan studi. Sehingga, penulisan ini masih mengandung ketidaksesuaian atau kekurangan, yang mungkin disebabkan oleh waktu yang terbatas untuk fokus sepenuhnya pada penelitian. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kualitas dan kedalaman analisis yang disajikan dalam studi.

2. Keterbatasan sumber data dan sumber informasi

Studi ini memiliki keterbatasan dalam hal sumber data dan informasi yang tersedia. Pengumpulan data yang dilakukan masih sangat bergantung pada wawancara dan observasi yang terbatas, yang membatasi ruang lingkup penelitian. Keterbatasan sumber data ini dapat mempengaruhi ketelitian analisis serta keandalan dan kesimpulan yang diambil.

3. Perubahan Kebijakan yang cepat

Kebijakan mengenai alokasi anggaran ketahanan pangan seringkali dipengaruhi oleh pergantian pemerintahan atau perubahan regulasi yang terjadi. Jika penelitian dilakukan pada satu titik waktu tertentu, maka temuan yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan perubahan kebijakan atau dinamika yang terjadi setelahnya. Oleh karena itu, penulisan ini perlu mempertimbangkan ketidaksesuaian antara hasil studi dengan perkembangan kebijakan yang lebih baru

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tentang model pemanfaatan dana ketahanan pangan desa, maka saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan politik anggaran dana ketahanan pangan di Desa Wonosari, sangat penting agar seluruh aktor yang terlibat, seperti pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan instansi terkait, dapat bekerja sama untuk merumuskan penggunaan dana yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Salah satu perbaikan utama yang perlu dilakukan adalah dalam bidang komunikasi, khususnya dalam proses transfer informasi. Hal ini dapat dicapai melalui musyawarah dan diskusi terbuka, yang memungkinkan para aktor untuk mengidentifikasi masalah, isu, pelaksanaan, serta solusi yang efektif guna mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, manfaat dari pemanfaatan dana ketahanan pangan di desa dapat diperoleh secara berimbang bagi semua pihak yang terlibat.
2. Diperlukan komunikasi dan diskusi yang efektif antara berbagai aktor terkait untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Hal ini penting agar keputusan dan kebijakan yang dirumuskan dapat memberikan dampak positif terhadap model pemanfaatan dana ketahanan pangan di Desa Wonosari. Selain itu, penting untuk merumuskan rencana pemanfaatan yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat menarik pasar dan investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan ketahanan pangan di tingkat desa. Ini dapat dicapai melalui jaringan kebijakan yang mampu memuaskan berbagai kepentingan. Selain itu, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh kebijakan pemerintah pusat dan daerah terhadap pengelolaan dana ketahanan pangan di tingkat desa, dengan fokus pada aspek regulasi, alokasi anggaran, serta pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. (2023, June 30). *Memahami Politik Anggaran Pemerintahan Desa Yang Baik*. Habubakar.Id. <https://habubakar.id/2023/06/30/memahami-politik-anggaran-pemerintah-desa-yang-baik/>
- Achmad, M. (2008). *Tehnik Simulasi dan Permodelan*.
- Agrofarm. (2023, May 23). *Skor Indeks Ketahanan Pangan Indonesia di Peringkat ke-63 dari 113 Negara*. Agrofarm.Co.Id. <https://www.agrofarm.co.id/2023/05/skor-indeks-ketahanan-pangan-indonesia-di-peringkat-ke-63-dari-113-negara/>
- Ahdiat, A. (2023, February 21). *Indeks Ketahanan Pangan Negara ASEAN Tahun 2022*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/02/21/indeks-ketahanan-pangan-negara-asean-tahun-2022>
- Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>
- Akmal, S. (2023). PENGARUH PROGRAM KETAHAN PANGAN DANA DESA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA. In *JURNAL Administrasi Bisnis Nusantara* (Vol. 2, Issue 1).
- Ansel, K. (2012). *Viroid Life*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203047033>
- artikelpendidikan.id. (2023, August 2). *Apa Yang Dimaksud Dengan Politik Anggaran*. Artikelpendidikan.Id. <https://artikelpendidikan.id/apa-yang-dimaksud-dengan-politik-anggaran/#:~:text=Apa%20tujuan%20dari%20politik%20anggaran%3F%20Tujuan%20politik%20anggaran,yang%20sesuai%20dengan%20kondisi%20ekonomi%20dan%20kebutuhan%20masyarakat.>
- Azwar, S. (2004). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Baidhowah, A. R. (2020a). RATIONAL CHOICE INSTITUTIONALISM, CONSTITUTIONAL REFORM, AND CONSTITUTION MAKER IN INDONESIA. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 91–101. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i2.1328>
- Baidhowah, A. R. (2020b). RATIONAL CHOICE INSTITUTIONALISM, CONSTITUTIONAL REFORM, AND CONSTITUTION MAKER IN INDONESIA. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 91–101. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i2.1328>
- Bennett, R. L. (1987). *The Capitalist Revolution: Fifty Propositions About Prosperity, Equality, and Liberty*. By Peter L. Berger. New York: Basic Books, Inc., 1986. Pp. v, 262. \$17.95. *The Journal of Economic History*, 47(2), 598–599. <https://doi.org/DOI:10.1017/S002205070004897X>
- Benson, J. K. (1975). The Interorganizational Network as a Political Economy. *Administrative Science Quarterly*, 20(2), 229. <https://doi.org/10.2307/2391696>
- Bernhard, M. (2005). Maryjane Osa. *Solidarity and Contention*. Social Movements, Protest, and Contestation, vol. 18. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003. *Comparative Studies in Society and History*, 47(3), 669–670. <https://doi.org/10.1017/S0010417505230293>
- Blume, L. E., & Easley, D. (2008). Rationality. In *The New Palgrave Dictionary of Economics* (pp. 1–13). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/978-1-349-95121-5_2138-1

- BPN. (2023, February 23). *Jaga Stabilitas Harga dan Persaingan Penyerapan Gabah/Beras di Panen Raya, Badan Pangan Nasional dan Penggilingan Padi Sepakati Harga Batas Atas Gabah dan Beras*. Badanpangan.Go.Id.
- BPS. (2023). *BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MESUJI BPS-STATISTICS OF MESUJI REGENCY KABUPATEN MESUJI DALAM ANGKA MESUJI REGENCY IN FIGURES*.
- Coleman, J. S. (1994). *Foundations of Social Theory*. Harvard University Press.
- Creswell, J., & Poth, C. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches* (3rd ed.). Sage.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage.
- Darmastuti, A. 2013. Local Autonomy and Inter-Sector Performance-Based-Governance in Lampung Province. In *International Conference On Law, Business and Governance (ICon-LBG) (Vol. 1)*. ISO 690.
- Deaton, A., & Muellbauer, J. (1980). An Almost Ideal Demand System. *The American Economic Review*, 70(3), 312–326.
- Diani, M. (1995). *A Structural Analysis of the Italian Environmental Movement*. Edinburgh University Press.
- dinastph. (2023, April 8). *Kontribusi Komoditas Unggulan Lampung Tingkatkan Perekonomian Nasional*. Dinastph. Lampung prov. Go.Id. <https://dinastph.lampungprov.go.id/detail-post/kontribusi-komoditas-unggulan-lampung-tingkatkan-perekonomian-nasional>
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2002). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. *Teaching Sociology*, 30(3), 380. <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Emirbayer, M. (1997). Manifesto for a Relational Sociology. *American Journal of Sociology*, 103(2), 281–317. <https://doi.org/10.1086/231209>
- Epstein, L. (1991). In Defense of American Liberties—a History of the ACLU. By Samuel Walker. New York: Oxford University Press, 1990. 479p. \$24.95. *American Political Science Review*, 85(1), 251–252. <https://doi.org/10.2307/1962889>
- Fahmi, I. (2013). *Ekonomi Politik Teori Dan Realita*. Alfabeta.
- Faizah, S., Hakim, R. R. Al, Pangestu, A., Hidayah, A. H., & Dian Nugraha. (2022). PEMANFAATAN TEKNOLOGI IoT UNTUK PERTANIAN BERKELANJUTAN (IoT TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE). *Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian Berkelanjutan*, 64(2), 1–9.
- Friedkin, N. E. (1998). *A Structural Theory of Social Influence*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511527524>
- Gede, K. (2009). *dan Dinamika Studi Kapital Sosial Social Networks for Developing Agribusiness: A Theoretical Perspective and Dynamics of Social Capital Study*.
- Granovetter, M. (1973). The Strength Of Weak Ties. *American Journal of Sociology*, 78(5), 1360–1380.
- Halim, A., & Adianto, A. (2021). Strategi Pengembangan Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sako Margasari. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i2.545>

- Halim, F., Kurniullah, A. Z., Efendi, M. B., Sudars, A., Purba, B., Sisca, D. L., Mangiring, H., Permadi, A., & Novela, V. (2021). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Yayasan Kita Menulis.
- Hall, P. (1986). *Governing the Economy: The Politics of State Intervention in Britain and France*. Oxford University Press.
- Hamka, Muh., Nadir, S., & Haryanto. (2022). POLITIK ANGGARAN DAN RELASI AKTOR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH. *Jurnal Politik Profetik*, 10(1), 79–98. <https://doi.org/10.24252/profetik.v10i1a5>
- Hardani, Ustiawaty, J., Sukmana, D., & Andriani, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Harsono, D. (2012). *Pendekatan Baru Memahami Institusi di Indonesia*.
- Heckathorn, D. D. (1997). Respondent-Driven Sampling: A New Approach to the Study of Hidden Populations. *Social Problems*, 44(2), 174–199. <https://doi.org/10.2307/3096941>
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative Research Methods*. Sage.
- Huckfeldt, R., & Sprague, J. (1987). Networks in Context: The Social Flow of Political Information. *American Political Science Review*, 81(4), 1197–1216. https://EconPapers.repec.org/RePEc:cup:apsrev:v:81:y:1987:i:04:p:1197-1216_20
- Humphrey, C., Moizer, P., & Turley, S. (1992). The audit expectations gap—plus ca change, plus c'est la meme chose? *Critical Perspectives on Accounting*, 3(2), 137–161. [https://doi.org/10.1016/1045-2354\(92\)90008-F](https://doi.org/10.1016/1045-2354(92)90008-F)
- Hutagalung, S. S., Utoyo, B., Sulistio, E. B., & Puspawati, A. A. 2012. *Optimalisasi Pembangunan Desa Melalui Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa Bagi Sekretaris Desa*. In Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat-Dies Natalis FISIP Unila Tahun.
- Ibrohim, A. N. (2023, April 26). *Asal Usul Nama dan Sejarah Mesuji Lampung, Wilayah yang Sebelumnya Bagian dari Tulang Bawang*. Sindonews.Com. <https://daerah.sindonews.com/read/1081697/174/asal-usul-nama-dan-sejarah-mesuji-lampung-wilayah-yang-sebelumnya-bagian-dari-tulang-bawang-1682492694>
- Indra Jaya, W. 2022. Peluang kolaborasi penta helix bagi pengembangan desa wisata di Provinsi Lampung. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 119-135.
- IKP. (2021). *IKP2021-ISBN*.
- Kavosi, E., Hassanzadeh Rostami, Z., Nasihatkon, A., Moghadami, M., & Heidari, M. (2014). Prevalence and Determinants of Under-Nutrition Among Children Under Six: A Cross-Sectional Survey in Fars Province, Iran. *International Journal of Health Policy and Management*, 3(2), 71–76. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2014.63>
- Kemenkopmk. (2022, June 27). *Kolaborasi dalam mendorong penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan efektif*. Kemenkopmk.Go.Id. <https://www.kemenkopmk.go.id/kolaborasi-dalam-mendorong-penggunaan-dana-desa-untuk-ketahanan-pangan-efektif>
- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa, Pub. L. No. 82 (2022).

- Khairunnisa, A., & Rahmatunnisa, M. (2022). Politik Anggaran di Tingkat Lokal: Politik Elit dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Cileles Kabupaten Sumedang 2022. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 5(2), 82–92. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v5i2.2883>
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. F. M. (2000). Public Management and Policy Networks. *Public Management: An International Journal of Research and Theory*, 2(2), 135–158. <https://doi.org/10.1080/14719030000000007>
- Kompas.com. (2022, June 29). *Pengertian Politik Anggaran*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/00150021/pengertian-politik-anggaran#:~:text=Politik%20anggaran%20adalah%20penetapan%20kebijakan-kebijakan%20tentang%20proses%20anggaran,untuk%20penyimpangan%20negatif%20maupun%20untuk%20meningkatkan%20pelayanan%20publik>.
- Kontopoulos, K. (1993). *The Logics of Social Structure*. Cambridge University Press.
- Krackhardt, D. (1990). Assessing the Political Landscape: Structure, Cognition, and Power in Organizations. *Administrative Science Quarterly*, 35(2), 342. <https://doi.org/10.2307/2393394>
- La Porte, T. (1976). *Organized Social Complexity: Challenge to Politics and Policy*. Princeton University Press.
- Latifah, N., & Aziz, L. (2016a). OTONOMI DESA DAN EFEKTIVITAS DANA DESA. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211. <https://www.bps.go.id/brs/view/id/1227>,
- Latifah, N., & Aziz, L. (2016b). OTONOMI DESA DAN EFEKTIVITAS DANA DESA THE VILLAGE AUTONOMY AND THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND. *Jurnal Penelitian Dan Politik*, 193–211. <https://www.bps.go.id/brs/view/id/1227>,
- Mamuaja, J., Kawatu, F. S., & Kambey, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 249–258. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1221>
- Marta, A., & Agustino, L. (2019). ANALISIS POLICY NETWORKS: UTILITAS DAN LIMITASI. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 7(1), 25–41. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v7i1.1542>
- McAdam, D. (2003). *Social Movements and Networks: Relational Approaches to Collective Action Comparative Politics*. OUP Oxford.
- Meade, J. E., Buchanan, J. M., & Tollison, R. D. (1972). Theory of Public Choice: Political Applications of Economics. *The Economic Journal*, 82(328), 1423. <https://doi.org/10.2307/2231328>
- Medda, F., & Nijkamp, P. (1999). *A Combinatorial Assessment Methodology for Complex Policy Analysis*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:17564461>
- Mohr, J. W., & Duquette, V. (1997). The duality of culture and practice: Poverty relief in New York City, 1888--1917. *Theory and Society*, 26(2/3), 305–356. <https://doi.org/10.1023/A:1006896022092>
- Moleong, L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdak arya.
- Moustakas, C. E. (1994). *Phenomenological research methods*. Sage Publications.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson.
- Nohria, N., & Eccles, R. (1990). *Networks and Organizations: Structure, Form, and Action*. Mass.: Harvard Business School Press.
- Norton, A., & Elson, Diane. (2002). *What's behind the budget? : politics, rights and accountability in the budget process*. Overseas Development Institute.

- Nugraha. (2024). *Kebijakan Politik Anggaran* (S. J. Raharja, Ed.; 2nd ed., Vol. 1). CV. Mega Rancagé Press.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Nurhakim, I., & Yudianto, I. (2018). Implementation of Village Fund Management in Panyirapan Village, Sukanagara Village and Soreang Village, Soreang Sub-District, Bandung Regency. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 1(2), 34–55. <https://doi.org/10.24198/jaab.v1i2.18346>
- Ohanyan, A. (2012). Network Institutionalism and NGO Studies. *International Studies Perspectives*, 13(4), 366–389. <https://doi.org/10.1111/j.1528-3585.2012.00488.x>
- Patton, M. (2014). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Peters, M. A. (2012). Professor Richard Stanley Peters. *Educational Philosophy and Theory*, 44(3), 233–233. <https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2012.00857.x>
- Pollack, M. A. (2001). International Relations Theory and European Integration. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 39(2), 221–244. <https://doi.org/10.1111/1468-5965.00286>
- Pradana, Y. 2024. Korupsi Dana Desa di Provinsi Lampung Tahun 2017-2022. [Korupsi Dana Desa di Provinsi Lampung Tahun 2017-2022 | kumparan.com](https://www.kumparan.com)
- Priyono, B. S. (2019). *Pengembangan perekonomian desa: belajar dari pemanfaatan dana Desa Selinsing dan Sijuk dan Belitung*.
- Purba, D., Juantara, B., PITOJO BUDIONO, B. U. D. I. O. N. O., & Krisbintoro, S. 2020. Modal Sosial Masyarakat Dalam Mendukung Ketahanan Lingkungan Di Desa Bunut Pasar Kecamatan Way Ratay Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 22(2), 132-144
- Purwaningsih, Y. (2008). KETAHANAN PANGAN: SITUASI, PERMASALAHAN, KEBIJAKAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 9(1), 1–27. <https://doi.org/10.23917/jep.v9i1.1028>
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian 2022. (2022). *ANALISIS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2022*.
- Puspitasari, N. W. R. N. (2019). Rational Choice Theory and Social Solidarity. *International Journal of Interreligious and Intercultural Studies*, 2(2), 75–85. <https://doi.org/10.32795/ijiis.vol2.iss2.2019.394>
- Rhodes, R. A. W., Binder, S. A., & Rockman, B. A. (2006). *The Oxford Handbook Of Political Institutions* (1st ed.). Oxford University Press Inc.
- Ritzer, G., & Smart, B. (2001). *Handbook of social theory*. Sage.
- Runtuwu, K. V., Tamboto, H., & Kambey, J. (2021). Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Karimbow Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan). *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 2(2)
- Sari, Y. R., & Kagungan, D. 2016. Kebijakan pengembangan kawasan wisata bahari berbasis kearifan lokal dan penguatan kelembagaan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 14(1), 88-104.
- Shepsle, K. A. (2009). Rational Choice Institutionalism. In *The Oxford Handbook of Political Institutions* (pp. 23–38). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548460.003.0002>
- Smart, B., & Ritzer, G. (2001). *Handbook of social theory*. SAGE.

- Soeparno, Moh. E. D. (2022). Political Budgeting Dynamics: Executive-Legislative Interaction for COVID-19 Budget Policy in Indonesia and Singapore [Dinamika Politik Anggaran: Interaksi Eksekutif-Legislatif dalam Kebijakan Anggaran Penanganan COVID-19 di Indonesia dan Singapura]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(1), 21–42. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2824>
- Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Matra Pembaruan*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.23-32>
- Sofiati, I., Qomariah, N., & Hermawan, H. (2018). DAMPAK KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN. *Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 8(2). <https://doi.org/10.32528/jsmbi.v8i2.1792>
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:180272485>
- Suharjo. (1996). *Perencanaan pangan dan gizi* (1st ed.). Bumi Aksara.
- Thiel, M., Fiocchetto, E., & Maslanik, J. D. (2023). Identity Politics, Political Mobilization, and Social In/Exclusions. In *The Politics of Social In/Exclusion in the EU* (pp. 39–59). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-31264-9_3
- UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. (n.d.).
- updesa. (2023). *Besaran Dana Desa 2024 sesuai UU* . Updesa.Com. <https://updesa.com/besaran-dana-desa-2024/#:~:text=Alokasi%20dana%20desa%20ini%20terbagi%20atas%20beberapa%20kucuran%2C,dan%20di%20tahun%20ini%202023%20sebesar%20Rp.70%20triliun.>
- Updesa. (2024). *Ketahanan Pangan Dana Desa 2024*. Updesa.Com. <https://updesa.com/ketahanan-pangan-dana-desa/>
- UU No. 18 Tahun 2012. (2012).
- Wityasari, N. (2021). *Pengertian-Ketahanan-Pangan*.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research*. SAGE Publications.
- Yusuf, M., & Khoirunurrofik, K. (2022). The Relationship of Village Funds With Village Economic Development: A Village Level Study in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 493–504. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.493-504>